



ASYIKpublisher



Catatan Harian

5

**AHMAD
SYAIKHU**

[AGUSTUS - OKTOBER 2020]



ASYIKpublisher

Catatan Harian **5**
**AHMAD
SYAIKHU**

[AGUSTUS - OKTOBER 20



Catatan Harian 
**AHMAD
SYAIKHU**
[AGUSTUS - OKTOBER 2020]

Penulis:
Ahmad Syaikhu

Editor:
Erwyn Kurniawan

Desain Visual:
Firdaus Usman

Cetakan Ke-I
Oktober 2020

Diterbitkan oleh:
Asyikpublisher

Percetakan:
Asyikpublisher

ISBN:
978-979-25-2678-3

Daftar Isi

Pengantar Ketua Fraksi PKS DPR RI.....	viii
Pengantar Penulis.....	x
• Dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Kita Belajar Mengasuh Anak	1
• Pemimpin Itu harus Konsisten	3
• Meninjau PISEW Saat Reses	7
• Di Bawah Pohon Rindang.....	10
• Omnibus Law: Karpet Merah untuk Siapa?	12
• Hati-hati Meninggalkan Perjuangan	15
• Hari Pramuka: Sudahkah Dasa Dharma Kita Praktekkan?	20
• Refleksi Kemerdekaan: Mengurai Akar Masalah, Menanam Benih Solusi	23
• Hari Konstitusi: Momentum Penegasan Arah Perjalanan Bangsa dan Negara	29
• Kemerdekaan ke-75 RI, Tahun Baru Islam dan Semangat Memberi	36
• Menjadi Tejo	40
• Menyerap Aspirasi.....	43
• Kebahagiaan Anggota DPR Saat Aspirasinya Didengar....	44
• Peran BSBI dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia	46
• RDP dengan 3 Menteri: Dari Geopark Ciletuh hingga Banjir di Karawang.....	52
• PSBB, <i>Good Looking</i> dan	56
• Silang Pendapat yang Tak Elok.....	56
• Syaikh Ali Jaber dan Mendesaknya Undang-Undang Perlindungan Tokoh Agama.....	58

- Hari Tani Nasional: 61
- Memaknai Sejarah dan Ikhtiar Mensejahterakan Petani .. 61
- Dampak Pandemi Covid-19 dan Data Desa Presisi..... 64
- Kurikulum Kepemimpinan Kaderisasi PKS, Pancasila dan UUD NRI 1945 68
- Syaikhu Soroti Naskah Akademik Omnibus Law Ciptaker yang Tidak Berkualitas..... 74
- Awali Reses, Syaikhu Berikan 13 Sapi Kurban di 3 Kabupaten..... 78
- Reses di Kabupaten Bekasi, Syaikhu Adakan Pelatihan Hidroponik..... 81
- Syaikhu Tinjau BSPS di Karawang, Masyarakat Berikan Apresiasi dan Ajukan Usulan Baru 84
- Ekonomi Minus, Syaikhu: Pemerintah Jangan Ngotot Bahas Omnibus Law, Fokus Tangani Covid-19 88
- PKS: Rakyat sedang Susah, Tunda Kenaikan Tarif Tol 92
- Proyek Jalan Tol Cibitung-Cilincing Ambruk, PKS: Kok Setiap Tahun Begini? 95
- Gelar Dengar Pendapat Masyarakat, Syaikhu Pertemuan Akademisi, Adeg dan Kepala Desa di Tiga Kabupaten..... 98
- Bersama Bupati Karawang, Syaikhu Serahkan Alsintan kepada Masyarakat Desa Mekar Asih..... 101
- PKS: Jalur Khusus di Jalan Tol Bahayakan Pesepeda 105
- Ahmad Syaikhu: Jangan Berkerumun, Mari Berhimpun! . 109
- Tarif Tol Cipularang dan Padaleunyi Naik, Syaikhu: Tunda, Waktunya Tidak Tepat! 112
- Nggak Ditindak, ODOL Tetap Marak 116
- Kunjungan Kerja, Syaikhu Tinjau Bangunan SMKN 1 Babelan yang Mangkrak..... 120
- Syaikhu Hadirkan Barista dalam Sosialisasi 4 Pilar MPR di Pesantren Annihayah, Karawang 123

- PKS Minta Kemenhub Tunda Husein Sastranegara menjadi Bandara Domestik..... 126
- Kebahagiaan Anggota DPR Saat Aspirasinya Didengar.... 129
- Kementerian PUPR akan Normalisasi Kali Bekasi dan Pembangunan Bendung Cibeet, Syaikh: Terimakasih, Ini Sesuai Aspirasi..... 132
- Syaikh Pertanyakan Tingginya Angka Kecelakaan kepada Dirjen Perkeretaapian 136
- RDP dengan Dirjen Bina Konstruksi, Syaikh Sampaikan Evaluasi dan Dukungan Sekolah Vokasi 139
- Bandara Kertajati akan Terhubung Jalan Tol, Syaikh: Ini Sesuai Harapan Kami... 142
- Alokasi Dana Desa Naik, Syaikh Minta Kemendes PDDT Lakukan Data Desa Presisi 146
- Hadapi Tantangan Masa Depan, Syaikh Ajak Masyarakat Purwakarta Jaga 4 Pilar MPR 149
- RS Galang Rusak Dihantam Puting Beliung, Syaikh: Segera Perbaiki dan Investigasi!..... 151
- Syaikh Dorong Kemenhub Terus Lakukan Revitalisasi Jalur Kereta Api 154
- Bareng DPR RI, Jembatan Gantung “Bali” di Resmikan Bupati Karawang 157

Pengantar Ketua Fraksi PKS DPR RI

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

SAYA tak pernah lelah mensyiarkan Visi PKS di Parlemen yaitu menjadi yang terdepan dalam mewujudkan Indonesia yang berkarakter, maju, adil dan sejahtera. Untuk itu Fraksi PKS DPR menetapkan garis perjuangan bagi setiap anggotanya, harus pro-rakyat (berpihak pada kepentingan rakyat), pro-umat (menjaga hak beragama umat beragama apapun), dan pro-pengokohan nasionalisme Indonesia (menjaga karakter dan identitas bangsa).

Dengan seluruh amanah tersebut, para anggota Fraksi PKS harus tampil kreatif, inovatif, dan atraktif. Tentunya, tetap dengan mengedepankan substansi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

Kerja-kerja kita di parlemen harus cepat, cerdas, dan terarah agar anggota dewan PKS selalu terdepan. Maksud dari terdepan adalah orang baru berpikir kita sudah melakukan, giliran orang melakukan kita sudah beralih melakukan hal lain yang lebih inovatif. Itulah ciri khas Fraksi PKS DPR RI.

Fraksi PKS juga berkomitmen untuk lebih aktif menjangkau aspirasi rakyat melalui forum terbuka atau penerimaan aspirasi yang semakin intensif setiap pekan. Jika periode lalu kita buka Hari Aspirasi Rakyat setiap minggu, maka periode sekarang menjadi dua hari setiap hari Selasa dan Jum'at.

Pada titik inilah, hadirnya buku yang ditulis Ustadz Ahmad Syaikhul ini menjadi sangat penting. Sebab isi buku beliau mengkonfirmasi kerja-kerja nyata kita selama menjadi Anggota DPR, sesuai visi dan misi kita di Parlemen.

Selain itu, buku ini juga seperti cermin partai terkait isu-isu kekinian. Apa dan bagaimana sikap Fraksi PKS di parlemen dalam merespons isu, bisa tercermin di buku ini.

Semoga buku ini akan menjadi bukti bahwa kita bersama rakyat. Sebab, yang terucap akan menguap dan yang ditorehkan dalam tulisan akan kekal abadi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 14 Oktober 2020

Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A

Ketua Fraksi PKS DPR RI 2019-2024

Pengantar Penulis

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

TAK TERASA, satu tahun sudah saya mendapat amanah sebagai Anggota DPR RI. Di rentang waktu itu, sudah terbit buku Catatan Harian. Dari pertama dan terbaru yang kelima.

Pada Catatan Harian ke-5 ini, banyak isu penting yang saya tuliskan. Di antaranya soal Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) atau Omnibus Law yang kini sudah jadi Undang-Undang (UU). Ada juga tentang mendesakny UU Perlindungan Tokoh Agama seiring penusukan Syaikh Ali Jaber.

Soal Omnibus Law ini, saya juga menyoroti tentang untuk siapa sebenarnya UU tersebut. Sebab isinya berpotensi merugikan rakyat.

Karena itu, saat pengesahan menjadi UU, Fraksi PKS menolaknya. Bahkan setelah itu, saya dalam kapasitas sebagai Presiden PKS, meminta pemerintah untuk mencabut UU Ciptaker dan menerbitkan Perppu.

Buku ini mempertegas posisi kami. Bahwa sejak awal, PKS sudah menolak keberadaan RUU Ciptaker. Sehingga jika ada pendapat yang mempersoalkan penolakan PKS hanya di akhir saja, maka terjawab dengan buku ini.

Semoga karya sederhana ini bermanfaat. Dan menjadi rekam jejak bagi saya dan F-PKS pada umumnya, dalam menyikapi isu-isu kebangsaan dan keumatan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Bekasi, 14 Oktober 2020

Ahmad Syaikh

Dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Kita Belajar Mengasuh Anak

Setiap berbicara tentang anak, kita harus mengingat sebuah dialog yang menyejarah. Antara Nabi Ibrahim as dan Ismail as. Percakapan keduanya bahkan diabadikan Allah dalam Al-Qur'an.

"Maka Tatkala anak itu sampai (pada umur) sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai Anakku, sesungguhnya Aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu? Ia menjawab: "Wahai ayahku! Lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, Insya Allah Engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." (QS. As-Shaffat : 102)

SEBUAH dialog yang sungguh luar biasa. Bayangkan, kala itu sebagai seorang Ayah, Nabi Ibrahim as menghadapi situasi konflik yang sangat pelik. Dia harus menyembelih anaknya yang dinanti kehadirannya sejak lama.

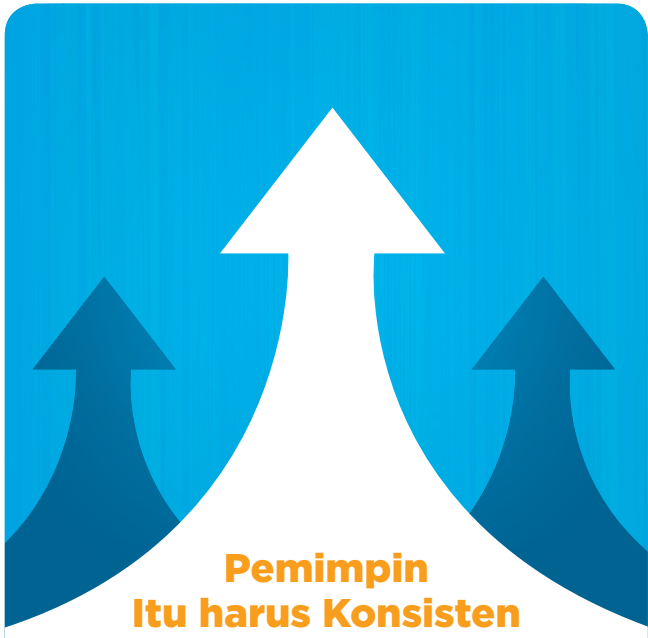
Sebagai seorang Ayah, Nabi Ibrahim tentu saja berkuasa atas anaknya. Dia memiliki otoritas untuk membuat anaknya taat. Namun, yang dilakukannya bukan bertindak otoriter dan instruktif. Dia justru mengajak Sang Anak berdialog dengan rangkaian kalimat nan indah.

Nabi Ibrahim as mengedepankan dialog. Persuasif. Tak ada kekerasan. Dan respons pendekatan tersebut dari Nabi Ismail as tak kalah dahsyatnya. Ismail mempersilakan Sang Ayah menyembelihnya jika memang perintah Allah SWT. Bahkan di akhir jawabannya, Ismail menyelipkan optimisme akan sabar dalam menghadapinya.

Peristiwa ini memberi hikmah besar pada kita. Bahwa komunikasi adalah kunci yang sangat penting dalam berinteraksi antara orangtua dan anak. Komunikasi menjadi cara terbaik untuk menyelesaikan persoalan dan konflik. Serta menghargai anak.

Di Hari Anak Nasional ini, sudah sepatutnya kita belajar dari Nabi Ibrahim as dan Nabi Ismail as. Agar anak-anak kita jadi generasi cerdas dan taqwa. Serta menjadi anak-anak mandiri yang tak bergantung pada nama besar ayahnya. Apalagi diajak untuk membangun dinasti.

Selamat Hari Anak Nasional. 🍀



Pemimpin itu harus memiliki sikap konsisten.

Tidak boleh standar ganda. Antara ucapan dan tindakan harus sejalan. Sayangnya, hal itu semakin sulit kita temukan. Bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami.

DULU kita pernah menjadi saksi. Ada seorang pemimpin ibukota negeri yang berjanji tak akan mau jadi calon presiden.

“Saya tak memikirkan copras-copres...,” kurang lebih begitu janjinya.

Tapi fakta berbicara sebaliknya. Dia menanggalkan jabatannya sebagai gubernur, lalu maju dalam pilpres kemudian terpilih.

Kini, ada sosok anak muda yang maju sebagai calon walikota. Tiket sudah didapat dari partai. Banyak pengamat menyatakan, pencalonan anak muda tersebut merupakan gejala dinasti politik. Sebelumnya, dia pernah berkata:

“Dinasti apa? Bapak aja gak punya partai, kok pengen dinasti. Engga ada. Kasihan rakyatnya kalau ada dinasti,” katanya, Ahad, 11 Maret 2018, seperti dikutip dari Tempo.com.

Terbaru, sikap inkonsisten diperlihatkan DPR. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Baleg DPR RI menggelar Rapat Panitia Kerja (Panja) melanjutkan pembahasan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja di masa reses. Rapat tersebut berlangsung secara fisik dan virtual, di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Bukhori Yusuf mengatakan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak menghadiri rapat Baleg pada masa reses.

“Ya, benar, tetapi PKS enggak hadir karena masa reses,” ujar Bukhori, Rabu (22/7).

Kita tentu teringat dengan kasus munculnya Djoko Tjandra, buronan koruptor kelas kakap. Tiba-tiba dia hadir dan bisa masuk ke Indonesia serta membuat

e-KTP dalam waktu singkat.

Ada desakan dari Komisi III DPR melakukan rapat dengar pendapat (RDP) soal ini. Tapi ditolak pimpinan DPR berdasarkan hasil Badan Musyawarah (Bamus) dengan alasan sedang reses.

Menurut Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, DPR tak konsisten menjalankan Tata Tertib DPR.

Lucius menjelaskan, jika Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengacu pada Pasal 1 dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, khususnya aturan mengenai masa reses, alasan tersebut dapat diterima.

Aturan tersebut berbunyi “Masa reses merupakan masa di mana DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja”.

Lucius mengatakan, Pasal 1 ini didukung Pasal 52 ayat 2 yang menyatakan, apabila dalam masa reses ada masalah menyangkut wewenang dan tugas DPR yang dianggap mendasar dan perlu segera diambil keputusan, pimpinan DPR secepatnya memanggil Badan Musyawarah untuk mengadakan rapat setelah mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi.

Menurut Lucius, tidak ada aturan dalam Tata Tertib DPR yang membedakan rapat pembahasan RUU dan rapat dalam fungsi pengawasan.

Oleh karenanya, ia menilai, aturan tatib yang dibuat

DPR itu tidak konsisten.

Lucius mengatakan, dari perbedaan perlakuan atas dua kegiatan DPR di masa reses tersebut. Ia menilai, pimpinan DPR tebang pilih dalam memberikan izin untuk berkegiatan di masa reses.

“Kelihatan sekali ada tebang pilih dalam hal ijin pimpinan bagi DPR untuk berkegiatan di dalam kompleks DPR pada masa reses. Padahal Tatib tak pernah memberikan pengecualian hanya untuk pembahasan legislasi tetapi tidak untuk pelaksanaan fungsi pengawasan,” ucapnya.

Bagi saya, sikap inkonsisten ini memang aneh. Mengapa untuk RUU Ciptaker boleh meski sedang reses, sedangkan soal Djoko Tjandra tidak diizinkan dibahas.

Inkonsistensi sangat berbahaya. Apalagi dilakukan oleh para pemimpin. Baik di Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan level kepemimpinan lainnya. Pagi menyatakan A, siang bilang B dan sore menyebut C.

Sikap tersebut dilihat oleh ratusan juta rakyat Indonesia. Dan akan sangat mengkhawatirkan jika mereka menganggap inkonsistensi hal yang lumrah dilakukan. Sebab mereka meneladani apa yang ditunjukkan oleh pemimpinnya.

Kita memang memiliki lidah yang tak bertulang. Tapi, kita juga mempunyai hati nurani yang selalu mengarahkan kita pada kejujuran dan kebaikan. 🙏



Meninjau PISEW Saat Reses

Reses bagi seorang anggota DPR bukan untuk berleha-leha. Bersantai atau plesiran. Justru, reses membuat agenda kegiatan bertambah padat. Sebab ini momentum emas untuk bertemu konstituen di dapil.

DI AWAL reses kali ini, saya berkunjung ke Desa Mekarasih, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Lokasinya mendekati laut. Datang ke sana pada Rabu, (23/7) lalu.

Ada dua agenda kegiatan. *Pertama*, melihat sapi qurban yang akan diberikan kepada masyarakat. *Kedua*, meninjau Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).

Saya berjalan kaki sekitar 400 meter menuju lokasi. Menyusuri tepi sawah. Dengan kondisi jalan yang tak semuanya mulus. Bersama dengan tokoh masyarakat setempat. Termasuk Kepala Desa Mekarasih Wawan Wahyudin.

Tiba di lokasi, sudah berkumpul masyarakat. Sebagian besar bekerja dalam program PISEW, yakni membuat turap kiri kanan jalan dan jalan sepanjang 700 meter. Menghubungkan antara Desa Mekarasih Kecamatan Banyusari dan Desa Gempol Kecamatan Banyusari.

“Ini bermanfaat sekali Pak Syaikhu. Selama ini akses dua desa tersebut susah dilalui. Ini yang menjadi salah satu keinginan kami sejak kecil,” ujar Wawan.

“Kegiatan ini juga dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Karena mereka bisa bekerja di sini. Jadi semacam padat karya tunai,” lanjut Wawan.

“Kami mengucapkan terimakasih banyak kepada Pak Syaikhu yang telah membawa aspirasi kami dan mengawal program ini di DPR,” kata Wawan lagi.

Sebagai informasi, kegiatan PISEW diselenggarakan melalui bentuk pemberdayaan dan partisipasi masyarakat atau Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) sehingga memberikan kontribusi dalam pengurangan angka pengangguran dan penyediaan lapangan kerja saat masa pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini.

Potensi penyerapan tenaga kerja setiap lokasi sebanyak 17 orang dengan masa pelaksanaan sekitar

75 hari, sehingga total potensi penyerapan tenaga kerja Program PISEW tahun 2020 sebanyak 15.000 tenaga kerja atau 1.125.000 Hari Orang Kerja.

Realisasi program PISEW adalah membangun infrastruktur dasar skala wilayah kecamatan atau perdesaan seperti pembangunan jalan lingkungan dan jembatan kecil.

Kemudian, peningkatan kualitas air minum dan sanitasi serta membangun infrastruktur pendukung produksi maupun hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM, sehingga memberi manfaat dalam meningkatkan kapasitas produksi komoditas unggulan serta potensi lokal wilayah setempat.

Sebagai Wakil Rakyat, saya berusaha seoptimal mungkin membawa aspirasi masyarakat dan memperjuangkan serta mengawalinya. Agar program seperti ini dapat bermanfaat dan tepat sasaran. 🍀

”

Kami mengucapkan terimakasih banyak kepada Pak Syaikh yang telah membawa aspirasi kami dan mengawal program ini di DPR.

“



Di Bawah Pohon Rindang

Mendengar dan menyerap aspirasi bisa dimana saja. Apalagi saat reses. Bisa di rumah warga, masjid, pasar, terminal, tepi sawah. Termasuk di tengah kebun, di bawah pohon rindang.

BEGITULAH yang saya alami ketika Reses IV Masa Sidang Tahun 2019-2020. Tokoh masyarakat dan warga di Desa Sarijaya, Kecamatan Majalaya, Karawang menerima saya di bawah rindangnya pohon.

Digelar meja berbentuk segi empat. Ada kursi yang diberi jarak. Kami pun duduk sambil menikmati

hembusan angin yang bisa melenakan.

Suasana seperti ini terkadang dibutuhkan. Santai tapi tetap serius. Biasanya masyarakat juga lebih terbuka menyampaikan aspirasinya.

“Pak Ustadz Syaikh, kita ajukan lagi ya usulan bedah rumah,” ujar Kepala Desa Sarijaya Enin Sutisna.

Canda ringan juga kerap mengiringi pertemuan semacam ini.

“Wah ini ada nama yang sama dengan saya. Pak Saekhu,” kata saya saat melihat ada Bimaspol bernama Saekhu, tertera jelas di baju dinasya.

Gelak tawa pun tak terelakkan. Banyak yang baru sadar ternyata ada kemiripan nama antara saya dengan rekan mereka.

Acara kian mengasyikkan saat makan siang. Lauk pauk khas desa tersaji. Dari sayur asem hingga jengkol. Nasinya khas Karawang. Pulen dan wangi.

Kegiatan seperti ini pas dengan singkatan DPR: Di bawah Pohon Rindang... 🍃

”

**Suasana seperti ini
terkadang dibutuhkan. Santai
tapi tetap serius. Biasanya
masyarakat juga lebih terbuka
menyampaikan aspirasinya.**

“

Omnibus Law: Karpets Merah untuk Siapa?

Jika ada kesan mengebut Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja atau RUU Cipta Kerja, itu tak terbantahkan. Publik dengan mudah dan terang-benderang menangkap kesan tersebut.

LIHAT saja bagaimana RUU itu terus dibahas oleh DPR, meski para Wakil Rakyat sedang reses. Lalu, ada pernyataan dari Sekretaris Kemenko Perekonomian Susi wijono Moegiarso. Dia menyatakan, pemerintah bersama Panitia Kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Panja Baleg DPR) terus mengebut pembahasan tersebut. Saat ini, jadwal pembahasan ditetapkan sebanyak tiga sampai empat kali dalam seminggu.

“Sudah lebih dari 10 kali bahas di Panja Baleg, Senin, Selasa dibahas, besok dimulai lagi. Apakah bisa selesai sebelum 17 Agustus terakhir? Kami targetkan mudah-mudahan bisa segera selesai,” kata Susi saat konferensi pers virtual, Rabu (5/8).

Susi melanjutkan, pemerintah dan legislatif setidaknya sudah membahas lima bab dari total 15 bab yang ada di RUU tersebut. Dari lima bab tersebut, ada tiga perizinan usaha yang dibahas.

“Tiga perizinan berusaha ini hampir 50 persen dari

substansi,” ungkap Susi.

Terkait Bab Ketenagakerjaan, pembahasan sudah dilakukan dalam waktu sebulan terakhir, secara tripartit dengan melibatkan serikat pekerja.

“Hasilnya Ibu Menteri Ketenagakerjaan (Ida Fauziyah) akan laporkan ke empat Menko. Lalu kami bawa lagi minggu depan untuk Panja Baleg,” lanjut Susi.

Menurut Susi, RUU ini terkesan dikebut walau di tengah wabah Corona, karena urgensinya yang besar dalam mendukung iklim investasi di Indonesia ke depan.

“Kondisi sekarang sangat membutuhkan RUU Cipta Kerja ini,” tegasnya.

Benarkah demikian?

Saya melihat argumentasi tersebut tidak tepat. Justru terkesan dicari-cari pembenarannya. Kalau kita cermati, RUU Ciptaker ini minim sekali penjelasan soal bagaimana memperbaiki dan menstimulus roda perekonomian Indonesia. Tidak ada penjelasan secara detail tentang ini. Apa dan bagaimana caranya.

Di sisi lain, RUU Ciptaker ini tidak tepat sasaran. Problem mendasar atau fundamental ekonomi kita adalah pada produktivitas pekerja yang rendah. Coba simak data Indeks Kompetisi Global yang dirilis di World Economic Forum (WEF) pada 2019. Kemampuan pekerja Indonesia di peringkat ke-65 dari 141 negara dengan skor 64.

Peringkat kita kalah dari Malaysia yang nangkring

di posisi ke-30 dengan skor 72,5, walaupun kita masih unggul dari Thailand dan Vietnam yang berada di peringkat 73 dan 93. Sementara itu, RUU Ciptaker justru hanya fokus untuk menghasilkan lapangan kerja baru, bukan untuk meningkatkan produktivitas pekerja.

Kemudian, RUU Ciptaker ini juga seperti mengalami disorientasi. RUU Ciptaker ini dimaksudkan untuk mempermudah investasi, tetapi dengan meletakkan prioritas pada isu ketenagakerjaan. Ini tentu saja orientasi yang salah.

Mengutip data World Economic Forum, permasalahan utama yang menghambat investasi di Indonesia adalah korupsi dan ketidakpastian hukum yang melingkupinya. Ada Riset WEF 16 faktor yang menjadi penghalang iklim investasi di Indonesia. Korupsi jadi penghambat utama. Itu bisa dilihat dari posisi Indonesia saat ini, berada di urutan ke-85 dari 180 negara pada Indeks Persepsi Korupsi (Perception Indeks) 2019 yang dirilis oleh Transparency International.

Tak heran jika RUU ini banyak mendapat penolakan dari berbagai kalangan. Sebab secara filosofis, substansi dan teknis, RUU ini memiliki kejanggalan dan kelemahan.

Kita pun patut bertanya. Saat pandemi belum berakhir, kemudian resesi ekonomi di depan mata, lalu mengapa RUU Omnibus Law Ciptaker ini terkesan dikebut pembahasannya?

Ada apa dengan ini semua? Sesungguhnya, untuk siapa karpet merah yang digelar oleh RUU ini? 🍷



Hati-hati Meninggalkan Perjuangan

Jelang Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia, wajah-wajah Para Pejuang seperti terlintas. Lalu, kita pun membayangkan kisah heroik mereka saat berhadapan dengan penjajah di medan perang.

PENUH air mata. Darah tertumpah. Raga tercabik-cabik. Nyawa melayang. Hanya demi mengusir kaum kolonial dan antek-anteknya, agar Indonesia merdeka.

Dalam Islam, berjuang adalah salah satu tuntutan fitri. Tujuannya mempertahankan jiwa, harta, keluarga, kehormatan dan agama atau ideologi seseorang. Tentu saja ladang perjuangan sedemikian banyak; dari mencari rezeki yang halal, bekerja secara optimal, menuntut ilmu untuk bekal beramal sampai pada mempertahankan eksistensi melalui sebuah peperangan, seperti para Pahlawan kita dahulu kala.

Terkait peperangan, tentu saja memerlukan komitmen yang kuat karena taruhannya adalah nyawa. Kerapkali, ini menjadi batu ujian yang harus dilalui dalam perjuangan membangun sebuah peradaban. Pantas jika Allah memberikan balasan yang tertinggi bagi mereka yang mati di medan perjuangan sebagai syahid di jalan Allah, yang balasannya surga.

Kita patut bersyukur dilahirkan dari rahim Para Pejuang. Orang tua, kakek nenek, nenek moyang kita adalah pejuang. Berapa banyak darah yang tertumpah untuk mempertahankan negeri tercinta, Indonesia. Berapa banyak nyawa yang melayang karena harapan ingin meraih kemerdekaan.

Tak semua orang bisa Istiqomah atau komitmen dalam berjuang. Sebab, taruhannya adalah nyawa. Karena itu, kita sering mendengar kisah mereka

yang meninggalkan perjuangan dan mereka yang konsisten di medan laga. Pergulatan batin acap kali terjadi. Apakah akan terus berjuang untuk meraih dan mempertahankan kemerdekaan, atau duduk-duduk saja dalam keterjajahan.

Al-Qur'an menggambarkan suasana batin tersebut. Yakni kepada yang meninggalkan perjuangan.

إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَافْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ

“Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi (berperang) sejak semula. Karena itu duduklah (tinggallah) bersama orang-orang yang tidak ikut (berperang)”.
(QS. At-Taubah : 83)

Berhati-hatilah ketika ada bisikan untuk meninggalkan medan perjuangan, padahal kita mampu berjuang. Karena bisa mengakibatkan hukuman dari Allah berupa tidak mampu melakukan amal-amal kebajikan yang lainnya. Atau lambatnya mendapatkan pertolongan berupa kemerdekaan untuk membangun sebuah peradaban.

Al-Qur'an menggambarkan bagaimana setan membisikkan banyak alasan kepada manusia untuk meninggalkan perjuangan.

Pertama, karena alasan cuaca. Sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat: 81.

لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ

“Janganlah kamu berangkat (pergi berperang) dalam panas terik ini”.

Kedua, karena alasan sibuk mengurus keluarga dan bisnis. Allah mengingatkan dalam QS. Al-Fath: 11.

شَغَلْتَنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا

“Kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami”.

Ketiga, alasan keamanan. Allah mengabadikan dalam firman-Nya:

يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا

“Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga)”. Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka, mereka hanyalah hendak lari”. (QS. Al-Ahzab : 13)

Keempat, alasan krisis kepemimpinan dan minim dana. Allah berfirman:

قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ

“Mereka menjawab, “Bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak”. (QS. Al-Baqarah: 247)

Banyak lagi alasan yang bisa dibuat oleh orang-orang yang tidak siap berjuang atau melanjutkan perjuangan. Sesungguhnya, semuanya merupakan cermin kerapuhan dan keringkahan hati seseorang, krisis hati (*uzmah qolbiyyah*), sehingga tidak mau menapaki jalan perjuangan.

Para Pendahulu kita telah berjuang memerdekakan negeri kita tercinta. Saatnya kita melanjutkan perjuangan mereka dengan mengisi pembangunan dan membangun peradaban yang dicita-citakan.

Mari kita bergandengan tangan, songsong masa depan yang lebih baik, melanjutkan perjuangan... Jangan sampai kita meninggalkan perjuangan dengan cara berdiam diri atau justru menjadi bagian dari kelompok yang menjajah bangsa kita.

Merdeka... Allahu Akbar... 🇲🇵

Hari Pramuka: Sudahkah Dasa Dharma Kita Praktekkan?

Ketika kali pertama istilah Pramuka dilontarkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwana IX pada 59 tahun silam, saya teramat yakin beliau ingin Pramuka menginspirasi anak bangsa. Nilai-nilainya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

TERMINOLOGI Pramuka terinspirasi dari kata Poro-muko. Artinya pasukan terdepan dalam perang. Namun, kata Pramuka dimaknai menjadi Praja Muda Karana yang berarti “Jiwa Muda yang Gemar Berkarya”.

Sejarah Pramuka di Indonesia hampir sama dengan historis perjalanan bangsa ini merebut kemerdekaan. Tahun 1916, Mangkunegara VII di Surakarta menginisiasi berdirinya Javaansche Padvinders Organisatie.

Setelah itu, lahir gerakan-gerakan sejenis yang dikelola oleh organisasi-organisasi pergerakan. Ada Hizbul Wathan (Muhammadiyah), Nationale Padvinderij (Boedi Oetomo), Sarekat Islam Afdeling Padvinderij (Sarekat Islam), Nationale Islamietische Padvinderij (Jong Islamieten Bond), dan lain-lain.

Merujuk pada Panduan Museum Sumpah Pemuda (2009), gerakan Kepanduan berskala nasional dimulai pada 1923 dengan berdirinya Nationale Padvinderij

Organisatie (NPO) di Bandung dan Jong Indonesische Padvinderij Organisatie (JIPO) di Batavia. Kemudian disatukan menjadi Indonesische Nationale Padvinderij Organisatie (INPO) pada 1926.

Sedangkan istilah Pramuka resmi digunakan pada 14 Agustus 1961. Idenya dari gagasan Presiden Sukarno. Dia ingin menyatukan seluruh gerakan Kepanduan di Indonesia. Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang kali pertama mencetuskannya.

Ada 10 nilai Pramuka yang kita kenal dengan Dasa Dharma Pramuka. Sarat makna. Mengandung nilai-nilai mulia. Baik untuk diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia;
3. Patriot yang sopan dan ksatria;
4. Patuh dan suka bermusyawarah;
5. Relia menolong dan tabah;
6. Rajin, terampil, dan gembira;
7. Hemat, cermat, dan bersahaja;
8. Disiplin, berani, dan setia;
9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya;
10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.

Pertanyaan besarnya, apakah Dasa Dharma sudah kita ejawantahkan?

Sudahkah kita bertakwa? Sementara kita saksikan bersama, fitnah dan propaganda negatif terus terjadi

pada agama. Pelecehan dan penistaan masih saja berlangsung.

Sudahkah kita menjadi patriot yang sopan dan ksatria? Sementara kita lihat bersama, semakin mudah kita mendengar dan membaca caci-maki di media sosial. Lisan dan tangan kita begitu ringannya mengeluarkan kata dan kalimat kasar.

Sudahkah kita bertanggung jawab dan dapat dipercaya? Sementara kita saksikan bersama, saat ini begitu banyak orang yang mudah mengobrol janji namun tak pernah ditepati. Pagi berkata A, siang menyatakan B, lalu malam hari bilang C. Sikap dan perilaku yang tidak bisa dipercaya.

Lakon semacam itu juga mengkonfirmasi bahwa kita masih tak suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Tak sesuai dengan Dasa Dharma ke-10.

Di Hari Pramuka ke-59 ini, sudah sepatutnya kita betul-betul introspeksi diri. Apalagi suasana kita sedang menghadapi pandemi. Dan tema besar Hari Pramuka tahun ini tentang Tangani Covid-19 dan Bela Negara.

Sudahkah Dasa Dharma Pramuka kita praktekkan? 🤝



Refleksi Kemerdekaan: Mengurai Akar Masalah, Menanam Benih Solusi

Hari ini, 75 tahun silam, suara kharismatik Soekarno seperti masih terdengar jelas. Membacakan sederet kalimat pernyataan kemerdekaan, didampingi Mohamad Hatta. Di sebuah rumah milik Faradj bin Said bin Awadh Martak, saudagar kaya raya asli Hadramaut, Yaman. Di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta Pusat.

USIA 75 tahun bukan rentang waktu yang singkat. Cukup panjang bagi sebuah bangsa dan negara. Selama

rentang itu, kita sudah memiliki tujuh presiden. Bisa tambah satu, yakni Syafruddin Prawiranegara. Sejarah mencatat, ia memimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dibentuk di Sumatera Barat pada 22 Desember 1948.

PDRI muncul sebagai pembuktian bahwa negara Indonesia masih tegak berdiri. Saat itu, pemerintahan RI yang berpusat di Yogyakarta tidak berfungsi karena para pemimpinnya, termasuk Presiden Sukarno dan Wapres Mohammad Hatta serta beberapa menteri dan pejabat tinggi lainnya, ditawan kemudian diasingkan ke luar Jawa oleh Belanda.

Lalu apa yang sudah kita hasilkan dalam perjalanan panjang ini?

Dalam kehidupan tentu saja kita akan selalu dihadapkan dengan berbagai permasalahan atau persoalan. Ini merupakan batu ujian bagi kita manusia. Terkadang persoalan tidak berdiri sendiri tetapi saling berkelit berkelindan dengan persoalan lainnya. Di sinilah memerlukan kearifan kita dan disiplin berpikir secara sistemik. Begitu pula dalam konteks Negara. Apalagi untuk ukuran Indonesia yang memiliki wilayah teramat luas dan penduduk sekitar 250 juta jiwa.

Di rentang waktu 75 tahun, secara jernih kita dapat melihat adanya persoalan fundamental bangsa yang masih jadi pekerjaan rumah kita hingga kini. Akar masalah tersebut seakan ngepung kita, baik yang bersifat individual maupun kolektif, yang harus

dihadapi, ditanggulangi dan dihilangkan.

Segala kompleksitas persoalan tersebut sudah pernah diingatkan Rasulullah SAW dalam untaian doanya.

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari rasa cemas dan putus asa, aku berlindung kepada-Mu dari sifat rendah diri dan malas, aku berlindung kepada-Mu dari jiwa pengecut dan kikir, aku berlindung kepada-Mu dari jerat hutang dan dominasi orang lain” (HR. Abu Dawud)

Pertama, masalah bersifat psikologis, yang biasanya menimpa pada remaja dan anak-anak muda yang sedang mencari identitas diri, yaitu cemas (*anxiety*) dan putus asa (*despair*). Masyarakat juga bisa mengalami kecemasan yang diawali dengan munculnya ketidakpuasan terhadap situasi dan kondisi yang ada serta kekhawatiran menyongsong masa depan yang serba tidak pasti.

Apalagi dampak wabah covid-19 berpengaruh bukan saja terhadap kondisi kesehatan masyarakat tetapi juga memunculkan masalah ekonomi, sosial, budaya bahkan keamanan. Krisis yang datang bertubi-tubi dan tekanan-tekanan yang datang silih berganti seringkali memburamkan pandangan dan mengubur harapan masa depan. Yang tersisa, hanyalah perasaan bersalah akan menyalahkan orang lain.

Kedua, Psikososial pada sebagian masyarakat. Biasanya melanda masyarakat yang kurang terdidik, yaitu rendah diri dan malas. Perasaan rendah diri biasanya

muncul pada saat berhadapan dengan orang lain. Bahkan bisa juga memunculkan sikap mengucilkan diri sendiri dari pergaulan dengan orang lain, karena merasa kalah bersaing.

Sementara itu kemalasan akan membuat seseorang tidak melakukan sesuatu yang seharusnya ia lakukan. Malas belajar menuntut ilmu pengetahuan, malas bekerja dan berusaha, malas menyelesaikan problematika dan sebagainya. Padahal seharusnya kita bekerja keras dan berjuang untuk lepas dari berbagai persoalan untuk menjalani hidup yang lebih baik atau bahkan yang terbaik.

Ketiga, masalah elit. Permasalahan bisa juga menghingapi kaum elite, mereka yang dalam kehidupan sudah lebih mapan, memiliki kedudukan dan kekayaan, yaitu pengecut dan kikir.

Orang yang pengecut tak akan mampu menepati jalan perjuangan, yang terkadang tuntutananya berupa nyawa. Tidak ada lagi semangat juang dan jiwa kepahlawanan. Setiap perjuangan pasti menuntut pengorbanan. Jika jiwa berkorban sudah hilang pada diri seseorang, jangan harap meraih kemenangan dan kebahagiaan. Tinggal menunggu kehancuran.

Keempat, Puncak dari permasalahan adalah masalah ekonomi politis yaitu, masuk dalam jerat hutang dan dominasi kekuatan asing.

Individu atau bangsa yang selalu cemas terhadap masa depan dan putus asa dalam menyongsong harapan,

serta malas berpikir dan bekerja, biasa cenderung mengambil jalan pintas. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau keberlangsungan pembangunan cenderung dilakukan dengan memperbanyak hutang. Jerat hutang (*debt trap*) inilah yang harus diwaspadai. Awalnya mungkin merasa nyaman karena tidak perlu bekerja keras, cukup mengandalkan kebaikan orang lain. Namun, lama kelamaan bisa jadi menimbulkan ketergantungan bahkan ketundukan pada keinginan si pemberi hutang.

Berbagai masalah tersebut tentu saja harus diurai dan dipecahkan bersama. Kita harus bersinergi menanam benih solusi. Di sinilah diperlukan edukasi. Edukasi akan memberikan kepada seseorang kekuatan rasa percaya diri untuk menghadapi tantangan dan permasalahan. Edukasi terhadap anak-anak muda dilakukan baik melalui pendidikan formal, pendidikan non formal maupun pendidikan informal. Sebaliknya, edukasi kepada masyarakat bisa dilakukan melalui tokoh agama, tokoh masyarakat maupun tokoh adat.

Hal yang lain yang perlu dilakukan adalah memberikan stimulus dan insentif kepada masyarakat yang akan memulai usaha atau sedang berusaha meningkatkan kualitas usahanya. Mereka ini biasanya masih berupa usaha mikro atau UMKM yang perlu perlindungan.

Membangun sebuah bangsa yang besar tidak terlepas dari peran seluruh elemen bangsa untuk memberikan kontribusi. Kemauan dan kemampuan untuk

memberikan yang terbaik harus selalu dijaga dan dipupuk. Inilah jiwa pengorbanan untuk bangsa dan negara.

Bangsa yang dibangun dari kehidupan masyarakat dengan semangat pengorbanan dan gotong royong akan mampu menjadi bangsa yang mandiri, tidak selalu mengandalkan bantuan bangsa lain. Bangsa seperti ini akan menjadi bangsa yang merdeka dalam mengekspresikan berbagai keunggulannya. Inilah hakikat bangsa dan negara yang tangguh. Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Semoga ini bisa kita wujudkan bersama-sama.

Agar pesan kemerdekaan Bung Karno bisa kita wujudkan:

“Tetapi kecuali daripada itu, maka peristiwa menjadi merdekanya sesuatu bangsa yang tadinya dijajah oleh imperialisme bangsa lain, merdeka, betul-betul merdeka dan bukan merdeka boneka.” 🌱

1. <https://infobekasi.co.id/2020/08/17/refleksi-kemerdekaan-mengurai-akar-masalah-menanam-benih-solusi/>
2. <https://radarbekasi.id/2020/08/17/refleksi-kemerdekaan-mengurai-akar-masalah-menanam-benih-solusi/>

”

Edukasi akan memberikan kepada seseorang kekuatan rasa percaya diri untuk menghadapi tantangan dan permasalahan.

“



Hari Konstitusi: Momentum Penegasan Arah Perjalanan Bangsa dan Negara

Sehari usai HUT Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia, ada hari bersejarah yang tak kalah pentingnya. Yakni, Hari Konstitusi 18 Agustus.

Bisa jadi, banyak di antara kita yang tak mengetahui hal ini. Padahal, posisinya sangat strategis bagi sebuah bangsa dan negara.

TANGGAL 18 Agustus memang selalu diperingati sebagai Hari Konstitusi, mengingat pada sidang tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan (PPKI) telah menetapkan dua hal. Pertama, mengangkat Bung

Karno dan Bung Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, mengesahkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai konstitusi negara.

Hari Konstitusi sendiri kali pertama dideklarasikan pada 18 Agustus 2008. Payung hukumnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Hari Konstitusi.

Konsideran menimbang huruf (a) Keppres tersebut menyebutkan pada 18 Agustus 1945 PPKI telah menetapkan UUD Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hari Konstitusi digagas oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2004-2009. Sebagaimana dikutip dari berbagai sumber, kala itu yang menandatangani deklarasi perancangan 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi ialah Ketua MPR Hidayat Nur Wahid bersama Ketua DPD Ginandjar Kartasmita di Gedung MPR/DPR/DPD Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.

Saat itu Hidayat yang didampingi dua wakil ketua MPR, AM Fatwa dan Aksa Mahmud, sedangkan Ginandjar didampingi wakil ketua DPD Irman Gusman.

Dikatakan Hidayat, dirinya mengaku telah membicarakan secara informal perancangan Hari Konstitusi tersebut dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta ketua DPR Agung Laksono.

Dinamika Konstitusi

Dalam perjalanannya, bangsa dan negara kita telah mengalami empat konstitusi. Yakni UUD 1945, Konstitusi RIS, UUD Sementara, dan UUD 1945 yang diamandemen. Namun ada satu hal istimewa yang tidak pernah berubah dari berbagai macam bentuk konstitusi yang pernah bangsa ini alami, yaitu Pembukaannya atau mukadimahnyanya. Konstitusi boleh berubah sesuai dinamika politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Tapi pembukaan 'haram' diganggu gugat. Sebab didalamnya terkandung falsafah dan arah tujuan perjalanan bangsa serta ideologi negara.

Konstitusi dalam bentangan sejarah telah menjadi dokumen nasional yang berfungsi untuk menegaskan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Piagam Kelahiran bangsa Indonesia, cita-cita Indonesia merdeka, tujuan pembentukan pemerintah NKRI, dan Dasar Negara Pancasila.

Konstitusi, juga merupakan suatu dokumen hukum yang khas. Sebab, bukan hanya sebagai jenis norma khusus yang berdiri di puncak piramida normatif, akan tetapi di dalamnya termaktub komitmen dan orientasi bangsa Indonesia. Konstitusi juga dirancang untuk mengarahkan perilaku bangsa Indonesia dalam mengarungi kehidupan di masa yang akan datang.

Dan makna konstitusi bagi bangsa merupakan norma sistem politik dan hukum dalam pemerintahan yang biasanya berbentuk dokumen tertulis. Dalam

suatu negara, konstitusi pastinya berisi aturan dan prinsip-prinsip entitas politik hukum.

Sehingga konstitusi ini dibentuk dengan bertujuan membatasi kekuasaan pengusaha agar tidak bertindak sewenang-wenang. Maka dengan adanya konstitusi tertulis, mereka ini harus tunduk dan patuh kepada aturan serta prinsip-prinsip dalam konstitusi yang berlaku.

Arah Perjalanan Bangsa dan Negara

Muncul pertanyaan besar, di saat usia bangsa dan negara kita sudah 75 tahun, apakah arah perjalanan kita sudah sesuai konstitusi?

Tentu saja akan lahir banyak perdebatan soal ini. Tergantung pada posisi mana kita berada. Namun, jika mau objektif menilai, dengan berkaca pada situasi politik, ekonomi dan sosial hari ini, maka kita harus mengakui masih adanya hal yang bertentangan dengan konstitusi.

1. Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2020. Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Per-ekonomian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Kandungan UU tersebut kontroversial dan tidak sesuai konstitusi kita. *Pertama*, Pasal 12 ayat 2 menyatakan bahwa Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara hanya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Hal ini telah menghilangkan kewenangan serta peran DPR dan membuat APBN tidak diatur dalam Undang-Undang atau yang setara. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 23 ayat 1 telah menyatakan bahwa kedudukan dan status APBN adalah UU yang ditetapkan setiap tahun.

Kedua, Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ini bertentangan dengan prinsip supremasi hukum dan prinsip negara hukum yang berkeadilan. Padahal, perubahan pertama UUD tahun 1999 sampai perubahan keempat tahun 2002, menjamin tegaknya prinsip-prinsip supremasi hukum.

Ketiga, Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang per-

pajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

Ini tidak sesuai dengan prinsip dasar keuangan negara dan meniadakan adanya peran BPK untuk menilai dan mengawasi.

2. RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker).

Kata pembuat Omnibus Law, RUU ini dimaksudkan untuk memangkas birokrasi. Sehingga investasi bisa deras masuk ke Indonesia dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Isinya beraneka rupa. Tak cuma soal tenaga kerja. Dari dihapuskannya Amdal, sertifikasi halal yang bisa dilakukan oleh ormas Islam, pers, hingga presiden yang bisa mengganti UU dengan Peraturan Presiden (PP). Walau katanya ini cuma salah ketik.

Yang paling menghangat soal aturan ketenagakerjaan. Sangat merugikan buruh. Misalnya dimudahkannya PHK, dihapuskannya cuti-cuti penting seperti cuti haid dan melahirkan, jumlah pesangon yang diturunkan, diperluasnya pekerjaan yang menggunakan sistem kontrak dan alih daya yang bikin mereka rentan diputus kontrak begitu saja, sampai tidak leluasa untuk berserikat karena merasa harus terus menerus bekerja

agar mencapai target yang ditentukan oleh perusahaan.

Jika dicermati, kandungan RUU ini banyak yang tak sesuai dengan amanat konstitusi kita. Karena itu tak heran jika banyak pihak yang menolaknya.

3. RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP)

PKS sendiri sejak awal sudah sangat jelas. Menolak RUU HIP ini dengan alasan yang bersifat filosofis, ideologis, sejarah dan konsepsional serta urgensitas.

Sedikitnya ada dua hal penting yang mengindikasikan RUU ini bertentangan dengan konstitusi kita.

Pertama, TAP MPRS No. XXV/1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Komunisme, Marxisme dan Lenisme tidak dimasukkan dalam pertimbangan.

Kedua, penguraian Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila tidak perlu diungkapkan kembali karena sudah tuntas dibahas oleh para *Founding Father* kita.

Kita berharap, Hari Konstitusi bisa jadi momentum evaluasi. Sekaligus menegaskan arah perjalanan bangsa dan negara. Agar sesuai dengan rel konstitusi yang telah disepakati bersama.

Semoga. 🌟

Kemerdekaan ke-75 RI, Tahun Baru Islam dan Semangat Memberi

Tiada yang kebetulan di dunia ini. Semua sudah diatur oleh kuasa Allah SWT dan ada hikmah dibaliknya. Termasuk berdekatnya Hari Kemerdekaan ke-75 RI, Tahun Baru Islam dan wabah Covid-19 yang masih berlangsung.

APA relasi atau kelindan semua peristiwa di atas? Benang merahnya adalah tentang semangat memberi. Mari kita cermati bersama.

Hari Kemerdekaan 17 Agustus yang baru saja kita peringati, tidak lain karena dahsyatnya semangat gelombang memberi. Mengorbankan apa yang dimiliki. Tak hanya harta, tapi juga jiwa dan raga. Kemerdekaan bukan hasil dari meminta-minta, melainkan buah perjuangan.

Sudah hampir enam bulan kita hidup bersama pandemi Covid-19. Banyak saudara kita yang telah wafat. Kehidupan pun berubah drastis. Bukan cuma di bidang ekonomi dan kesehatan, tapi juga sosial. Wabah ini membuat relasi sosial di masyarakat mengendur. Balon kohesivitas mengempis. Tercermin dari adanya konflik horizontal di tengah masyarakat.

Seharusnya ini tak boleh terjadi. Empati, kepedulian

dan semangat memberi justru harus kian menguat di masa-masa seperti ini. Mereka yang positif harus ditolong dan diberikan dukungan. Bukan diasingkan. Sebab positif Corona bukan aib.

Jika saja kita bercermin pada Para Pahlawan saat berjuang, sudah sepatutnya sikap dan perilaku memberi itu lahir. Saling bahu-membahu membantu kesulitan orang lain.

Itu juga sejatinya yang diajarkan dalam peristiwa Tahun Baru Islam 1 Muharram. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “Sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung pada niatnya, dan masing-masing orang hanya memperoleh apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, berarti hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa hijrahnya untuk perkara dunia, ia akan memperolehnya, atau kepada wanita, ia menikahinya, hijrah seseorang hanya kepada apa yang diniatkannya”.

Konsep Hijrah di era kini mungkin memiliki makna yang berbeda. Hijrah bukan secara dzohiriyah, melainkan hijrah bathiniyah atau sikap. Hijrah hari ini adalah beralih dari ketidakpedulian menjadi peduli. Hijrah dari cuek menjadi perhatian. Hijrah dari meminta menjadi memberi.

Salah satu surat yang biasa dibaca Rasulullah SAW, pada rakaat kedua sholat shubuh di hari Jumat adalah surat Al-Insan.

Pada ayat yang ke-9 Allah SWT berfirman :

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا

“Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak mengharap balasan dari kamu dan terima kasih dari kamu”

Ayat ini menjadi satu rangkaian dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya yang menceritakan tentang sifat orang-orang yang berbuat kebajikan (76/5) di dalam surga. Salah satu rahasia penduduk surga ini adalah memberi tanpa berharap balasan. Mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim dan orang-orang yang ditawan.

Manusia adalah makhluk sosial. Ia akan berinteraksi dalam kehidupan bersama manusia lainnya. Dalam interaksi tentu saja ada *take* (menerima) dan memberi (*give*). Sifat orang-orang yang senang kebajikan cenderung untuk memberi, tidak berharap sedikitpun untuk menerima.

Bahkan dalam memberi pun, orang-orang yang berbuat kebajikan tidak mengharapkan adanya balasan dari orang yang diberinya. Mereka menyadari bahwa tidak akan merasakan kenikmatan berinteraksi dengan orang lain, jika selalu berharap balasan dan terima kasih dari orang-orang yang diberinya.

Bisa berbagi kepada orang lain adalah suatu kenikmatan dan kebahagiaan, lahir batin. Tetapi kenikmatan dan kebahagiaan ini akan lenyap manakala dibarengi dengan berharap balasan dari manusia, apalagi jika harapan itu tidak terpenuhi. Kekecewaanlah yang akan ia dapatkan.s

Puncak dari kebahagiaan adalah memberi apa yang ia cintai, sebagaimana firman Allah SWT :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali Imran : 92)

Jangan pernah membandingkan antara hak dan kewajiban pada saat memberi. Pantas Presiden Amerika Kennedy pernah mengatakan: “Berikanlah apa yang bisa kau berikan untuk negaramu. Jangan pernah berpikir apa yang negara berikan untukmu.”

Begitulah hikmah dibalik berdekatannya Hari Kemerdekaan ke-75 RI, Tahun Baru Islam dan wabah Covid-19 yang masih terjadi.

Semoga Allah beri kekuatan dan rezeki kepada kita untuk bisa memberi yang terbaik untuk negeri kita tercinta, Indonesia. Aamiin. 🍀



Menjadi Tejo

Tak perlu mengutuk kegelapan. Yang perlu kita lakukan adalah menyalakan lilin agar ada cahaya menerangi.

PERNAHKAH mendengar atau membaca petuah bijak ini? Tiba-tiba saya teringat kalimat sarat makna ini, ketika merenungi perjalanan bangsa dan viralnya film pendek 'Tilik' dengan tokoh antagonis bernama Bu Tejo.

Jika kita mau jujur, di usianya yang ke-75 tahun, negeri kita masih belum sepenuhnya keluar dari terowongan panjang nan gelap. Kemerdekaan memang sudah kita dapatkan. Tapi dalam perjalanan mengisinya, kerap kali kita kembali masuk dalam lorong gulita. Terlebih di masa pandemi Covid-19 ini.

Saat ini, kita sedang mengalami krisis kesehatan. Virus Corona telah sukses menyerang ratusan ribu orang di Indonesia. Ribuan meninggal dunia. Di dunia, jumlah yang positif Corona berjumlah puluhan juta.

Boleh dikatakan, kita sedang berada dalam lorong gelap di dunia kesehatan. Pandemi ini belum bisa diprediksi kapan akan berakhir. Sementara vaksinnnya masih belum juga ditemukan. Masih dalam taraf ujicoba.

Krisis kesehatan merembet pada krisis ekonomi. Dunia usaha terkena imbasnya. Banyak karyawan di-PHK. Pengangguran melimpah. Perusahaan berderet bangkrut. Lowongan pekerjaan sulit didapat. Pertumbuhan ekonomi kita minus 5,32 persen. Resesi ekonomi di depan pintu. Kita berada dalam terowongan gelap bernama krisis ekonomi.

Lalu muncul lagi krisis sosial. Di masyarakat, kerap kita dengar kabar miris dalam menyikapi orang yang terkena corona. Dikucilkan, ditolak jenzahnya hingga diminta untuk pergi dari lingkungan sampai sembuh. Kita sedang berjalan dalam terowongan gulita krisis sosial.

Di tengah situasi kita yang masih berada dalam terowongan panjang nan gelap, apa yang harus kita lakukan?

Krisis kesehatan, ekonomi dan sosial ini harus disikapi dengan beragam hal positif. Empati, bergandengan tangan, meningkatkan kepedulian adalah sedikit contoh lakon yang harus kita kerjakan.

Jika ada tetangga kita yang terpapar Corona, bantu dan dukung. Jangan dikucilkan. Rangkul mereka dengan memberikan bantuan logistik dan mental selama masa isolasi.

Jika ada saudara atau tetangga kita yang di-PHK, ulurkan tangan kita. Berikan dukungan sebisa kita. Dengan berbagi makanan, atau dalam bentuk lain.

Jika ada saudara kita yang berjualan untuk bertahan hidup, beli dagangan mereka. Tak perlu menawar. Apalagi minta diskon. Dengan membeli dagangannya, kita telah memberikan bantuan yang mereka butuhkan.

Sikap dan perilaku positif di atas adalah tejo. Dalam Bahasa Jawa, tejo artinya cahaya. Ya, cahaya yang sedikit banyaknya membantu menerangi terowongan gelap yang saat ini sedang kita jalani.

Jadilah tejo bagi orang-orang terdekat kita. Bagi lingkungan sekitar kita. Bagi bangsa dan negara tercinta. Nyalakan lilin. Agar ada cahaya yang menerangi. 🕯️

”

Jika ada saudara kita yang berjualan untuk bertahan hidup, beli dagangan mereka. Tak perlu menawar. Apalagi minta diskon.

“

Menyerap Aspirasi

Salah satu tugas konstitusional seorang wakil rakyat adalah menyerap aspirasi. Mendengar dan mencatat saran, usulan hingga keluhan masyarakat.

TAK sampai disitu. Semua aspirasi tersebut harus diperjuangkan seoptimal mungkin di parlemen. Sehingga rakyat betul-betul merasakan manfaat adanya anggota legislatif.

Dalam teori politik, ini yang dinamakan fungsi artikulasi dan agregasi. Artikulasi itu mendengar, menyerap dan menotulensi serta menyuarakan semua aspirasi konstituen. Kemudian mengagregasikannya kepada pihak-pihak terkait.

Saat menerima aspirasi, bisa dilakukan kapan dan dimana saja. Waktunya hampir tak terbatas. Untuk tempat pun demikian. Bisa di Gedung Parlemen, di bawah pohon hingga duduk lesehan di toko.

Semoga Para Wakil Rakyat bisa terus dekat dengan rakyatnya. Menyerap dan memperjuangkan aspirasi hingga tuntas.

Aamiin. 🍀

Kebahagiaan Anggota DPR Saat Aspirasinya Didengar...

**Apa kebahagiaan seorang Anggota DPR?
Bagi saya, ketika aspirasi yang disuarakannya
didengar oleh Pembuat Kebijakan.**

KAMIS, 3 September lalu, secara khusus saya membuat rilis ke berbagai media. Isinya memprotes rencana pemerintah menaikkan Tarif Tol Cipularang-Padaleunyi.

Secara tegas saya sampaikan bahwa rencana kenaikan tersebut sangat tidak tepat waktu. Mengapa? Sebab kondisi saat ini terasa begitu berat bagi masyarakat dari sisi ekonomi.

Pandemi Corona yang semula hanya krisis kesehatan, tapi berubah menjadi masalah ekonomi. Banyak orang di-PHK. Banyak juga perusahaan bangkrut. Daya beli menurun. Ekonomi kita bahkan minus 5,32 persen. Resesi di ambang pintu.

Rakyat dalam kondisi susah. Bahkan teramat susah. Lalu tiba-tiba Kementerian PUPR berencana menaikkan tarif Tol Cipularang-Padaleunyi. Sungguh tidak berempati sama sekali.

Ironisnya, rencana kenaikan tersebut justru berpotensi memukul sektor UMKM. Begini penjelasannya.

Rencananya pemerintah akan menaikkan kedua ruas jalan tol di atas mulai 5 September 2020 pukul 00.00 WIB. Hal ini diketahui melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 1128/

KPTS/M/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol Cikampek - Purwakarta - Padalarang dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 1116/KPTS/M/2020 tanggal 26 juni 2020 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol Padalarang - Cileunyi.

Sama seperti kenaikan tol Balmera pada bulan Agustus lalu, tarif tol pada ruas ini juga mengalami penyederhanaan menjadi 3 golongan saja. Karena penyederhanaan ini, maka konsekuensinya sangat berat bagi sektor UMKM yang kebanyakan menggunakan truk-truk kecil.

Pada ruas tol Cipularang, kenaikan tarif tol untuk kendaraan Golongan I sebesar 20,16% dari Rp 59.500,- menjadi Rp 71.500,- dan Golongan IV naik sebesar 4,02% dari Rp 99.500,- menjadi Rp 103.500,-.

Sedangkan untuk kendaraan Golongan V yang merupakan truk-truk besar milik korporasi, justru mengalami penurunan sebesar 13,02% dari Rp 119.000,- menjadi Rp 103.500,-.

Melihat aturan pemerintah, jelas ada ketidakadilan juga. Kenaikan tarif tol memukul rakyat kecil yang ada di sektor UMKM.

Karena itu, ketika kabar adanya penundaan kenaikan tarif tol dimaksud, saya merasa bahagia. Secara khusus saya memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR yang telah menunda ini.

Insy Allah, dengan dukungan dan doa masyarakat, saya akan terus 'berteriak' sekeras mungkin menyuarakan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Sebab itulah tugas utama saya sebagai Wakil Rakyat. 🙏



Peran BSBI dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia

Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen, harus diawasi dengan benar dalam rangka untuk memeriksa kredibilitasnya berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

DENGAN dikeluarkannya Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang dikuatkan dengan UU nomor 2 Tahun 2020, pada pasal 16 hingga pasal 19 Perpu nomor 1 tahun 2020, Bank Indonesia diberi kewenangan untuk memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek atau

pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah kepada Bank Sistemik atau bank selain Bank Sistemik;

- a. memberikan Pinjaman Likuiditas Khusus kepada Bank Sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dan tidak memenuhi persyaratan pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah yang dijamin oleh Pemerintah dan diberikan berdasarkan Keputusan KSSK;
- b. membeli Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara berjangka panjang di pasar perdana untuk penanganan permasalahan sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, termasuk Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19);
- c. membeli/repo surat berharga negara yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan untuk biaya penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik dan bank selain Bank Sistemik;
- d. mengatur kewajiban penerimaan dan penggunaan devisa bagi penduduk termasuk ketentuan mengenai penyerahan, repatriasi, dan konversi devisa dalam rangka menjaga kestabilan makroekonomi dan sistem keuangan; dan
- e. memberikan akses pendanaan kepada korporasi/

swasta dengan cara repo Surat Utang Negara atau Surat Berharga Syariah Negara yang dimiliki korporasi/ swasta melalui perbankan.

Sejalan dengan itu, Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) yang dibentuk berdasarkan pasal 58A UU No. 3 Tahun 2004 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia juga seharusnya memegang peranan yang sangat penting.

Hal itu disebabkan karena BSBI dimaksudkan untuk membantu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia (BI). Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia.

Peran strategis BSBI menjadi lebih penting karena pasal 27 ayat (2) Perpu nomor 1 tahun 2020 yang menyatakan bahwa Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BSBI harus terus melakukan pengawasan sehingga diperoleh keyakinan bahwa pelaksanaan tugas BI telah betul-betul dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ruang Lingkup

BSBI melaksanakan telaahan atas:

Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI):

1. Laporan Keuangan Tahunan BI yang telah di audit oleh BPK dan telah disampaikan kepada Komisi DPR-RI yang membidangi BI (Komisi XI), meliputi: neraca dan laporan surplus /defisit beserta lampirannya.
 - a. Laporan neraca singkat Mingguan BI.
 - b. Laporan Keuangan Interim BI, Laporan surplus Defisit bulanan pada posisi bulan/tahun berjalan beserta dokumen pendukungnya.
2. Anggaran Operasional Bank Indonesia:
 - a. Rencana Anggaran Operasional Tahunan BI (RATBI) yang telah disampaikan BI kepada Komisi XI DPR-RI, dan selanjutnya Komisi XI DPR-RI meminta BSBI untuk menelaahnya.
 - b. Anggaran Kegiatan Operasional Tahunan yang telah mendapatkan persetujuan Komisi XI DPR-RI, dan Laporan Pelaksanaan Anggaran Operasional BI yang disampaikan kepada Komisi XI DPR-RI secara Triwulanan.

3. Investasi Bank Indonesia:
Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Investasi BI dalam Aktiva Tetap (gedung, tanah, kendaraan, dsb) dan Aktiva Tidak Berwujud (Teknologi Informasi) untuk mendukung kegiatan operasional, dan telah dilaporkan kepada Komisi XI DPR-RI secara Triwulanan.
4. Prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional di luar kebijakan moneter dan pengelolaan aset BI (*Good Governance*):
 - a. Prosedur yang terkait dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam ketentuan Peraturan Dewan Gubernur (PDG) dan Surat Edaran (SE) terkait Manajemen Intern Bank Indonesia.
 - b. Penerapan *Good Governance* atas prosedur pengambilan keputusan dalam rangka pengadaan barang dan jasa (aktiva tetap dan aktiva tidak berwujud) BI.
5. BSBI melakukan telaahan lainnya yang ditugaskan oleh Komisi XI DPR-RI

Peran dalam Pemulihan Ekonomi

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh BSBI.

1. Meningkatkan soliditas dengan tim kerja. Seperti masing-masing anggota yang terdiri dari lima orang itu tentunya telah mengetahui peran dan tugas masing-masing. Diperlukan target dan mengoptimalkan *good governance* serta mencari berbagai terobosan.

Dengan soliditas yang kuat, maka tim akan kompak dan sinergis. Sehingga tugas dan kewenangan yang serba terbatas dapat dioptimalkan.

2. Berkomunikasi secara intensif dengan pihak terkait, utamanya DPR dan BI. Ini menjadi kunci penting agar saran, masukan dan usulan dari BSBI bisa diakomodir dan sebagai bahan pertimbangan untuk agenda pemulihan ekonomi.

Semoga BSBI terus bisa memberikan kiprah terbaiknya dalam mengawal pemulihan ekonomi nasional. Amin... 🙏

”

BSBI harus terus melakukan pengawasan sehingga diperoleh keyakinan bahwa pelaksanaan tugas BI telah betul-betul dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“



RDP dengan 3 Menteri: Dari Geopark Ciletuh hingga Banjir di Karawang

Di DPR, ada agenda reguler yakni Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja di pemerintahan. Di Komisi V tempat saya bernaung, ada tiga kementerian dan tiga badan yang menjadi mitra kerja.

YAKNI Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDT). Sementara lembaganya yakni Badan SAR Nasional (Basarnas) dan Badan Klimatologi, Metereologi dan

Geofisika (BMKG) dan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).

Rabu, (2/8) kemarin, saya mengikuti RDP dengan tiga kementerian di atas. Hadir para menteri dengan jajarannya. Dalam kesempatan itu, banyak hal yang saya tanyakan. Juga menyampaikan aspirasi dari masyarakat yang saya dapat saat reses.

Pertama, saya bertanya soal Geopark Ciletuh, Sukabumi yang sudah diakui oleh UNESCO dan menjadi ikon wisata. Keindahan alamnya lengkap meliputi GURILAP (Gunung, lembah, rimba, laut dan pantai). Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri sudah melakukan upaya untuk mengangkat ikon ini. Caranya dengan mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur menuju lokasi Ciletuh sekitar Rp 600 M, namun masih belum mencukupi.

Saya mengusulkan, perlu kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR, antara lain melanjutkan pembangunan Tol BOCIMI dan infrastruktur jalan menuju Ciletuh.

Kedua, saya juga mengusulkan pengembangan Bandara Kertajati, Majalengka. Kementerian terkait harus mendukungnya dengan membangun infrastruktur penunjang menuju bandara, seperti penyelesaian Tol Cisumdawu dan optimalisasi pemanfaatan bandara.

Ketiga, Saya mengapresiasi adanya kegiatan pengamanan pesisir pantura. Tapi saya meminta disertakan kegiatan untuk mengatasi pengikisan pantai di daerah

Cemarajaya Karawang. Daerah ini seringkali terkena dampak air rob.

Saya sampaikan juga, Pemerintah Kabupaten Karawang sudah menyiapkan lahan untuk relokasi rumah warga terdampak. Namun dari 300 unit kebutuhan relokasi, baru 100 unit yang teranggarkan. Mohon kiranya Kementerian PUPR bisa mengalokasikan untuk 200 rumah lainnya. Baik melalui BSPS maupun berupa rusunami/rusunawa.

Keempat, masih di Karawang, saya juga informasikan tentang Karangligar. Jika turun hujan beberapa saat saja, daerah ini banjir dan bisa berbulan-bulan lamanya. Saya minta kepada Pak Menteri untuk membuat bendungan di hulu Sungai Cibeet.

Kelima, Saya pun bertanya tentang rencana pembuatan *Food Estate*. Mohon dipertimbangkan daerah-daerah yang selama ini sudah menjadi lumbung padi nasional, seperti Karawang dan Bekasi.

Saya sampaikan juga persoalan di lapangan yang perlu mendapatkan perhatian dari Pak Menteri PUPR. Terkait perbaikan infrastruktur pertanian seperti irigas dan jalan penghubung desa.

Disamping itu, mohon *political will* dari Dirjen PSDA terkait ketersediaan pasokan air untuk pertanian. Dalam reses kemarin, saya mendapat keluhan dari para petani di Majalaya Karawang. Mereka begitu sulit mendapatkan air. Hingga mereka patah arang dan menawarkan kepada pemerintah, jika tidak bisa

menyiapkan air untuk pertanian, beli saja lahan-lahan mereka untuk lahan perumahan. Ini tentu sangat miris terkait dengan semangat untuk membuat Food estate.

Keenam, terkait sekolah vokasi di Kemenhub maupun di PUPR. Selain ASN, mohon juga kesempatan untuk anak-anak muda yang memang memiliki kemampuan dan minat. Di samping itu, melibatkan SDM dari berbagai daerah, sebagaimana PELATIHAN MASYARAKAT yang dilakukan oleh Kemendes PDTT.

Terakhir, untuk Kemendes PDTT. Mohon BUMDES dioptimalisasikan sehingga perlu ada tambahan alokasi anggaran untuk BUMDES.

Alhamdulillah Rabbil 'alamin Pak Menteri PUPR sangat responsif, dia langsung mengambil buku khusus dan *ballpoint*-nya seraya mengatakan kepada saya “Pak Syaikh, saya sudah tulis di Buku Khusus saya untuk bahan rapat dengan para Dirjen”.

Kita kawal terus aspirasi ini dan doakan semoga Allah berikan kemudahan. Aamiin. 🙏

”

Pak Syaikh, saya sudah tulis di Buku Khusus saya untuk bahan rapat dengan para Dirjen.

“

PSBB, *Good Looking* dan Silang Pendapat yang Tak Elok

Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menuai kontroversi. Pro kontra menguak. Publik pun disajikan silang pendapat tak elok.

SEPERTI diketahui, Anies menarik 'rem darurat'. Kebijakan ini akan diterapkan pada Senin, 14 September 2020. Dasar pertimbangannya karena kasus positif di Jakarta yang terus meningkat. Bahkan dalam beberapa hari terakhir setiap hari ada 3000 an kasus.

Di Indonesia sendiri, berdasarkan data dari Satgas Covid-19 Pusat sudah 214.746 jiwa yang positif. Sedangkan yang meninggal 8.650 orang. Pertambahan per hari untuk yang terpapar antara 2000 dan 3000 an orang.

Langkah penerapan PSBB total mendapat respons dari beberapa menteri. Di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia tak sependapat dengan kebijakan tersebut karena hanya akan membuat ekonomi kembali terpuruk. Padahal, belakangan roda perekonomian sudah mulai bergulir. Perdebatan soal mana yang lebih dulu antara kesehatan dan ekonomi pun merebak.

Saya prihatin dengan kondisi ini. Saat pandemi belum berakhir dan justru seakan tak tertangani dengan

tepat, para pemimpin bangsa ini justru bersilang pendapat. Ironisnya, isinya soal hal yang seharusnya tak perlu diperselisihkan.

Ingatkah kita dengan pesan Presiden Jokowi pekan lalu? Beliau meminta kita untuk mengedepankan kesehatan dibandingkan penyelamatan ekonomi.

Ingatkah kita dengan ratusan tenaga kesehatan dari dokter hingga perawat yang wafat?

Ingatkah kita dengan ribuan nyawa rakyat yang telah jadi korban pandemi?

Yang memprihatinkan lagi, kita seolah cuek dengan fakta. Bahwa ada 59 negara yang menolak datangnya WNI ke negara mereka. Negara-negara tersebut khawatir WNI membawa masuk virus Corona. Sehingga mereka menutup pintu rapat-rapat bagi WNI.

Di mata negara-negara tersebut, wajah Indonesia sedang tidak *good looking*. Tidak enak dipandang mata. Menakutkan dan menyeramkan.

Anehnya, kita malah asyik masyuk berdebat. Kesehatan dulu atau ekonomi dulu? Aneh bukan?

Ekonomi tak akan pernah pulih jika pandemi masih terus terjadi. Nyawa rakyat tak bisa dikembalikan. Namun ekonomi dapat kita pulihkan.

Karena itu, sekali lagi saya tegaskan, tak pada tempatnya kita silang pendapat soal ini. Sungguh tak elok dipandang mata. Sebab nyawa rakyat terus terancam oleh serangan virus.

Hentikan perdebatan... 🍷



IDN TIMES

Syaikh Ali Jaber dan Mendesaknya Undang-Undang Perlindungan Tokoh Agama

Apa hikmah dibalik tragedi penusukan Syaikh Ali Jaber d Lampung, Ahad (13/9) sore? Banyak. Satu di antaranya terkait Undang-Undang (UU) Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol-Symbol Agama. Keberadaan UU ini sudah sangat mendesak.

RANCANGAN UU ini sudah diwacanakan PKS je-
lang pemilu 2019. Bahkan jadi salah satu janji kampa-
nye. Saat itu,skasus serupa Syaikh Ali Jaber juga sering

terjadi. Apa alasan mendasar dari perlunya RUU ini?

Pertama, ulama dan tokoh agama adalah figur yang berjasa besar dalam memerdekakan bangsa Indonesia dan ikut serta dalam merumuskan dasar-dasar kehidupan bangsa dan negara. Kita bisa menyebut beberapa nama. Ada Pendiri NU Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari, Pendiri Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan, tokoh pahlawan nasional Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, serta tokoh nasional seperti KH. Wahid Hasyim, Mohamad Natsir, Ki Bagus Hadikusumo, H. Agus Salim, dan Kasman Singodimejo.

Kedua, ulama dan tokoh agama berhak dilindungi kebebasannya dalam menyampaikan ajaran dan keyakinannya kepada umatnya. Ini sesuai dengan

Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Sebab itu, hukum harus ditegakkan dan tidak boleh ada perlakuan yang merugikan dan mengancam hak kebebasan orang lain.

Ketiga, ulama dan tokoh agama adalah figur yang paling rentan mendapatkan ancaman baik fisik, non fisik, maupun kriminalisasi akibat dakwah yang mereka sampaikan.

Keempat, karena simbol agama adalah sesuatu yang sangat dihormati dan dimuliakan dalam ajaran masing-masing agama. Dengan adanya UU ini, kita akan mengokohkan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi dalam hal beragama. Semua umat beragama

diwajibkan saling menghormati terhadap keyakinan, tokoh agama, dan simbol agama.

Alhamdulillah, RUU ini berhasil masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Selain PKS, PKB dan PPP juga mendukung RUU ini.

Kita ingin tragedi penusukan kepada Syaikh Ali Jaber ini jadi momentum bagi semua pihak, khususnya wakil rakyat di DPR untuk segera membahas dan menge-sahkan RUU dimaksud. Ini sudah sangat mendesak. Kita ingin apa yang dialami Syaikh Ali Jaber adalah yang terakhir. Tidak ada lagi kasus semacam ke depannya.

Perlu diingat, RUU ini tidak hanya untuk agama Islam. Tapi juga semua agama, tanpa kecuali. Sebab semua tokoh agama dari agama apapun wajib dilin-dungi dan dihormati.

Semoga Allah selalu menjaga ulama dan tokoh agama kita. Aamiin. 🍀

”

Perlu diingat, RUU ini tidak hanya untuk agama Islam. Tapi juga semua agama, tanpa kecuali.

“



Hari Tani Nasional: Memaknai Sejarah dan Ikhtiar Mensejahterakan Petani

Hari ini kita peringati sebagai Hari Tani Nasional. Jika menilik sejarah lahirnya, maka terekam jelas maksud dan tujuan dibaliknyanya. Yakni mimpi untuk memerdekakan dan mensejahterakan petani.

HARI Tani Nasional berawal dari keinginan mengubah Undang-undang Agraria kita yang masih warisan kolonial Belanda. Produk hukum tersebut dianggap mengebiri hak petani dan menguntungkan penguasa.

Karena itu harus diubah agar menguntungkan petani.

Proses perubahan ini tak berjalan mudah. Dinamika politik yang terjadi pada kurun 1949-1959 membuat pembahasan tersebut tersendat-sendat. Hingga pada akhirnya pada 24 September 1960, Rancangan Undang-Undang Agraria disetujui DPR sebagai UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, atau dikenal dengan Undang-Undang Pembaruan Agraria (UUPA). UU Pokok Agraria menjadi titik awal dari kelahiran hukum pertanahan yang baru mengganti produk hukum agraria kolonial.

Jika dicermati, UUPA mengurus dan membagi tanah dan sumber daya alam lainnya yang terkandung di dalamnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Dasar politik hukum agraria nasional dinyatakan dalam teks asli UUD 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) yang menyebutkan: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Kontribusi pertanian sangat signifikan dibanding sektor-sektor lainnya. Kita bisa lihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Selama periode Januari-Mei 2020, nilai ekspor Indonesia mencapai 64,46 miliar dolar AS atau turun 5,96 persen dibandingkan periode yang sama pada 2019 yang mencapai 68,54 persen. Sedangkan ekspor nonmigas mencapai 60,97 miliar dolar AS atau menurun 3,50 persen. Ekspor nonmigas

ini menyumbang 94,58 persen dari total ekspor Januari-Mei 2020.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto mengungkapkan, penurunan ekspor ini terjadi hampir di seluruh sektor kecuali pertanian. Untuk sektor migas turun cukup dalam hingga 34,93 persen, industri pengolahan turun 0,08 persen, sedangkan sektor tambang dan lainnya turun 21,02 persen.

Pada Agustus kemarin, BPS kembali merilis data. Nilai ekspor pertanian pada Juli 2020 mencapai USD 350 juta atau meningkat 24,1 persen dari capaian Juni 2020 yaitu USD 280 juta.

Data dan fakta ini menjadi bukti bahwa sektor pertanian paling tangguh dalam menghadapi pandemi Covid-19. Di saat yang lain terpuruk, pertanian justru mampu bertahan bahkan naik.

Berkaca dari ini, sudah sepatutnya kita betul-betul memahami makna dari Hari Tani Nasional. Kesejahteraan petani harus diperhatikan. Jangan membuat mereka sedih dengan banjirnya impor hasil tani.

Petani Sejahtera
Bangsa dan Negara Berdaulat 🌾



Dampak Pandemi Covid-19 dan Data Desa Presisi

Ada tulisan menarik dari Muhammad Chatib Basri. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu menulis tentang situasi ekonomi akibat pandemi Covid-19. Judulnya: Pemulihan Ekonomi: V, U atau W?

MENURUTNYA, kondisi saat ini akan berlangsung panjang. Dampak ekonomi wabah ini dirasakan oleh semua kalangan, terutama menengah ke bawah. Dan melihat situasi yang ada, cara yang paling tepat mengatasi soal ekonomi ini adalah dengan Bantuan

Langsung Tunai (BLT).

Hanya saja, tulis Chatib Basri, ini perlu didukung oleh data yang akurat. Agar para penerima BLT betul-betul orang yang tepat dan berada di lokasi mana saja.

Tulisan ini berkelindan dengan apa yang ada di kepala saya. Agustus lalu, saya bertemu dengan Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IPB, Dr. Sofyan Sjaf, di acara Badan Pengkajian MPR RI. Dr. Sofyan mengungkap soal akurasi data desa yang masih jauh dari fakta

Saya sangat tertarik dengan ini. Lalu saya berinisiatif mempertemukan Dr. Sofyan dengan kepala desa di Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta. Ini merupakan dapil saya. Tujuannya agar ada kesadaran banyak pihak untuk membangun desa berdasarkan data yang presisi.

Saya prihatin dengan data yang diungkap oleh Dr. Sofyan. Ada 57,7 persen data desa yang masih tidak akurat. Ini membuat banyak kesalahan dalam perencanaan program pembangunan di desa. Lebih jauh dari itu, kesalahan data semacam ini berpengaruh pada pembangunan nasional secara keseluruhan.

Mengapa data desa tidak akurat? Menurut Dr. Sofyan, *pertama*, karena selama ini orang desa hanya ditempatkan sebagai “objek” dalam pengumpulan data. Pendekatan sensus, survei dan sejenisnya yang digunakan saat ini sarat dengan persoalan presisi. Meletakkan satu-satunya sumber data kepada respon-

den (menjawab pertanyaan yang diberikan) dengan tidak mempertimbangkan sumber lain (keberagaman sumber data) menjadi persoalan tersendiri. Demikianlah dialami dengan data podes (potensi desa) yang mengandalkan sumber responden hanya dari kepala atau sekretaris desa.

Kedua, minimnya akses data desa berbasis spasial. Masih banyaknya desa-desa di Indonesia yang memajang sketsa desa (dianggap sebagai peta desa) di kantor desanya, menunjukkan data desa masih belum berbasis spasial. Jika pun ditemukan peta orthophoto desa, maka citra yang digunakan belum memiliki resolusi tinggi. Artinya desa belum memiliki kesadaran spasial yang memberikan gambaran utuh tentang ruang desanya.

Ketiga, kreativitas yang kurang dalam pendekatan pengumpulan data desa. Sejauh ini, sensus maupun survei desa merupakan satu-satunya pendekatan yang digunakan dalam penyusunan database desa. Pendekatan yang melibatkan partisipasi orang desa dalam pengumpulan data masih sangat minim. Apalagi kombinasi pengumpulan data desa yang menggunakan data spasial.

Keempat, data desa disusun secara manual. Tidak sedikit tampilan data desa dalam bentuk tulisan tangan atau ketikan masih ditemukan. Meski sudah terdapat sistem informasi desa atau sejenisnya, namun belum menggambarkan situasi dan kondisi desa yang

seutuhnya. Data yang tersaji dalam sistem informasi masih sekedar memindahkan data desa yang manual ke dalam sistem.

Kelima, minimnya sumberdaya aparat desa. Pendidikan yang rendah, keterampilan yang minim, dan tingkat resiliensi yang rendah terhadap disrupsi yang dihadapi desa adalah deretan persoalan sumberdaya manusia dihadapi desa saat ini.

Saya berpendapat, di era 4.0 ini, kelima penyebab di atas seharusnya bisa diatasi. Teknologi yang kian canggih dan informasi yang semakin mudah, membuat peluang untuk mendapatkan data desa presisi jadi kian besar. Dan wabah Covid-19 serta dampak ekonominya harus dijadikan momentum yang tepat.

Sebab dengan data desa yang presisi, maka program BLT yang dilakukan untuk mengatasi dampak ekonomi wabah, bisa tepat sasaran dan bermanfaat optimal. Khususnya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Semoga. 🍀

”

Data yang tersaji dalam sistem informasi masih sekedar memindahkan data desa yang manual ke dalam sistem.

“



Kurikulum Kepemimpinan Kaderisasi PKS, Pancasila dan UUD NRI 1945

Ahad, (13/9) kemarin, saya menjadi salah satu pembicara dalam sebuah seminar kerjasama MPR RI dengan DPW PKS Jawa Barat. Tajuk acaranya Penataan Kurikulum Kepemimpinan dan Kaderisasi Dalam Partai Politik Berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

HADIR sebagai pembicara lainnya, yakni Presiden PKS Mohamad Sohibil Iman sebagai Keynote Speech,

Ketua F-PKS MPR RI Tifatul Sembiring, Sekretaris F-PKS MPR RI Johan Rosihan dan Ketua Bidang Sumber Daya Manusia DPP PKS Ahmad Heryawan.

Sebagai partai politik yang telah berdiri sejak 1998 (saat itu bernama Partai Keadilan/PK), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah pasti memiliki tujuan dan fungsi sebagai partai politik. Pertanyaan besarnya adalah, apa visi dan misi PKS serta bagaimana PKS menjalankan roda organisasinya untuk mencapai visi dan misi dimaksud?

Dalam buku *Indonesia Madani Yang adil, Sejahtera dan Bermartabat: Platform Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera* (2017), disebutkan tentang tujuan dan cita-cita mulia partai, yakni:

Kami mencitakan Indonesia menjadi negara kuat yang membawa misi rahmat keadilan bagi segenap umat manusia, agar bangsanya menjadi kontributor peradaban dan buminya menjelma menjadi taman kehidupan yang tentram dan damai.

Dalam Anggaran Dasar PKS, Visinya adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (AD PKS, Pasal 5)

Sementara Misinya adalah menjadikan Partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat yang diridhoi Allah SWT, dalam naungan keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. (AD PKS, Pasal 6)

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas tentu saja butuh perjuangan panjang dan dukungan SDM yang kuat. Untuk itulah PKS melakukan kaderisasi secara berjenjang dan berkelanjutan. Sehingga dihasilkan SDM yang memenuhi syarat kemenangan sebagaimana yang dipesankan oleh Ketua Majelis Syuro terdahulu Allahyarham KH. Hilmi Aminuddin yaitu SDM yang memiliki nilai (*Winning Value*), memiliki konsep (*Winning Concept*), punya sistem (*Winning System*), bekerja dalam Tim (*Winning Team*) yang solid untuk mencapai tujuan kemenangan (*Winning Goal*).

Kurikulum Kepemimpinan dan Kaderisasi PKS

Dalam Kurikulum Kepemimpinan dan Sistem Kaderisasi PKS, ada empat jenjang keanggotaan yang harus dilalui. Ini sesuai dengan UU No.2/2011 tentang Perubahan Atas UU No.2/2008 tentang Partai Politik. Pasal 34 ayat 3b Butir c berbunyi: Pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan. *Pertama*, Anggota Muda, yakni Anggota pemula yang siap berkontribusi kepada bangsa dan negara Bersama partai.

Kedua, Anggota Madya, yakni Anggota Muda yang terikat dengan segala peraturan partai.

Ketiga, Anggota Dewasa, yakni Anggota Madya yang menjadi penggerak partai.

Keempat, Anggota Ahli, yakni Anggota Dewasa

yang menjadi pelopor teladan partai.

Kemudian ada lima bidang studi dalam kaderisasi. Kelimanya ini menjadi materi strategis dan penting yang harus diikuti dan dimiliki kader. *Pertama*, Keagamaan, yakni membentuk kesalihan pribadi yang tercermin dalam sikap anti korupsi, jujur, dan berjuang dengan mengharapkan keridhoan Tuhan Yang Maha Esa.

Kedua, Kebangsaan, yakni mengokohkan jiwa nasionalisme dan mengenal nilai-nilai yang mempersatukan Nusantara sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketiga, Kemasyarakatan, yakni menguatkan nilai-nilai kemanusiaan agar dapat hidup dengan damai bersama keluarga, tetangga dan masyarakat tanpa memandang warna kulit dan suku bangsa, sebagai keragaman yang membawa rahmat. Bhinneka Tunggal Ika.

Keempat, Kepartaian, yakni mengokohkan komitmen pada partai dan siap berdemokrasi secara jujur, dewasa dan beradab. Memahami peraturan dan konstitusi.

Kelima, Kepemimpinan dan Kewirausahaan, yakni memperkuat bidang keahlian masing-masing agar dapat digunakan untuk berkontribusi pada kesejahteraan bangsa Indonesia.

Hasil Kaderisasi

Hasil dari sebuah kaderisasi tentu akan terlihat dari kader-kader yang mengikuti program pembinaan.

Di antara hal yang sering dirasakan oleh masyarakat adalah kepedulian dalam membantu masyarakat dalam menghadapi bencana. Hal itu antara lain tergambar pada peristiwa kabut asap di Riau.

Seorang ibu berkaos hitam dan berambut pendek membetot publik pada Oktober 2019 lalu. Tampil di Indonesia Lawyers Club (ILC), berkali-kali dia menyebut PKS dalam acara yang mengangkat tema soal ancaman kabut asap di Riau. *Live*. Tanpa naskah. Menjawab pertanyaan Karni Ilyas.

Ibu tersebut bernama Ayang Rumika. Salah satu pengurus di Posko Kesehatan DPW PKS Riau. Dia mengisahkan perjuangannya menyelamatkan cucunya dari ancaman kabut asap yang mengganas.

Kata Ayang, kader-kader PKS yang membantunya. Menjemputnya di rumah. Lalu membawanya ke posko. Mengantarnya ke rumah sakit. Sampai memberinya uang Rp 1 juta untuk deposit.

Melalui Ayang, kita akhirnya tahu bahwa sistem kaderisasi PKS sangat Pancasila. Di posko ada puluhan atau bahkan ratusan orang. Mereka pastinya datang dari beragam latar belakang. Entah suku, ras, kelompok dan sebagainya. Mereka tak pernah ditolak oleh kader PKS meski berbeda-beda.

“Ibu, karena ibu tak berjilbab maka kami tak mau menolong ibu.”

Dialog semacam itu sudah tentu tak pernah ada. Ayang menjadi bukti tak terbantahkan.

Soal kepedulian terhadap bencana ini sudah menjadi rahasia umum. Bahwa kader-kader PKS siap membantu kapan dan dimanapun bencana hadir.

Di samping itu, munculnya pejabat-pejabat publik dari PKS; baik di eksekutif seperti Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Wakil Bupati dan Wakil Walikota maupun di legislatif sebagai anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.

Kesimpulan

Dari seminar kali ini, bisa ditarik kesimpulan. *Pertama*, kurikulum kepemimpinan dan sistem kaderisasi PKS kental dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Kedua, kurikulum kepemimpinan dan kaderisasi PKS sudah diimplementasikan di Pusat dan Daerah serta efektif dalam mendukung kinerja PKS baik di Legislatif dan Eksekutif. ☺

”

**Kurikulum kepemimpinan
dan sistem kaderisasi PKS
kental dengan nilai-nilai
Pancasila dan UUD NRI 1945.**

“



Syaikhul Soroti Naskah Akademik Omnibus Law Ciptaker yang Tidak Berkualitas

Ahmad Syaikhul menyoroti Naskah Akademik (NA) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Contohnya tentang aturan Bangunan Gedung.

MENURUT Anggota Komisi V DPR RI itu, UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung jadi salah satu yang akan direvisi dalam RUU Ciptaker. Ada sekitar 80% substansi yang akan

diperbaiki dengan 60% diantaranya penghapusan materi muatan UU.

Alasan revisi tersebut karena banyaknya tumpang tindih aturan. Anehnya, Pemerintah tidak dapat membuktikan satu ayat pun dari UU No. 28 Tahun 2002 ini yang tumpang tindih dengan UU lainnya. Selain itu Pemerintah tidak memberikan argumentasi yang cukup dalam Naskah Akademik (NA) karena hanya menyediakan penjelasan sebanyak 1,5 halaman.

“Ini aneh. Padahal dapat dibayangkan, sebuah UU yang separuh isinya dihapuskan sudah pasti kehilangan ruh pengaturannya,” kata Syaikh.

Politisi PKS melanjutkan, memang Pemerintah menjanjikan bahwa aturan yang dihapus ini akan dipindahkan ke dalam PP. Akan tetapi, akibat pelemahan ini justru dapat berakibat pada ketidakpastian berusaha bagi pengusaha. Sebab, aturan-aturan ini dapat saja sewaktu-waktu diubah kembali karena tidak memiliki kekuatan seperti dalam UU.

“Kondisinya jadi semacam ada ketidakpastian bagi pengusaha. Bagaimana menarik investor?” Tanya Syaikh.

Mantan Wakil Walikota Bekasi itu juga mengkritisi dihapuskannya peran Pemerintah Daerah dalam membina wilayahnya melalui penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam revisi ini. Dalam RUU Ciptaker ini, IMB akan diganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

“Mengapa dihapuskan kewenangan Pemda? Belum tentu pemerintah pusat mengerti kondisi wilayah yang ada di berbagai daerah, mengingat betapa luasnya wilayah Indonesia dan betapa khasnya permasalahan di setiap daerah,” ujar Syaikh.

Di sisi lain, ini mengurangi semangat otonomi daerah yang tercantum dalam Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945 Amandemen ke-2.

“Jadinya paradoks. Kita ingin ada otonomi daerah, tapi kewenangan Pemda menerbitkan IMB dihapus,” jelas Syaikh.

Syaikh juga menyoroti dihapuskannya materi muatan terkait persyaratan Bangunan Gedung. Dalam UU sebelumnya, terdapat berbagai aturan terkait keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. Tapi di RUU Ciptaker dihapus yang dapat membahayakan pengguna gedung. Selain itu membuat Bangunan Gedung tidak lagi ramah bagi Penyandang Disabilitas dan lansia, apabila persyaratan-persyaratan tersebut tidak wajib dipenuhi.

“Aturan keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan kemudahan ini sudah standar. Dan wajib dipenuhi,” tegas Syaikh.

Karena itu, Syaikh mendorong agar pembahasan ini dikembalikan ke komisi V yang secara khusus membidangi persoalan Bangunan Gedung. Tujuannya agar dapat membahas lebih dalam revisi UU tersebut dengan mengundang pakar khusus terkait UU yang direvisi.

Selain itu juga meminta Pemerintah menghadirkan argumentasi yang memadai terkait indikasi tumpang tindihnya peraturan dalam UU No. 28 tahun 2002 ini dengan UU lainnya.

“Pemerintah harus memberikan kajian empirik dan bukan melalui hipotesa yang subjektif tanpa data yang valid terkait revisi ini. Agar rakyat tak dirugikan,” pungkas Syaikh. 🍏

1. <https://fraksi.pks.id/2020/07/22/syaikhu-soroti-naskah-akademik-omnibus-law-ciptaker-yang-tak-berkualitas/>
2. <https://radarbekasi.id/2020/07/22/syaikhu-na-omnibus-law-ciptaker-tidak-berkualitas/>

3. <https://bumnwatch.blogspot.com/2020/07/naskah-akademik-omnibus-law-ciptaker.html>
4. <https://teropongindonesia.com/2020/07/syaikhu-soroti-naskah-akademik-omnibus-law-ciptaker-yang-tidak-berkualitas/>
5. <http://jurnalbabel.com/2020/07/syaikhu-soroti-naskah-akademik-omnibus-law-ciptaker-yang-tidak-berkualitas/>
6. <http://inionline.id/2020/07/syaikhu-soroti-naskah-akademik-omnibus-law-ciptaker-yang-tidak-berkualitas/>
7. <http://www.radiosuarabekasi.com/berita-seputar-bekasi-rama/7400-syaikhu-soroti-naskah-akademik-omnibus-law-ciptaker-yang-tidak-berkualitas>
8. <http://suarapemred.co/news/nasional/read/83263/syahrul.naskah.akademik.omnibus.law.ciptaker.tidak.berkualitas>
9. <https://www.tempo.co/read/1368019/politikus-pks-khawatir-omnibus-law-hapus-uu-bangunan-gedung>
10. https://tirto.id/fSLj?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Share
11. https://www.antaranews.com/berita/1625730/fpks-soroti-pembahasan-ruu-ciptaker-saat-masa-reses?utm_medium=mobile
12. <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/07/22/pks-sebut-naskah-akademik-omnibus-law-ciptaker-tidak-layak-dan-tidak-berkualitas>
13. <https://republika.co.id/share/qduz43409>
14. <https://merahputih.com/post/read/saat-reses-dpr-kebut-bahas-ruu-ciptaker>
15. <https://www.mediagaruda.co.id/2020/07/22/syaikhu-soroti-naskah-akademik-omnibus-law-ciptaker-yang-tidak-berkualitas/>
16. <https://jabarnews.com/read/88646/syaikhu-soroti-naskah-akademik-omnibus-law-ciptaker-yang-tidak-berkualitas>
17. <http://aksi.id/artikel/57519/Anggota-DPR-Ahmad-Syaikhu-Soroti-Naskah-Akademik-Omnibus-Law-Ciptaker-yang-Tidak-Berkualitas/#.Xxj1AOPEyKY.whatsapp>
18. <https://spiritnews.co.id/2020/07/23/syaikhu-soroti-naskah-akademik-omnibus-law-ciptaker-yang-tidak-berkualitas/>
19. <http://www.wajahbekasi.com/2020/07/syaikhu-soroti-naskah-akademik-omnibus.html>
20. <https://kesatu.co/tak-berkualitas-syaikhu-soroti-naskah-akademik-omnibus-law-ciptaker/>



Awali Reses, Syaikhul Berikan 13 Sapi Kurban di 3 Kabupaten

Anggota DPR RI Ahmad Syaikhul memberikan 13 sapi kurban kepada masyarakat di tiga kabupaten. Yakni Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta. Ketiga daerah ini merupakan Daerah Pemilihan (Dapil) VII Jawa Barat, tempat Syaikhul berjuang dalam Pileg 2019 lalu.

HEWAN kurban tersebut diserahkan Syaikhul secara simbolis di Desa Mekarasih, Kecamatan Banyusari, kabupaten Karawang, Rabu, (22/7). Kegiatan ini sekaligus mengawali reses Syaikhul.

Menurut Syaikhul, penyerahan hewan kurban ini sebagai bentuk komitmennya untuk terus membantu masyarakat di dapilnya.

“Ini wujud komitmen saya untuk terus membantu masyarakat setiap kali ada reses,” ujar Syaikh.

Idul Adha kali ini, kata Syaikh, adalah momentum tepat bagi masyarakat, khususnya umat Islam, untuk belajar yakin dan taat kepada perintah Allah. Sebab di situasi pandemi Corona yang berpotensi pada lahirnya resesi ekonomi, kedekatan kita kepada Allah memiliki peran sangat penting.

“Situasi sekarang sangat sulit. Ini adalah momentum kita untuk yakin dan taat pada Allah,” jelas Syaikh yang duduk di Komisi V DPR RI itu.

Keyakinan dan ketaatan itu telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, Nabi Ismail ditaati. Ketaatan tersebut akhirnya membawa keberkahan bagi keluarga Nabi Ibrahim as.

“Kita harus mengambil hikmah dari kisah tersebut. Sehingga beban hidup yang kita pikul saat ini akan dimudahkan Allah,” kata Syaikh. 🌟



“Ini wujud komitmen saya untuk terus membantu masyarakat setiap kali ada reses,” ujar Syaikh.



1. <https://fraksi.pks.id/2020/07/23/awali-reses-syaikhu-berikan-13-sapi-kurban-di-3-kabupaten/>
2. <https://radarbekasi.id/2020/07/23/awali-reses-syaikhu-berikan-13-sapi-kurban-di-3-kabupaten/>
3. <http://jurnalbabel.com/2020/07/awali-reses-syaikhu-berikan-13-sapi-kurban-di-3-kabupaten/>
4. <https://teropongindonesia.com/2020/07/awali-reses-syaikhu-berikan-13-sapi-kurban-di-3-kabupaten/>
5. <https://bekasiguide.com/2020/07/23/awali-reses-syaikhu-berikan-13-sapi-kurban-di-3-kabupaten/>
6. <https://jabarnews.com/read/88695/awali-reses-syaikhu-berikan-belasan-sapi-kurban-di-tiga-kabupaten>
7. <https://www.radarnusantara.com/2020/07/awali-reses-ahmad-syaikhu-berikan-13.html>
8. <http://aksi.id/artikel/57541/Awali-Reses-Ahmad-Syaikhu-Berikan-13-Sapi-Kurban-di-3-Kabupaten/#.Xxl6fkOYJoM.whatsapp>
9. <https://bumnwatch.blogspot.com/2020/07/awali-reses-syaikhu-berikan-13-sapi-ke.html>
10. <http://www.radiosuarabekasi.com/berita-seputar-bekasi-roya/nasional/7402-awali-reses-syaikhu-berikan-13-sapi-kurban-di-3-kabupaten>
11. <https://go.shr.lc/32NVv3y>
12. <http://www.wajahbekasi.com/2020/07/awali-reses-syaikhu-berikan-13-sapi.html>
13. <https://tvberita.co.id/news/ahmad-syaikhu-sumbang-13-sapi-untuk-masyarakat-tiga-kabupaten/>
14. <http://spiritnews.co.id/2020/07/24/syaikhu-serahkan-hewan-kurban-untuk-masyarakat/>
15. <https://kesatu.co/awali-reses-syaikhu-serahkan-13-sapi-kurban-di-tiga-kabupaten/>
16. <https://infobekasi.co.id/2020/07/23/awali-reses-syaikhu-berikan-13-sapi-kurban-di-3-kabupaten/>



Reses di Kabupaten Bekasi, Syaikhu Adakan Pelatihan Hidroponik

Isu ketahanan pangan menjadi perhatian Ahmad Syaikhu saat reses. Sebagai bentuk kepeduliannya, Politisi PKS itu pun mengadakan Pelatihan Hidroponik di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Ahad (2/8).

MENURUT Anggota Komisi V DPR RI itu, wabah Covid-19 berdampak signifikan pada bidang kehidupan lain. Semula krisis kesehatan, kini berpotensi besar jadi krisis ekonomi dan pangan.

“Dampak wabah ini luar biasa. Awalnya hanya krisis kesehatan. Tapi kini merambah pada krisis ekonomi dan pangan,” ujar Syaikhu.

Krisis pangan ini, lanjut Syaikh, terjadi karena banyak pekerja yang di PHK. Akibatnya muncul pengangguran baru. Ujungnya berdampak pada turunnya daya beli. Sehingga akhirnya mengancam ketahanan pangan.

“Kondisi saat ini mengancam ketahanan pangan kita,” kata Syaikh.

Karena itu, mantan Wakil Walikota Bekasi itu mengajak masyarakat untuk bergerak melakukan antisipasi. Salah satunya dengan bergiat hidroponik.

“Salah satu upaya menguatkan ketahanan pangan dengan hidroponik. Kita bercocok tanam di lahan terbatas,” ajak Syaikh.

Dalam acara tersebut, Syaikh memberikan bantuan alat hidroponik kepada tokoh masyarakat.

“Terimakasih Pak Syaikh. Bantuan ini bermanfaat sekali bagi kami,” ujar Puji.

Pelatihan Hidroponik diikuti 150 peserta. Datang dari 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi. Pematerinya Aktivist Petani Kota, BS. Wibowo. 🌱

”

“Salah satu upaya menguatkan ketahanan pangan dengan hidroponik. Kita bercocok tanam di lahan terbatas,” ajak Syaikh.

“

1. <http://ahmadsyaikhu.com/2020/08/03/reses-di-kabupaten-bekasi-syaikhu-adakan-pelatihan-hidroponik/>
2. <https://fraksi.pks.id/2020/08/02/reses-di-kabupaten-bekasi-syaikhu-adakan-pelatihan-hidroponik/>
3. <https://radarbekasi.id/2020/08/02/reses-di-kabupaten-bekasi-syaikhu-adakan-pelatihan-hidroponik/>
4. <http://jurnalbabel.com/2020/08/reses-di-kabupaten-bekasi-syaikhu-adakan-pelatihan-hidroponik/>
5. <http://aksi.id/artikel/57868/Reses-di-Kabupaten-Bekasi-Anggota-DPR-Ahmad-Syaikhu-Adakan-Pelatihan-Hidroponik/#.XyaxUafyDlk.whatsapp>
6. <https://bekasiguide.com/2020/08/02/reses-di-kabupaten-bekasi-syaikhu-adakan-pelatihan-hidroponik/>
7. <https://bumnwatch.blogspot.com/2020/08/syaikhu-isi-reses-dengan-memberi.html>
8. <https://m.jabarnews.com/read/89169/syaikhu-gelar-reses-di-kabupaten-bekasi-ini-yang-dilakukan/1>
9. <https://www.wartasidik.co.id/index.php/2020/08/02/reses-di-kabupaten-bekasi-syaikhu-adakan-pelatihan-hidroponik/>
10. <https://teropongindonesia.com/2020/08/21809/>
11. <https://www.youtube.com/watch?v=9To8TEHds5Q>
12. <http://www.radiosuarebekasi.com/berita-seputar-bekasi-roya/nasional/7416-reses-di-kabupaten-bekasi-syaikhu-adakan-pelatihan-hidroponik>
13. <https://www.wartasidik.co.id/index.php/2020/08/02/reses-di-kabupaten-bekasi-syaikhu-adakan-pelatihan-hidroponik/>
14. <https://spiritnews.co.id/2020/08/02/di-tengah-pandemi-syaikhu-minta-warga-kembangkan-hidroponik/>
15. <https://kesatu.co/reses-di-kabupaten-bekasi-syaikhu-menggelar-pelatihan-hidroponik/>
16. <https://infobekasi.co.id/2020/08/02/reses-di-kabupaten-bekasi-syaikhu-adakan-pelatihan-hidroponik/>
17. <http://inionline.id/2020/08/reses-di-kabupaten-bekasi-syaikhu-adakan-pelatihan-hidroponik/>
18. <https://www.berdaulat.id/reses-di-kabupaten-bekasi-syaikhu-adakan-pelatihan-hidroponik/>
19. <https://rmco.id/baca-berita/parlemen/42861/reses-di-bekasi-syaikhu-adakan-pelatihan-hidroponik>
20. <https://kicaunews.com/2020/08/02/reses-di-kabupaten-bekasi-syaikhu-adakan-pelatihan-hidroponik/>
21. <https://spiritnews.co.id/2020/08/02/di-tengah-pandemi-syaikhu-minta-warga-kembangkan-hidroponik/>
22. <http://www.transparannews.com/ekonomi/reses-di-kabupaten-bekasi-syaikhu-adakan-pelatihan-hidroponik/>



Syaikhu Tinjau BSPS di Karawang, Masyarakat Berikan Apresiasi dan Ajukan Usulan Baru

Ahmad Syaikhu meninjau pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sarijaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Masyarakat memberikan apresiasi kepada Syaikhu, karena dianggap berhasil memperjuangkan aspirasi mereka.

ANGGOTA F-PKS DPR RI itu berjalan kaki sekitar 300 meter menuju lokasi. Syaikhu bertemu dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat yang menerima program BSPS. Mereka memberikan apresiasi.

“Terimakasih Pak Syaikh dan Kementerian PUPR, karena sudah memperjuangkan kami mendapat program ini,” ujar mereka.

Para Penerima BSPS bersyukur sebab sekarang kondisi rumahnya lebih layak huni dan nyaman.

“Sekarang lebih merasakan nyaman untuk tinggal di rumah. Sebelumnya ada perasaan was-was karena khawatir roboh jika ada hujan dan terkena terpaan angin kencang,” ungkap mereka.

Syaikh juga berkomunikasi dengan Yanto, pembuat kusen yang merupakan, warga asli Sarijaya. Yanto diberdayakan untuk menyediakan kusen dan pintu dalam program BSPS.

Sukses program BSPS di Desa Sarijaya mendapat perhatian dari wilayah lain. Camat Tirta Mulya mengutus aparaturnya untuk juga menyaksikan proses pembangunan BSPS. Mereka kemudian mengajukan program agar BSPS bisa dilakukan juga di daerah mereka.

“Usulan dari bapak-bapak saya terima. Saya coba perjuangkan dan doakan agar berhasil,” kata Syaikh.

Kunjungan Anggota F-PKS DPR RI itu dalam rangka Reses IV Masa Sidang 2019-2020 yang berlangsung pada 21-29 Juli 2020. Dalam acara itu, Syaikh didampingi oleh Lurah Sarijaya Enin Sutisna, Babinkamtibmas Polsek Majalaya dan Babinsa Koramil Majalaya serta aparatur Desa Sarijaya.

Kementerian PUPR melakukan perbaikan rumah tidak layak huni melalui Program BSPS dengan dana perbaikan 17,5 juta untuk setiap rumah. Desa Sarijaya menerima bantuan untuk 25 rumah pada tahun 2020, luas bangunan per rumahnya 4 x 5 meter persegi.

Sebagai informasi, Program BSPS atau yang lebih dikenal

dengan program bedah rumah merupakan salah satu bagian dari Program Sejuta Rumah. Melalui penyaluran Program BSPS tersebut, Kementerian PUPR ingin memberikan stimulan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang rumahnya tidak layak huni dengan menyalurkan bantuan pembangunan perumahan beserta Prasarana Sarana dan Utilitas umum (PSU).

Dana Program BSPS terbagi menjadi dua jenis yakni Peningkatan Kualitas Rumah sebesar Rp 17,5 juta yakni Rp 15 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang. Selain itu ada juga penyaluran dana Pembangunan Rumah Baru Swadaya sebesar Rp 35 juta yakni Rp 30 juta untuk bahan bangunan dan Rp 5 juta untuk upah tukang.

Program BSPS termasuk program padat karya tunai yang melibatkan banyak tenaga kerja, antara lain: Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), Koordinator Fasilitator (Korfes), dan tenaga tukang yang diambil dari penduduk setempat.

BSPS dilaksanakan oleh masyarakat penerima bantuan secara swadaya dengan membentuk kelompok penerima bantuan secara tanggung renteng, gotong royong, dan berkelanjutan dengan anggaran yang ada.

“Program BSPS ini harus kita teruskan dan kawal. Agar bisa tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan,” kata Syaikh. 🍀

1. <https://fraksi.pks.id/2020/08/04/syaikhu-tinjau-bsps-di-karawang-masyarakat-apresiasi-dan-ajukan-usulan-baru/>
2. <https://bumnwatch.blogspot.com/2020/08/tinjau-bsps-karawang-masyarakat.html>
3. <https://bekasiguide.com/2020/08/04/syaikhu-tinjau-bsps-di-karawang-masyarakat-berikan-apresiasi-dan-ajukan-usulan-baru/>

4. <http://www.transparannews.com/politik/syaikhu-tinjau-bsps-di-karawang-masyarakat-berikan-apresiasi-dan-ajukan-usulan-baru/>
5. <https://radarbekasi.id/2020/08/04/tinjau-bsps-di-karawang-syaikhu-terima-usulan-warga/>
6. <https://kesatu.co/tinjau-bsps-di-karawang-syaikhu-diapresiasi-warga/>
7. <https://www.mediagaruda.co.id/2020/08/04/syaikhu-tinjau-bsps-di-karawang-masyarakat-berikan-apresiasi-dan-ajukan-usulan-baru/>
8. <http://jurnalbabel.com/2020/08/syaikhu-tinjau-bsps-di-karawang-masyarakat-berikan-apresiasi-dan-ajukan-usulan-baru/>
9. <https://www.berdaulat.id/syaikhu-tinjau-bsps-di-karawang-masyarakat-berikan-apresiasi-dan-ajukan-usulan-baru/>
10. <https://m.jabarnews.com/read/89267/tinjau-pelaksanaan-bsps-di-karawang-ini-yang-ditemukan-syaikhu>
11. Syaikhu Tinjau BPS di Karawang, Masyarakat Berikan Apresiasi dan Ajukan Usulan Baru - <https://go.shr.lc/31g2IXY>
12. <https://infobekasi.co.id/2020/08/04/syaikhu-tinjau-bsps-di-karawang-masyarakat-berikan-apresiasi-dan-ajukan-usulan-baru/>
13. <http://inionline.id/2020/08/syaikhu-tinjau-bsps-di-karawang-masyarakat-berikan-apresiasi-dan-ajukan-usulan-baru/>
14. <http://www.radiosuarabekasi.com/berita-seputar-bekasi-royal/nasional/7418-syaikhu-tinjau-bsps-di-karawang-masyarakat-berikan-apresiasi-dan-ajukan-usulan-baru>



Ekonomi Minus, Syaikhu: Pemerintah Jangan Ngotot Bahas Omnibus Law, Fokus Tangani Covid-19

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2020 minus 5,32%. Kondisi ini membuat Indonesia di ambang resesi. Ahmad Syaikhu meminta pemerintah untuk fokus tangani Covid-19, bukan justru ngotot bahas Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law.

“SAYA prihatin dengan situasi ini. Ekonomi kita minus, resesi di ambang pintu. Tapi kok pemerintah terkesan ngotot menyelesaikan Omnibus Law. Harusnya fokus atasi wabah Covid-19,” kata Syaikhu.

Menurut Anggota Komisi V DPR RI itu, pilihan fokus harus diambil pemerintah. Sebab terbukti, opsi melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan adanya Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dengan alasan memulihkan ekonomi, justru tak tepat.

Ini terlihat dari angka kasus positif corona yang terus meningkat. Bahkan, muncul klaster-klaster baru di perkantoran dan sebagainya. Ini terjadi karena memang belum saatnya Indonesia memasuki 'New Normal'.

"Jauh-jauh hari sudah kami sampaikan dari F-PKS. Kita belum saatnya longgar atau 'New Normal'. Karena wabah belum sampai puncaknya," ungkap Syaikh.

Setidaknya, lanjut mantan Wakil Walikota Bekasi itu, pemerintah fokus pada dua solusi. Pertama, Penanganan Covid19, karena satu-satunya cara yang dapat memulihkan mobilitas warga adalah dengan memberikan rasa aman agar warga berani beraktivitas.

"Rasa aman inilah yang belum dapat diberikan oleh Pemerintah," ujar Syaikh.

Hal ini terjadi karena Pemerintah belum maksimal dalam melakukan penanganan Covid19. Ini terbukti dari penelitian yang dilakukan Deep Knowledge Group, konsorsium perusahaan investasi internasional, terkait daftar 100 negara yang dianggap aman dari pandemi COVID-19. Daftar ini dibuat berdasarkan 130 parameter berbagai macam data mulai dari efisiensi karantina, kemampuan pengawasan serta deteksi, kesiapan sistem kesehatan, hingga efisiensi kerja pemerintah.

Hasilnya, Indonesia menempati peringkat 97, di atas Bahama, Laos, dan Kamboja. Menurut Universitas Oxford, bahkan Indonesia mendapat nilai D, paling rendah di antara semua negara ASEAN, bahkan Kamboja.

“Dari penilaian yang dilakukan, terlihat bahwa efisiensi kerja pemerintah ternyata masih buruk,” tegas Syaikh.

Padahal, lanjut Syaikh, dengan banyaknya keterbatasan Indonesia di bidang kesehatan, maka dibutuhkan kinerja yang luar biasa dari Pemerintah untuk penanganan Covid-19 ini. Dengan cara ini, ekonomi juga akan tumbuh.

Menurut Syaikh, kondisi ini tercipta karena pemerintah terkesan tidak fokus dan lebih mementingkan ekonomi. Kemudian, ditambah lagi terkesan lebih memperhatikan RUU Ciptaker. Padahal RUU ini mendapat banyak penolakan dari berbagai komponen masyarakat.

“Ini aneh. Ada apa dengan Omnibus Law? Kok sangat ngotot sekali untuk segera disahkan. Sementara urusan Covid-19 masih belum tertangani dengan optimal,” jelas Syaikh.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia minus 5,32% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. BPS juga mencatat dari 17 sektor, sektor transportasi dan perdagangan yang mengalami penurunan yang paling tajam. Dimana sektor ini mengalami kontraksi sebesar 30,84%.

Syaikh berpendapat, seharusnya Pemerintah harus segera menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja yang terbukti tidak memberikan sentimen positif kepada masyarakat. Kemudian terus berusaha meningkatkan respons terhadap penanganan Covid19. Caranya dengan menerapkan isolasi dan memberi bantuan sosial ke daerah zona merah, untuk memutus semaksimal mungkin rantai penyebaran.

“Langkah ini harus segera dilakukan pemerintah. Sekali lagi jangan ngotot bahas Omnibus Law. Fokus dulu tangani Covid-19,” pungkas Syaikh. 🙏

1. <https://pks.id/content/ekonomi-minus-syaikhu-pemerintah-jangan-ngotot-bahas-omnibus-law-fokus-tangani-covid-19>
2. <https://fraksi.pks.id/2020/08/07/ekonomi-minus-syaikhu-pemerintah-jangan-ngotot-bahas-omnibus-law-fokus-covid-19/>
3. <https://infobekasi.co.id/2020/08/07/ekonomi-minus-syaikhu-pemerintah-jangan-ngotot-bahas-omnibus-law-fokus-tangani-covid-19/>
4. <https://m.industry.co.id/read/71659/marak-phk-ahmad-syaikhu-dorong-pemanfaatan-hidroponik-untuk-tunjang-ketahanan-pangan>
5. <https://radarbekasi.id/2020/08/07/syaikhu-pemerintah-jangan-ngotot-bahas-omnibus-law-fokus-tangani-covid-19/>
6. <https://teropongindonesia.com/2020/08/ekonomi-minus-syaikhu-pemerintah-jangan-ngotot-bahas-omnibus-law-fokus-tangani-covid-19/>
7. <http://jurnalbabel.com/2020/08/ekonomi-minus-syaikhu-pemerintah-jangan-ngotot-bahas-omnibus-law-fokus-tangani-covid-19/>
8. <https://www.mediagaruda.co.id/2020/08/07/ekonomi-minus-syaikhu-pemerintah-jangan-ngotot-bahas-omnibus-law-fokus-tangani-covid-19/>
9. <http://www.radiosuarabekasi.com/berita-seputar-bekasi-royal/nasional/7424-ekonomi-minus-syaikhu-pemerintah-jangan-ngotot-bahas-omnibus-law-fokus-tangani-covid-19>
10. <https://m.suarakarya.id/detail/116678/Ekonomi-Minus-Syaikhu-Pemerintah-Jangan-Ngotot-Bahas-Omnibus-Law>
11. <https://m.jabarnews.com/read/89411/syaikhu-pemerintah-jangan-ngotot-bahas-omnibus-law-fokus-tangani-covid-19>
12. Ekonomi Minus, Anggota DPR Ahmad Syaikh: Pemerintah Jangan Ngotot Bahas Omnibus Law, Fokus Tangani Covid-19 <http://aksi.id/artikel/58021/Ekonomi-Minus-Anggota-DPR-Ahmad-Syaikhu-Pemerintah-Jangan-Ngotot-Bahas-Omnibus-Law-Fokus-Tangani-Covid-19/#.Xy3tqOR4W0M.whatsapp>
13. <https://bekasiguide.com/2020/08/07/ekonomi-minus-syaikhu-pemerintah-jangan-ngotot-bahas-omnibus-law-fokus-tangani-covid-19/>
14. <https://spiritnews.co.id/2020/08/08/ekonomi-minus-pemerintah-harus-fokus-tangani-covid-19/>

PKS: Rakyat sedang Susah, Tunda Kenaikan Tarif Tol

Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikh meminta pemerintah untuk menunda kenaikan tarif tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera). **Pasalnya, kebijakan ini hanya akan menambah beban baru rakyat di tengah situasi ekonomi yang memburuk.**

“KENAIKAN ini harus ditunda. Jangan tambah beban baru bagi rakyat yang sedang susah,” kata Syaikh.

Seerti diberitakan, Pemerintah melalui Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) akan menaikkan tarif tol Belmera sepanjang 34 Km, terhitung mulai hari Kamis (13/08) pukul 00.00 WIB. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 1246/KPTS/M/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa, tarif tol juga mengalami penyederhanaan menjadi 3 golongan saja. Selain itu akan ada beberapa penyesuaian tarif tol di ruas-ruas lainnya.

Melihat kondisi ekonomi yang sedang merosot yang ditandai pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2020 minus 5,32%, sesungguhnya apa yang dilakukan Pemerintah ini justru memperparah keadaan.

Dalam kondisi ekonomi seperti sekarang ini, Syaikh menjelaskan, seharusnya yang Pemerintah lakukan adalah memberikan insentif agar laju pertumbuhan yang terus menurun dapat ditahan agar tidak semakin menurun. Apalagi menurut data BPS, sektor transportasi dan pergudangan

mendapatkan pukulan yang paling telak, hingga mengalami pertumbuhan -30,84%.

“Berikan insentif pada sektor transportasi. Bukan malah menaikkan tarif tol. Ini jelas aneh,” tegas Syaikh.

Apalagi kata Anggota F-PKS DPR RI itu, kenaikan tarif Golongan II sebesar 15,38%, dari yang semula sebesar Rp 13.000,- menjadi Rp 15.000,- sangat memberatkan. Sebab, pemilik kendaraan jenis ini didominasi oleh pengusaha kecil dan menengah (UMKM). Berbeda dengan kendaraan niaga Golongan IV dan V (yang sekarang menjadi Golongan III) yang kebanyakan dimiliki oleh korporasi.

“Sudah jelas ini akan sangat memberatkan. Karena kenaikan tarif tol ini seperti menyasar pelaku UMKM,” kata Syaikh.

Angka kenaikan bagi golongan II ini juga melebihi angka inflasi untuk wilayah Kota Medan periode 1 November 2017 – 31 Oktober 2019 sebesar 5,72 %. Sehingga hal ini jelas melanggar Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, dimana kenaikan tarif tol tidak boleh melebihi angka inflasi tersebut.

”

“Sudah jelas ini akan sangat memberatkan. Karena kenaikan tarif tol ini seperti menyasar pelaku UMKM,” kata Syaikh.

“

Melihat hal itu, Syaikhul sekali lagi menegaskan Pemerintah harus menunda kenaikan tarif tol sampai pertumbuhan ekonomi kembali naik dan stabil. Apalagi operator jalan tol merupakan BUMN yang mayoritas dimiliki oleh Pemerintah sendiri.

“Tunda kenaikan. Agar tidak menambah beban terhadap sektor transportasi dan perdagangan yang telah sangat ter-pukul oleh Pandemi Covid19 ini,” tegas Syaikhul. 🗨️

1. <http://www.radiosuarabekasi.com/berita-seputar-bekasi-raja/nasional/7426-pks-rakyat-sedang-susah-tunda-kenaikan-tarif-tol>
2. <http://jurnalbabel.com/2020/08/pks-rakyat-sedang-susah-tunda-kenaikan-tarif-tol/>
3. <https://www.mediagaruda.co.id/2020/08/08/pks-rakyat-sedang-susah-tunda-kenaikan-tarif-tol/>
4. <https://bekasiguide.com/2020/08/08/syaikhul-rakyat-sedang-susah-tunda-kenaikan-tarif-tol/>
5. <https://radarbekasi.id/2020/08/08/pks-rakyat-sedang-susah-tunda-kenaikan-tarif-tol/>
6. <http://www.jurnalbandung.com/pks-rakyat-sedang-susah-tunda-kenaikan-tarif-tol/>
7. <http://beritatrans.com/2020/08/08/pks-minta-pemerintah-tunda-kenaikan-tarif-tol-belawan-medan-tanjung-morawa-rakyat-sedang-susah/>
8. <https://jabarnews.com/read/89452/syaikhul-jangan-tambah-beban-rakyat-dengan-kenaikan-tarif-tol>
9. <http://bisnistoday.co.id/pks-rakyat-sedang-susah-tunda-kenaikan-tarif-tol/>
10. <http://inionline.id/2020/08/pks-rakyat-sedang-susah-tunda-kenaikan-tarif-tol/>

Proyek Jalan Tol Cibitung-Cilincing Ambruk, PKS: Kok Setiap Tahun Begini?

Ambruknya konstruksi jalan tol terjadi lagi. Kali ini, proyek konstruksi pembangunan Seksi IV Jalan Tol Cibitung-Cilincing di Kelurahan Marunda Cilincing, Jakarta Utara, Ahad, 16 Agustus 2020.

PERISTIWA ini mendapat tanggapan Anggota F-PKS DPR RI Ahmad Syaikh. Dia merasa heran karena sejak tahun 2017, selalu saja terjadi kecelakaan proyek jalan tol.

“Kita patut heran, mengapa selalu terjadi ambruknya proyek jalan tol. Sejak tahun 2017 ada saja kejadian. Kok setiap tahun begini?” ungkap Syaikh.

Dalam catatan Syaikh, sejak bulan Oktober 2017 hingga 2019 proyek jalan tol di beberapa tempat mengalami kecelakaan konstruksi. Di antaranya Tol Pemalang-Batang, Tol Pasuruan-Probolinggo, Tol Becakayu, Tol Desari yang mengalami dua kali ambruk dan Tol BORR. Sebagian besar dari kecelakaan proyek tol tersebut dikerjakan oleh PT. Waskita Karya.

Dari daftar kecelakaan yang tercatat ini saja, sudah terjadi 7 kecelakaan besar dalam kurun waktu 3 tahun. Artinya sejak 2017, dapat dikatakan setiap tahun Pemerintah belum pernah mencatatkan clean sheet terhadap kecelakaan konstruksi jalan tol. Belum lagi jika dihitung kecelakaan akibat konstruksi proyek-proyek Pemerintah lainnya, seperti meledaknya pipa Pertamina akibat proyek kereta cepat Jakarta - Bandung.

“Ini harus segera dilakukan evaluasi. Bentuk tim investigasi,” tegas Syaikh.

Diketahui kontraktor proyek Jalan Tol Cibitung-Cilincing adalah PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP). Kecelakaan terjadi pada saat melakukan pekerjaan pengecoran. Beberapa pekerja yang mengalami luka ringan sudah dibawa ke RS Citra Harapan Indah Bekasi untuk mendapatkan perawatan.

Syaikh meminta kepada seluruh stakeholder yang terlibat dalam proyek-proyek konstruksi besar, agar memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan (K3). Syaikh juga mendorong kepada Pemerintah untuk meningkatkan pengawasan.

“Standar K3 harus betul-betul diterapkan. Pengawasan oleh pemerintah juga perlu ditingkatkan,” kata Syaikh.

Syaikh mendesak agar Pemerintah segera menginvestigasi peristiwa kecelakaan ini secara cepat, tuntas dan transparan.

“Ungkap bagaimana prosedur dijalankan, seharusnya dalam waktu singkat akan segera diketahui penyebab dan siapa yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut,” ujar Syaikh.

Selain itu, Anggota Komisi V DPR itu juga meminta agar Pemerintah memberikan sanksi kepada Penyedia Jasa jika terbukti bersalah. Payung hukumnya Pasal 52 dan Pasal 96 Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

“Berikan sanksi jika hasil investigasi terbukti kesalahan ada pada Penyedia Jasa,” tegas Syaikh. 🗨️

1. <https://fraksi.pks.id/2020/08/18/proyek-jalan-tol-cibitung-cilincing-ambruk-aleg-pks-kok-setiap-tahun-begini/>
2. <http://inionline.id/2020/08/proyek-jalan-tol-cibitung-cilincing-ambruk-pks-kok-setiap-tahun-begini/>
3. <https://www.mediagaruda.co.id/2020/08/18/proyek-jalan-tol-cibitung-cilincing-ambruk-pks-kok-setiap-tahun-begini/>
4. <http://jurnalbabel.com/2020/08/proyek-jalan-tol-cibitung-cilincing-ambruk-pks-kok-setiap-tahun-begini/>
5. <https://radarbekasi.id/2020/08/18/proyek-jalan-tol-cibitung-cilincing-ambruk-pks-kok-setiap-tahun-begini/>
6. <https://www.radiosuarabekasi.com/berita-seputar-bekasi-raya/nasional/7437-proyek-jalan-tol-cibitung-cilincing-ambruk-pks-kok-setiap-tahun-begini>
7. <https://jabarnews.com/read/89982/proyek-jalan-tol-cibitung-cilincing-ambruk-ini-komentar-syaikhu>
8. Ahmad Syaikhu Soroti Proyek Jalan Tol Cibitung-Cilincing Ambruk, Kok Setiap Tahun Begini?: <https://www.inijabar.com/2020/08/ahmad-syaikhu-soroti-proyek-jalan-tol.html>
9. <https://tvberita.co.id/news/konstruksi-jalan-tol-ambruk-lagi-ahmad-syaikhu-heran/>
10. <https://www.aksaraneews.co.id/2020/08/proyek-jalan-tol-cibitung-cilincing.html>
11. <http://www.transparannews.id/nasional/proyek-jalan-tol-cibitung-cilincing-ambruk-pks-kok-setiap-tahun-begini/>
12. <http://www.wajahbekasi.com/2020/08/proyek-jalan-tol-cibitung-cilincing.html>
13. <https://spikabupaten/>
15. <http://aksi.id/artikel/58417/Gelar-Dengar-Pendapat-Masyarakat-Ahmad-Syaikhu-Pertemuan-Akademisi-Anggota-Legislatif-dan-Kepala-Desa-di-3-Kabupaten/#.Xz54Lp3UZ-4.whatsapp>



Gelar Dengar Pendapat Masyarakat, Syaikhu Pertemuan Akademisi, Aleg dan Kepala Desa di Tiga Kabupaten

Anggota Badan Pengkajian (BP) MPR RI Ahmad Syaikhu menggelar Dengar Pendapat Masyarakat (DPM) di Klari, Karawang, Jawa Barat, Kamis (20/8). Anggota Legislatif dan Kepala Desa dari tiga kabupaten, yakni Bekasi, Karawang dan Purwakarta hadir. Dipertemukan dengan Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IPB, Dr. Sofyan Sjaf.

DALAM sambutannya, Syaikhu mengaku tertarik dengan fakta yang diungkap oleh Dr. Sofyan terkait belum akuratnya data desa.

“Pekan lalu saya bertemu beliau dalam acara BP MPR. Lalu Dr. Sofyan mengungkap soal akurasi data desa yang masih jauh dari fakta,” ujar Syaikh.

Menurut Syaikh, hal itu membuat dia berinisiatif mempertemukan Dr. Sofyan dengan kepala desa di dapilnya, yaitu Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta.

“Saya undang kepala desa dan dipertemukan dengan Dr. Sofyan untuk berdiskusi di forum DPM MPR,” kata Syaikh.

Mantan Wakil Walikota Bekasi itu berharap, dengan acara ini, akan terbangun kesadaran untuk membangun desa berbasis data.

“Tujuannya agar ada kesadaran banyak pihak untuk membangun desa berdasarkan data yang presisi,” harap Syaikh.

Sementara itu, Dr. Sofyan mengungkap ada 57,7 persen data desa yang masih tidak akurat. Ini membuat banyak kesalahan dalam perencanaan program pembangunan di desa. “Jumlah data yang tidak akurat sangat besar, yakni 57,7 persen. Ini berdampak pada pembangunan di desa,” ujar Dr. Sofyan.

Dia mengingatkan, kesalahan data semacam ini berpengaruh pada pembangunan nasional secara keseluruhan. “Ini pengaruhnya tak cuma di desa. Tapi juga secara nasional,” ungkapnya.

Terkait hal itu, Syaikh berharap agar ada perbaikan soal data. Tujuannya untuk menghindari ketidaktepatan program pembangunan.

“Ini harus segera dibenahi dan diperbaiki. Pertemuan DPM semacam ini jadi penting sebagai langkah awal,” pungkash Syaikh. 🍀

1. <https://radarbekasi.id/2020/08/20/dpm-syaikhu-pertemuan-akademisi-aleg-dan-kades-di-tiga-kabupaten/>
2. <http://www.dakta.com/news/25579/serap-pendapat-syaikhu-pertemuan-akademisi-aleg-dan-kades-di-dapilnya>
3. <https://bekasiguide.com/2020/08/20/gelar-dengar-pendapat-masyarakat-syaikhu-pertemuan-akademisi-aleg-dan-kepala-desa-di-tiga-kabupaten/>
4. <http://kabarakyat.com/gelar-dengar-pendapat-syaikhu-pertemuan-akademisi-aleg-dan-kepala-desa-di-tiga-kabupaten-di-jabar/>
5. <http://inionline.id/2020/08/gelar-dengar-pendapat-masyarakat-syaikhu-pertemuan-akademisi-aleg-dan-kepala-desa-di-tiga-kabupaten/>
6. <http://bisnistoday.co.id/pembangunan-desa-belum-berbasis-data-akurat/>
7. <http://jurnalbabel.com/2020/08/gelar-dengar-pendapat-masyarakat-syaikhu-pertemuan-akademisi-aleg-dan-kepala-desa-di-tiga-kabupaten/>
8. <https://jabarnews.com/read/90100/syaikhu-pertemuan-akademisi-aleg-dan-kepala-desa-di-tiga-kabupaten-ada-apa>
9. <https://www.wartasidik.co.id/index.php/2020/08/20/gelar-dengar-pendapat-masyarakat-syaikhu-pertemuan-akademisi-aleg-dan-kepala-desa-di-tiga-kabupaten/>
10. <https://www.aksaranews.co.id/2020/08/gelar-dengar-pendapat-masyarakat.html>
11. <https://www.radiosuarabekasi.com/berita-seputar-bekasi-roya/nasional/7439-gelar-dengar-pendapat-masyarakat-syaikhu-pertemuan-akademisi-aleg-dan-kepala-desa-di-tiga-kabupaten>
12. <https://www.matapers-indonesia.com/dir/blog/2020/08/20/gelar-dengar-pendapat-masyarakat-syaikhu-pertemuan-akademisi-aleg-dan-kepala-desa-di-tiga-kabupaten/>
13. <https://infobekasi.co.id/2020/08/20/gelar-dengar-pendapat-masyarakat-syaikhu-pertemuan-akademisi-aleg-dan-kades-di-3-kabupaten/>
14. <http://aksi.id/artikel/58417/Gelar-Dengar-Pendapat-Masyarakat-Ahmad-Syaikhu-Pertemuan-Akademisi-Anggota-Legislatif-dan-Kepala-Desa-di-3-Kabupaten/#.Xz54Lp3UZ-4.whatsapp>



Bersama Bupati Karawang, Syaikh Serahkan Alsintan kepada Masyarakat Desa Mekar Asih

Anggota DPR RI Ahmad Syaikh menyerahkan bantuan alat-alat mesin pertanian (alsintan) kepada masyarakat di Desa Mekar Asih, Kecamatan Banyusari, Karawang, Rabu, (26/8).

DALAM acara itu, Syaikh didampingi oleh Bupati Karawang Celica Nurachdiana, Kepala Dinas, Camat Banyusari, 12 Kepala Desa dan aparaturnya serta tokoh masyarakat setempat.

Menurut Syaikh, bantuan alsintan ini wujud kepedulian terhadap masyarakat Karawang. Politisi PKS itu berharap alsintan akan bermanfaat optimal untuk meningkatkan pro-

duktivitas para petani.

“Ini wujud kepedulian saya terhadap para petani. Saya berharap ini akan dapat meningkatkan produktivitas hasil tani,” ujar Syaikh.

Anggota Komisi V DPR itu mengingatkan soal keberadaan Karawang sebagai lumbung padi nasional. Status ini harus dipertahankan dengan cara merawat dan menjaga serta memaksimalkan alsintan yang diberikan.

“Keberadaan Karawang sebagai lumbung padi nasional harus dipertahankan. Karena itu alsintan yang ada perlu dijaga bersama,” kata Syaikh.

Sementara itu, Bupati Karawang mengucapkan terimakasih atas bantuan alsintan yang merupakan perjuangan dari Ahmad Syaikh.

”

“Ustadz Syaikh orang baik. Beliau guru dan orangtua saya. Banyak perhatian kepada masyarakat Karawang, termasuk bantu alsintan ini. Terimakasih Pak Ustadz,” ungkap Celica.

“

“Ustadz Syaikh orang baik. Beliau guru dan orangtua saya. Banyak perhatian kepada masyarakat Karawang, termasuk bantu alsintan ini. Terimakasih Pak Ustadz,” ungkap Celica.

Alsintan diberikan kepada lima kelompok tani yang ada di Kecamatan Banyusari. Alsintan terdiri dari Hansprayer 5 Unit, Traktor R2 2 Unit dan pompa air 13 unit.

Syaikh berkomitmen untuk kembali memberikan bantuan alsintan agar petani Karawang sejahtera.

“Insya Allah akan saya perjuangkan. Mohon doanya,” pungkas Syaikh. 🍀

1. <http://ahmadsyaikh.com/2020/08/27/bersama-bupati-karawang-syaikh-serahkan-alsintan-kepada-masyarakat-desa-mekar-asih/>
2. <https://fraksi.pks.id/2020/08/27/bersama-bupati-karawang-syaikh-serahkan-alsintan-pada-masyarakat-desa-mekar-asih/>
3. <https://radarbekasi.id/2020/08/27/bersama-bupati-karawang-syaikh-serahkan-alsintan-ke-masyarakat-desa-mekar-asih/>
4. <https://bekasiguide.com/2020/08/27/bersama-bupati-karawang-syaikh-serahkan-alsintan-kepada-masyarakat-desa-mekar-asih/>
5. <https://www.inijabar.com/2020/08/syaikh-serahkan-alsintan-pada-warga.html>
6. <http://www.transparannews.id/nasional/bersama-bupati-karawang-syaikh-serahkan-alsintan-kepada-masyarakat-desa-mekar-asih/>
7. <https://kesatu.co/didampingi-bupati-karawang-syaikh-serahkan-alsintan-di-desa-mekar-asih/>
8. <https://jabarnews.com/read/90468/ini-bentuk-perhatian-ahmad-syaikh-kepada-petani-di-karawang>
9. <https://bisnistoday.co.id/dorong-produktifitas-pertanian-warga-karawang-terima-bantuan-alsintan/>

10. <https://www.wartakini.co/2020/08/bersama-bupati-karawang-syaikhu-serahkan-alsintan-kepada-masyarakat-desa-mekar-asih/>
11. <https://www.mediagaruda.co.id/2020/08/27/bersama-bupati-karawang-syaikhu-serahkan-alsintan-kepada-masyarakat-desa-mekar-asih/>
12. <https://toptime.co.id/bersama-bupati-karawang-syaikhu-serahkan-alsintan-kepada-masyarakat-desa-mekar-asih/>
13. <https://www.matapers-indonesia.com/dir/blog/2020/08/27/bersama-bupati-karawang-syaikhu-serahkan-alsintan-kepada-masyarakat-desa-mekar-asih/>
14. <http://editorpublik.com/2020/08/27/bersama-bupati-karawang-syaikhu-serahkan-alsintan-kepada-masyarakat/>
15. <http://inionline.id/2020/08/bersama-bupati-karawang-syaikhu-serahkan-alsintan-kepada-masyarakat-desa-mekar-asih/>
16. <https://www.gibasnews.com/2020/08/ahmad-syaikhu-anggota-dpr-ri-karawang.html>
17. <https://www.aksaranews.co.id/2020/08/bersama-bupati-karawang-syaikhu.html>
18. <https://go.shr.lc/2YBWu4b>
19. <https://spiritnews.co.id/2020/08/27/syaikhu-serahkan-alsintan-kepada-masyarakat-desa-mekar-asih/>
20. <https://m.suarakarya.id/detail/117718/Masyarakat-Desa-Mekar-Asih-Dapat-Bantuan-Alsintan>
21. <http://aksi.id/artikel/58607/Bersama-Bupati-Karawang-Anggota-DPR-Ahmad-Syaikhu-Serahkan-Alat-Mesin-Pertanian-kepada-Masyarakat-Desa-Mekar-Asih/#.X0d787gKXjM.whatsapp>
22. <http://www.wajahbekasi.com/2020/08/bersama-bupati-karawang-syaikhu.html>



PKS: Jalur Khusus di Jalan Tol Bahayakan Pesepeda

Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi jalur bagi pesepeda di jalan tol, mendapat tanggapan dari Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikh. Menurutnya, usulan tersebut tidak tepat karena akan membahayakan pesepeda dan pengguna jalan tol.

“TIDAK tepat rencana membuka jalan tol untuk pesepeda. Itu justru akan membahayakan keselamatan pesepeda,” ujar Syaikh.

Seperti diberitakan, Anies mengirimkan surat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk membuka Tol Lingkar Dalam Jakarta (Cawang-Tanjung Priok) sisi barat untuk jalur sepeda.

Ini guna mengakomodir pengguna sepeda setiap hari Minggu pukul 06.00-09.00 WIB.

Anies mengusulkan itu dalam upaya menyetatkan warga DKI dan menjamin keselamatan warga dalam bersepeda, agar tidak bercampur dengan kendaraan bermotor.

Namun demikian pemberian ijin tersebut tidaklah mudah. Sebab pada UU No.38 tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 53 ayat 1 disebutkan bahwa "Jalan tol hanya diperuntukkan bagi pengguna jalan yang menggunakan kendaraan bermotor". Walaupun pada ayat 3 disebutkan pula bahwa "Penggunaan jalan tol selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan persetujuan Pemerintah".

Politisi PKS itu menjelaskan, penggunaan jalan tol layang untuk sepeda sangat berbahaya karena adanya terpaan angin kencang dari sisi kanan, kiri, depan bahkan belakang. Kondisi ini bisa membuat pesepeda kehilangan keseimbangan. Sehingga dapat berakibat fatal yakni terjatuh atau tidak bisa mengendalikan sepedanya.

"Angin itu datang dari berbagai penjuru. Jika sedang bertiup kencang, maka berpotensi membuat pesepeda oleng atau hilang keseimbangan," kata Syaikh.

Selain itu, penggunaan jalan tol bagi pesepeda yang setiap hari minggu, dikhawatirkan mengganggu pengguna jalan tol. Mereka sudah membayar kewajibannya, namun haknya dikurangi karena ada penerapan *contraflow* akibat dari penutupan sementara pada satu jalur jalan tol tersebut.

"Jelas ini akan merugikan pengguna jalan tol. Padahal mereka sudah membayar," ujar Syaikh lagi.

Sebenarnya, lanjut Syaikh, pengaturan terkait jalur khusus sepeda di jalan umum sudah ada dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terdapat

pada pasal 25, 45, 62, dan 106 UU tersebut. Sehingga jika jalur sepeda yang ada saat ini masih dirasa kurang memadai, dengan aturan yang ada tersebut, Pemerintah dapat memanfaatkan jalan umum bagi kenyamanan dan keselamatan pengguna sepeda.

“UU Nomor 22 Tahun 2009 bisa jadi payung hukum yang tepat untuk memberikan jalur khusus pesepeda di jalur utama,” ungkap Syaikhu.

Jika faktor pemandangan menjadi pertimbangan utama, maka ada beberapa ruas jalan layang non tol yang dapat jadi pilihan, yakni Jalan Layang Non Tol Antasari dan Casablanca. Keduanya dapat digunakan untuk jalur khusus bersepeda pada waktu tertentu, sehingga tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jalan tol dan tidak mengurangi hak pengguna jalan tol.

“Jalan Layang Non Tol Antasari dan Casablanca bisa jadi opsi jika pertimbangannya adalah pemandangan indah bagi pesepeda,” saran Syaikhu. 🍃

”

“Jalan Layang Non Tol Antasari dan Casablanca bisa jadi opsi jika pertimbangannya adalah pemandangan indah bagi pesepeda,” saran Syaikhu.

“

1. <http://ahmadsyaikhu.com/2020/08/27/pks-jalur-khusus-di-jalan-tol-bahayakan-pesepeda/>
2. <https://fraksi.pks.id/2020/08/27/aleg-pks-jalur-khusus-di-jalan-tol-bahayakan-pesepeda/>
3. <http://jurnalbabel.com/2020/08/jalur-khusus-di-jalan-tol-bahayakan-pesepeda/>
4. PKS: Jalur Khusus di Jalan Tol Bahayakan Pesepeda <https://www.wartakini.co/2020/08/pks-jalur-khusus-di-jalan-tol-bahayakan-pesepeda/>
5. <https://spiritnews.co.id/2020/08/27/pks-jalur-khusus-di-jalan-tol-bahayakan-pesepeda/>
6. Syaikhu: Jalur Khusus di Jalan Tol Bahayakan Pesepeda
6. <https://www.mediagaruda.co.id/2020/08/27/syaikhu-jalur-khusus-di-jalan-tol-bahayakan-pesepeda/>
7. <https://www.radarcirebon.id/nasional/jalur-khusus-di-jalan-tol-bahayakan-pesepeda/>
8. <https://www.wartakini.co/2020/08/pks-jalur-khusus-di-jalan-tol-bahayakan-pesepeda/>
9. PKS: Jalur Khusus di Jalan Tol Bahayakan Pesepeda <http://aksi.id/artikel/58617/PKS-Jalur-Khusus-di-Jalan-Tol-Bahayakan-Pesepeda/#.X0d7zjDu7tg.whatsapp>
10. <https://tvberita.co.id/news/rencana-pemberian-jalur-pesepeda-diprotas-ahmad-syaikhu/>
11. Legislator: Jalur Khusus di Jalan Tol Bahayakan Pesepeda | Republika Online - <https://republika.co.id/share/qfpu7p428>
12. <https://poskota.co.id/2020/8/27/dpr-jalur-khusus-sepeda-di-jalan-tol-bahayakan-pengendaranya>

Ahmad Syaikh: Jangan Berkerumun, Mari Berhimpun!

BEKASI.PKS.ID – Ketua DPP PKS Wilayah Dakwah Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat (Banjabar), H. Ahmad Syaikh hadir sebagai pembicara utama dalam Training Orientasi DPC PKS Bekasi Barat, Ahad (30/8/2020) kemarin.

DALAM kegiatan pengenalan partai kepada anggota baru yang dilakukan secara daring (*online*) tersebut, Ahmad Syaikh tampil dengan presentasi berjudul, “Peran Umat dalam Politik Nasional: dari Berkerumun jadi Berhimpun.”

Pertama, Anggota Komisi V DPR RI ini menganalisis peran politik umat dalam kancah politik nasional. Ia melihatnya seperti *roller coaster*. Naik turun! *Up and down!*

“Tapi jika lebih jernih menatapnya, maka yang tampak sesungguhnya adalah pemandangan orang yang sedang berkerumun mendorong mobil mogok. Usai mobil itu berjalan, para pendorongnya pun ditinggalkan,” kata Ahmad Syaikh.

Sampai sini, pertanyaan pun muncul. Mengapa kita tidak bersatu? “Kita tak mau bersatu karena gemar berkerumun dibandingkan berhimpun.”

Ia mencontohkan peristiwa kebakaran, kecelakaan atau perampokan. Dalam sekejap, biasanya orang-orang akan mendatangi tempat peristiwa untuk mencari tahu. Semakin lama maka jumlahnya akan semakin besar. Kerumunan besar akan tercipta, namun hanya akan bertahan dalam waktu

singkat. Setelah mengetahui apa yang sedang terjadi, maka kerumunan akan sirna. Orang-orang akan pergi kembali ke rumahnya masing-masing.

Kerumunan, kata Ahmad Syaikh, menyisakan begitu banyak persoalan.

Pertama, kerumunan terdiri dari orang-orang yang memiliki latar belakang berbeda: kepentingan, kelompok, golongan, ideologi dan sebagainya. Karenanya kerumunan bersifat cair dan tak mengikat. Semuanya bisa datang dan pergi.

Kedua, agendanya bersifat jangka pendek/ad hoc. Kerumunan orang yang melihat peristiwa kebakaran hanya melihat peristiwa sesaat. Agendanya jangka pendek yaitu mencari tahu apa yang terjadi. Tak ada agenda jangka panjang atau menengah. Tak ada keinginan menganalisis penyebab dan mencari solusi agar tidak terulang.

Ketiga, kerumunan tak memiliki ikatan emosional dan spiritualitas. Karenanya kerumunan akan sangat mudah dipecah belah untuk kemudian tercerai berai.

Keempat, kerumunan tak memiliki pemimpin. Akibatnya sebuah kerumunan tak pernah beraturan.

Kerumunan seperti ini, kata Ahmad Syaikh kerap dipertontonkan menjelang pemilihan umum. Biasanya akan mendukung satu pasangan, setelah itu bubar jalan. Agendanya singkat dan tak berkelanjutan. Sifatnya sangat pragmatis, tidak sistematis dan strategis. "Kita hanya akan disibukan dari satu isu ke isu lain. Tak memiliki platform atau blue print memajukan umat."

Ia menekankan, kerumunan seperti ini hanya akan membuat posisi umat terpinggirkan. Tak bisa masuk ke pusat kekuasaan. Hanya mampu berteriak keras di jalan, di

bundaran HI, di halaman gedung DPR, depan istana negara, tanpa mampu mempengaruhi kebijakan.

Kalaupun ada tokoh atau partai yang dianggap sebagai representasi umat, tetapi jumlahnya tak signifikan. Lebih menyedihkan lagi, sudah jumlahnya sedikit lalu asyik Masyuk dengan agendanya masing-masing.

Kondisi seperti ini mengingatkan Ahmad Syaikh pada sabda Nabi Muhammad SAW tentang kondisi umat Islam yang akan menjadi mayoritas tetapi seperti buih yang terombang-ambing tak berdaya.

Solusi dari permasalahan ini, papar Ahmad Syaikh, bisa berubah dengan syarat umat meninggalkan hobi berkerumun dan beralih ke berhimpun. Hal ini bisa diawali oleh para pemimpin umat. "Mari berhimpun dalam barisan."

Sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat Ash Shaf ayat 4, "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh."

Syaikh menambahkan, "Salah satu tempat berhimpun ya bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera. Partai ini punya sistem kaderisasi yang baik sehingga kondusif untuk saling mengingatkan dalam kebenaran, kesabaran dan kasih sayang. Selamat bergabung..." 🍀



Tarif Tol Cipularang dan Padaleunyi Naik, Syaikhul: Tunda, Waktunya Tidak Tepat!

Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhul meminta pemerintah menunda kenaikan tarif dua ruas jalan tol. Yakni Cikampek-Purwakarta-Padalarang (Cipularang) dan Padalarang-Cileunyi (Padaleunyi).

MENURUT Politisi PKS itu, kenaikan kedua jalan tol tersebut jelas tidak tepat waktunya. Pasalnya saat ini kondisi rakyat sedang susah akibat pandemi Covid-19.

“Tunda, tidak bisa tidak. Sebab waktunya tidak tepat karena rakyat sedang susah,” ujar Syaikhul.

Seperti diketahui, pemerintah akan menaikkan kedua ruas jalan tol di atas mulai 5 September 2020 pukul 00.00 WIB. Hal ini diketahui melalui Keputusan Menteri

Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 1128/KPTS/M/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol Cikampek - Purwakarta - Padalarang dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 1116/KPTS/M/2020 tanggal 26 juni 2020 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol Padalarang - Cileunyi.

Sama seperti kenaikan tol Balmera pada bulan Agustus lalu, tarif tol pada ruas ini juga mengalami penyederhanaan menjadi 3 golongan saja. Karena penyederhanaan ini, maka konsekuensinya sangat berat bagi sektor UMKM yang kebanyakan menggunakan truk-truk kecil.

Pada ruas tol Cipularang, kenaikan tarif tol untuk kendaraan Golongan I sebesar 20,16% dari Rp 59.500,- menjadi Rp 71.500,- dan Golongan IV naik sebesar 4,02% dari Rp 99.500,- menjadi Rp 103.500,-.

Sedangkan untuk kendaraan Golongan V yang merupakan truk-truk besar milik korporasi, justru mengalami penurunan sebesar 13,02% dari Rp 119.000,- menjadi Rp 103.500,-.

“Melihat aturan pemerintah, jelas ada ketidakadilan juga. Kenaikan tarif tol memukul rakyat kecil yang ada di sektor UMKM,” tegas Syaikh.

Kondisi ini, tambah Syaikh, sama saja dengan memperlebar jurang ketidakadilan. Dalam situasi ekonomi sekarang ini, seharusnya Pemerintah memberikan insentif pada UMKM yang sudah sangat terpukul. Bukan menaikkan tarif tol.

Apalagi kondisi ekonomi Indonesia saat ini sedang merosot dan menuju jurang resesi. Berdasarkan data yang dirilis pemerintah, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal

II-2020 mengalami penurunan hingga -5,32%. Dengan adanya kenaikan tarif tol, ini tentu akan meningkatkan biaya logistik. Akibatnya, UMKM yang menggunakan jalan tol untuk pengiriman barangnya akan terpengaruh dan bukan tidak mungkin, akan mendorong kenaikan harga barang dan ujung-ujungnya menjadi beban baru bagi masyarakat.

“Efeknya akan berantai. Tarif tol naik, harga barang naik dan pada akhirnya akan jadi beban baru masyarakat,” kata Syaikh.

Mantan Wakil Walikota Bekasi itu memberikan solusi. Pemerintah harus merevisi UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang sedang dibahas oleh Komisi V., F-PKS mengusulkan agar kriteria kenaikan tarif tol harus memperhatikan faktor pertumbuhan ekonomi dan juga daya beli masyarakat.

Atas dasar tersebut dan dengan mempertimbangkan bahwa operator jalan tol merupakan BUMN yang mayoritas dimiliki oleh Pemerintah sendiri, maka FPKS menghimbau agar Pemerintah menunda kenaikan tarif tol sampai pertumbuhan ekonomi kembali naik dan stabil serta daya beli masyarakat pulih kembali.

“Saya tegaskan kembali, harus ditunda sampai ekonomi membaik,” pungkas Syaikh. 🗨️

1. <https://fraksi.pks.id/2020/09/03/tarif-tol-cipularang-dan-padaleunyi-naik-syaikh-tunda-waktunya-tidak-tepat/>
2. <https://www.wartakini.co/2020/09/tarif-tol-cipularang-dan-padaleunyi-naik-syaikh-tunda-waktunya-tidak-tepat/>
3. <http://beritatrans.com/2020/09/03/tarif-tol-cipularang-dan-padaleunyi-naik-syaikh-tunda-waktunya-tidak-tepat/>
4. <http://jurnalbabel.com/2020/09/dpr-minta-pemerintah-tunda-kenaikan-tarif-tol-cipularang-dan-padaleunyi/>
5. <https://www.mediagaruda.co.id/2020/09/03/tarif-tol-cipularang-dan-padaleunyi-naik-syaikh-tunda-waktunya-tidak-tepat/>

6. <https://www.inijabar.com/2020/09/duh-tarif-tol-padalarang-dan.html>
7. <http://editorpublik.com/2020/09/03/ahmad-syaikhu-minta-pemerintah-tunda-kenaikan-tarif-tol-cipularang-dan-padaleunyi/>
8. <http://bisnistoday.co.id/syaikhu-tunda-kenaikan-tarif-tol-cipularang-waktunya-tak-tepat/>
9. <https://radarbekasi.id/2020/09/03/syaikhu-waktunya-tidak-tepat-tunda-dulu/>
10. <https://www.aksaranews.co.id/2020/09/tarif-tol-cipularang-dan-padaleunyi.html>
11. <http://inionline.id/2020/09/tarif-tol-cipularang-dan-padaleunyi-naik-syaikhu-tunda-waktunya-tidak-tepat/>
12. <https://jabar.siberindo.co/03/09/2020/syaikhu-minta-kenaikan-tarif-tol-cipularang-dan-padaleunyi-ditunda/>
13. <https://www.berdaulat.id/tarif-tol-cipularang-dan-padaleunyi-naik-syaikhu-tunda-waktunya-tidak-tepat/>
14. <https://republika.co.id/berita/qg2ijb396/legislator-tunda-kenaikan-tarif-tol-di-masa-pandemi>
15. <https://tvberita.co.id/news/tarif-tol-cipularang-dan-padaleunyi-naik-syaikhu-tunda-waktunya-tidak-tepat/>
16. <https://www.luwuk.today/tarif-tol-cipularang-dan-padaleunyi-naik-syaikhu-tunda-waktunya-tidak-tepat/>
17. <https://teropongindonesia.com/2020/09/komisi-v-dpr-ri-minta-pemerintah-tunda-kenaikan-tarif-tol-cipularang-dan-padaleunyi/>
18. <https://www.gibasnews.com/2020/09/terkait-tarif-tol-cipularang-dan.html>
19. <https://spiritnews.co.id/2020/09/03/tarif-tol-cipularang-dan-padaleunyi-naik-syaikhu-tunda-waktunya-tidak-tepat/>
20. <https://www.matapers-indonesia.com/dir/blog/2020/09/03/tarif-tol-cipularang-dan-padaleunyi-naik-syaikhu-tunda-waktunya-tidak-tepat/>
21. <https://bekasiguide.com/2020/09/03/tarif-tol-cipularang-dan-padaleunyi-naik-syaikhu-tunda-waktunya-tidak-tepat/>
22. <http://www.jurnalbandung.com/tarif-tol-cipularang-dan-padaleunyi-naik-syaikhu-tunda-waktunya-tidak-tepat/>
23. <https://medialingkar.com/tarif-tol-cipularang-dan-padaleunyi-naik-syaikhu-tunda-waktunya-tidak-tepat/>
24. <https://bumnwatch.blogspot.com/2020/09/pks-menilai-kenaikan-tol-padaleunyi.html>



Nggak Ditindak, ODOL Tetap Marak

LAW Enforcement! Dua kata itu menjadi kunci bagi pemberantasan beroperasinya truk over dimension over load (ODOL). Tanpa adanya penindakan tegas maka truk ODOL akan tetap marak. Ada kesan truk ODOL dibiarkan walaupun mengakibatkan lebih cepatnya kerusakan jalan dan menimbulkan kecelakaan fatal lalu lintas.

DEMIKIAN kesimpulan BeritaTrans.com dan Aksi dari diskusi secara terpisah dengan anggota Komisi V DPR Ahmad

Syaikhu, pengamat kebijakan publik dan konsumen Agus Pambagio, Perkumpulan Perusahaan Multimoda Transport Indonesia (Indonesian Multimodal Transport Association/IMTA) Kyatmaja Lookman, serta akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat Djoko Setijowarno.

Menurut anggota legislatif Ahmad Syaikhu, tanpa penindakan tegas oleh Polri, Kementerian Perhubungan (Kemenuh) dan Pemerintah Daerah (Pemda) maka truk ODOL akan tetap beroperasi. “Kelemahannya memang di-*law enforcement*. Truk ODOL terkesan dibiarkan,” ujarnya, Senin (31/8/2020).

Karenanya, dia mendesak Polri, Kemenuh dan Pemda untuk berkoordinasi dan bersinergi untuk membuat agenda bersama menindak ODOL secara berkesinambungan. “Bahkan melibatkan Kementerian PUPR dan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT),” tegasnya.

Sementara itu, Agus Pambagio mensinyalir dibiarkannya truk ODOL beroperasi karena menjadi lumbung uang untuk oknum tertentu. “Tidak peduli telah menyebabkan kerusakan jalan sehingga perbaikannya setiap tahun puluhan triliun rupiah dan juga menyebabkan kecelakaan fatal, truk ODOL dibiarkan beroperasi karena antara lain ada pungutan liar (pungli), yang bikin gemuk oknum tertentu dan preman,” cetusnya.

Belakangan, dia menuturkan adalah aneh sikap pemerintah yang memperpanjang toleransi waktu truk ODOL beroperasi dengan alasan akan mengganggu pasokan logistik dan memberi kesempatan operator truk memperbarui armada. “Jadi bagaimana mau ditindak kalau satu sisi menjadi mesin duit bagi oknum, lalu pada sisi lain pemerintah juga

melonggarkan toleransi truk ODOL beroperasi. Padahal omong kosong truk ODOL dapat diberantas kalau nggak ada penegakan hukum,” ujarnya.

Mantan pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) itu juga mengungkapkan tidak hanya milik perusahaan swasta, termasuk pengusaha kelapa sawit dan batubara, truk ODOL juga dioperasikan oleh sejumlah perusahaan BUMN. “Ngeri kan kalau BUMN saja memberi contoh buruk. Belum lagi bila perusahaan sawit dan batubara itu milik pengusaha besar dan orang-orang tertentu, yang memiliki pengaruh dalam pemerintahan,” tuturnya.

Terhadap keberadaan truk ODOL dari pabrikan, Agus menyoroti perizinan kendaraan itu untuk diimpor dan dipasarkan di dalam negeri. “Tetap diberi izin walau tahu spek teknis truk itu tidak sesuai dengan kemampuan jalan di Indonesia. Selain itu, ban keras juga diizinkan dijual dan dipakai di Indonesia,” ujarnya.

Karena itu, dia menegaskan tidak perlu ada lagi riset atau diskusi tentang memberantas truk ODOL sepanjang tidak ada penegakan hukum secara berkelanjutan di lapangan.

Tentang maraknya truk ODOL, Kyatmaja Lookman mengemukakan muncul karena terjadi persaingan sangat ketat di antara operator truk untuk mendapatkan atau mempertahankan market. “Itu yang menyebabkan pengusaha angkutan memuat melebihi kapasitas. Kebetulan truknya kuat. Ditambah lagi pengawasan dan penindakan tidak ketat,” ungkap mantan pengurus DPP Aprindo tersebut.

Dia memperkirakan 80 persen truk cenderung ODOL. Kalau saja penindakan tegas ditegakkan maka jumlah truk itu akan menurun drastis. Salah satu penindakannya adalah dengan mencontoh Jerman, truk yang melebihi dimensi harus

dipotong begitu ditangkap. Bagi kendaraan, yang melebihi batas muatan maka langsung ditahan dan wajib kir ulang. “Di Indonesia, baru penindakan bagi truk melebihi muatan maka sebagian muatan diturunkan,” ujarnya.

Kyatmaja menuturkan di Indonesia perlu terus-menerus operasi gabungan. Penindakan tegas di jembatan timbang dan jalan. “Kendaraan harus ditahan sepanjang belum selesai persidangan tilangnya. Selama ini, truk ODOL ditilang tetapi tetap masih bisa beroperasi. Dendanya juga relatif ringan. Paling hanya Rp200.000,” ungkapnya.

Untuk menekan jumlah truk ODOL, bahkan truk beroperasi di jalan, dia mengutarakan IMTA mendorong penggunaan kereta dan kapal ro-ro. “Memang masih harus menggunakan truk, tetapi hanya dalam jarak pendek yakni dari dan ke pelabuhan atau stasiun kereta,” jelasnya.

Pelanggaran dalam bentuk truk ODOL, Djoko Setijowarno mengemukakan sebaiknya tidak sekadar tilang, tetapi juga mengenakan hukum pidana. “Ada efek jera terhadap operator truk dan pemilik barang dengan pengenaan pasal pidana,” tegasnya.

Djoko Setijowatno mengemukakan penindakan juga harus tegas terhadap pelanggaran oleh petugas kir dan petugas jembatan timbang. “Jadi dibereskan juga di hulunya. Tidak sekadar di hilir,” ujarnya. 🍏



Kunjungan Kerja, Syaikh Tinjau Bangunan SMKN 1 Babelan yang Mangkrak

Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu meninjau bangunan SMKN 1 Babelan, Kabupaten Bekasi yang mangkrak, Jum'at (4/9). Kegiatan ini dalam rangka Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil).

POLITISI PKS itu tiba di lokasi sekitar pukul 08.30 WIB. Untuk menuju SMKN 1, jalan tanah berlubang dan bergelombang harus dilalui sejauh 2 Km.

Begitu tiba, Syaikhu segera menuju bangunan yang mangkrak. Gedung tersebut terdiri dari 6 kelas. Kondisi bangunan baru sebatas tembok dan rangka atap.

“Ini sudah berapa lama? Mengapa bisa seperti ini? Apa masalahnya?” Tanya Syaikh kepada Kepala SMKN 1 Saparudin.

“Bangunan ini telah terbengkalai 5 tahun, Pak. Kontraktornya meninggalkan begitu saja,” jawab Saparudin.

Usai itu, Syaikh berdialog dengan pihak-pihak terkait di aula. Hadir Kepala Cabang Dinas (KCD) Casmadi, Anggota F-PKS DPRD Kabupaten Bekasi Ani Rukmini, Saparudin, Komite Sekolah, guru dan tokoh masyarakat setempat.

“Saya mengibaratkan situasi mangkrak ini seperti begini. Minta ke ayah ditolak. Minta ke ibu tidak diberikan,” kata Syaikh.

Mantan Wakil Walikota Bekasi itu melihat belum ada kejelasan soal status bangunan yang mangkrak. Seharusnya sudah jadi wewenang provinsi. Namun mungkin karena masa transisi dari kabupaten ke provinsi, sehingga ini belum tuntas.

“Saya coba perjuangkan ini. Menanyakan kepada Pemprov Jawa Barat apakah bisa selesaikan ini. Jika tidak, maka akan saya sampaikan ke Pusat,” jelas Syaikh.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) itu berharap, fasilitas pendidikan harus diprioritaskan. Sebab ini kunci membangun bangsa dan negara.

“Fasilitas pendidikan harus jadi prioritas. Itu jika kita serius ingin mencerdaskan dan membangun bangsa ini,” tegas Syaikh. ☺

1. <http://ahmadsyaikhu.com/2020/09/04/kunjungan-kerja-syaikhu-tinjau-bangunan-smkn-1-babelan-yang-mangkrak/>
2. <https://fraksi.pks.id/2020/09/05/kunjungan-kerja-syaikhu-tinjau-bangunan-smkn-1-babelan-yang-mangkrak/>
3. <https://www.wartakini.co/2020/09/kundapil-syaikhu-tinjau-bangunan-smkn-1-babelan-yang-mangkrak/>
4. <https://www.aksaranews.co.id/2020/09/kunjungan-kerja-suamiku-tinjau-bangunan.html>
5. <https://www.inijabar.com/2020/09/syaikhu-minta-disdik-jabar-selesaikan.html>
6. <https://bekasiguide.com/2020/09/05/syaikhu-tinjau-bangunan-smkn-1-babelan-yang-mangkrak/>
7. <https://www.mediagaruda.co.id/2020/09/05/kunjungan-kerja-syaikhu-tinjau-bangunan-smkn-1-babelan-yang-mangkrak/>
8. <https://radarbekasi.id/2020/09/05/smkn-1-babelan-mangkrak-syaikhu-pertanyakan-kesiapan-pemprov-jabar/>
9. <http://editorpublik.com/2020/09/05/pembangunan-mangkrak-syaikhu-kunjungi-smkn-1-babelan-bekasi/>
10. <http://www.transparannews.id/bekasi/kunjungan-kerja-syaikhu-tinjau-bangunan-smkn-1-babelan-yang-mangkrak/>
11. <https://jabarnews.com/read/90963/syaikhu-tinjau-bangunan-smkn-1-babelan-yang-mangkrak>
12. <http://bisnistoday.co.id/syaikhu-minta-pembangunan-smkn-1-babelan-dilanjutkan/>
13. <http://aksi.id/mobile/artikel/58935/Anggota-DPR-Ahmad-Syaikhu-Tinjau-Bangunan-SMKN-1-Babelan-Bekasi-yang-Mangkrak/>
14. <https://medialingkar.com/kunjungan-kerja-syaikhu-tinjau-bangunan-smkn-1-babelan-bekasi-yang-mangkrak/>
15. <http://inionline.id/2020/09/kunjungan-kerja-syaikhu-tinjau-bangunan-smkn-1-babelan-bekasi-yang-mangkrak/>



Syaikhu Hadirkan Barista dalam Sosialisasi 4 Pilar MPR di Pesantren Annihayah, Karawang

Anggota Badan Pengkajian (BP) MPR Ahmad Syaikhu melakukan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI, Sabtu, (5/9). Uniknya, acara yang berlangsung di Pesantren Annihayah, Rawa Merta, Karawang itu juga dihadiri Barista atau Peracik Kopi.

SYAIKHU menjadi pembicara bersama Wakil Ketua MPR Dr. Hidayat Nur Wahid. Dalam kesempatan itu, Hidayat meminta agar bangsa ini tidak melupakan ‘jas merah’ dan ‘jas hijau’.

“Kita jangan meninggalkan jasa para pahlawan atau ‘jas merah’. Juga jangan menghilangkan jasa para ulama atau ‘jas

hijau”, ungkap Hidayat.

Sementara itu, Syaikhul mengingatkan tentang banyaknya agenda keumatan yang harus terus dikawal di parlemen. Salah satunya Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

“Kita hampir kecolongan dengan RUU HIP. Karena Pancasila mau diperas menjadi Trisila dan Ekasila,” ungkap Syaikhul.

Selain itu, tambah Syaikhul, TAP MPRS No. XXV Tahun 1966 tidak dijadikan konsideran atau pertimbangan dalam RUU HIP.

“Padahal TAP MPRS ini isinya pembubaran PKI dan pelanggaran komunisme, Lenisisme dan Marxisme,” jelas Syaikhul.

Politisi PKS itu mengajak para santri dan kyai yang hadir dalam acara itu, untuk peduli dengan isu-isu semacam ini.

“Kita ini harus percaya diri karena kemerdekaan bangsa hasil perjuangan kyai dan santri. Karena itu isu-isu semacam RUU HIP harus diawasi,” kata Syaikhul.

”

“Kita hampir kecolongan dengan RUU HIP. Karena Pancasila mau diperas menjadi Trisila dan Ekasila,” ungkap Syaikhul.

“

Acara ini unik, sebab menghadirkan dua barista. Keduanya membuat kopi untuk para peserta yang berjumlah sekitar 200 orang. Dalam waktu singkat, kopi racikan kedua barista tersebut habis, karena memang nikmatnya beda.

Syaikhu sempat berseloroh mengomentari nikmatnya kopi yang dibuat oleh barista tersebut “kopi yang nikmat itu digiling bukan digunting”. ☺

1. <http://ahmadnyaikhu.com/2020/09/05/syaikhu-hadirkan-barista-dalam-sosialisasi-4-pilar-mpr-di-pesantren-annihayah-karawang/>
2. <https://www.mediagaruda.co.id/2020/09/06/syaikhu-hadirkan-barista-dalam-sosialisasi-4-pilar-mpr-di-pesantren-annihayah-karawang/>
3. <https://www.wartakini.co/2020/09/sosialisasi-4-pilar-mpr-di-pesantren-annihayah-karawang-syaikhu-hadirkan-barista/>
4. <https://radarbekasi.id/2020/09/06/begini-sosialisasi-4-pilar-yang-bikin-nikmat/>
5. <http://inonline.id/2020/09/syaikhu-hadirkan-barista-dalam-sosialisasi-4-pilar-mpr-di-pesantren-annihayah-karawang/>
6. <https://www.aksaraneews.co.id/2020/09/syaikhu-hadirkan-barista-dalam.html>
7. <http://www.transparannews.id/nasional/syaikhu-hadirkan-barista-dalam-sosialisasi-4-pilar-mpr-di-pesantren-annihayah/>
8. <https://spiritnews.co.id/2020/09/06/sosialisasi-4-pilar-mpr-syaikhu-hadirkan-barista/>

PKS Minta Kemenhub Tunda Husein Sastranegara menjadi Bandara Domestik

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan 8 bandara internasional diubah menjadi bandara domestik, salah satunya Husein Sastranegara, Bandung. Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikh meminta rencana ini ditunda.

ADA beberapa alasan yang Syaikh paparkan. *Pertama*, penurunan status menjadi bandara domestik dipastikan akan memberi dampak kurang baik bagi pariwisata di Jabar, khususnya Bandung Raya.

“Pasti akan ada penurunan. Sebab selama ini banyak maskapai penerbangan yang mengangkut wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke Kota Bandung sebagai destinasi wisata favorit di Jabar,” ungkap Syaikh.

Politisi PKS itu menambahkan, salah satu yang akan terdampak adalah penjualan pakaian di Pasar Baru. Pasalnya tempat ini telah menjadi salah satu destinasi wisata belanja bagi warga Malaysia. Saking banyaknya, mata uang Ringgit Malaysia jadi alat pembayaran.

Kedua, belum siapnya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Selama aksesibilitas Kertajati ke Bandung Raya belum ada, wisata ke Bandung Raya akan menurun tajam. Kecuali jika nanti Tol Cisumdawu sudah bisa beroperasi, akan memangkas waktu tempuh Kertajati ke Bandung Raya.

“Bandara Internasional Kertajati belum siap jadi peng-

ganti. Sebab akses ke sana masih belum memadai,” kata Syaikh.

Data menunjukkan, sebelum BIJB beroperasi, volume penumpang melalui Husein Sastranegara mencapai 300.000 per bulan (Juni). Setelah BIJB beroperasi, volume penumpang menurun tinggal 114.000-an. Meski demikian, pergerakan wisman yang melalui bandara Husein ternyata rata-rata masih 4.000 per hari. Bahkan, jumlahnya lebih banyak dibanding BIJB Kertajati yang hanya 2.000 orang per hari.

“Jika Bandara Husein hanya menjadi bandara domestik, maka dampaknya tidak hanya ke pariwisata, tapi ekonomi juga,” tegas Syaikh.

Ketiga, ditinjau dari segi peraturan, dalam Permenhub No. 39 Tahun 2019 tentang Tatanan kebandarudaraan Nasional, pada Pasal 16 Ayat 1 poin c disebutkan bahwa penetapan bandar udara internasional mempertimbangkan pertumbuhan dan perkembangan pariwisata. Pada poin d, kepentingan dan kemampuan angkutan udara nasional. Dan pada poin e, pengembangan ekonomi nasional dan perdagangan luar negeri. Dalam hal ini, Bandara Husein Sastranegara masih memenuhi kualifikasi tersebut.

“Dari sisi peraturan, Bandara Husein masih memenuhi ketentuan,” ujar mantan Wakil Walikota Bekasi itu.

Melihat hal ini, Syaikh berpendapat bahwa penurunan status Bandara Husein Sastranegara menjadi bandara domestik belum saatnya dilakukan. Ini mengingat masih kurangnya sarana penghubung dari BIJB Kertajati ke daerah Bandung Raya.

“Saya tegaskan, tunda penurunan status ini agar masyarakat tidak semakin terpuruk ekonominya, terutama di masa pandemi ini,” kata Syaikh. 🗨️

1. <http://ahmadsyaikhu.com/2020/09/06/pks-minta-kemenhub-tunda-husein-sastranegara-menjadi-bandara-domestik/>
2. <https://fraksi.pks.id/2020/09/06/legislator-pks-minta-kemenhub-tunda-husein-sastranegara-jadi-bandara-domestik/>
3. <http://www.transparannews.id/nasional/pks-minta-kemenhub-tunda-husein-sastranegara-menjadi-bandara-domestik/>
4. <https://medialingkar.com/pks-minta-kemenhub-tunda-husein-sastranegara-menjadi-bandara-domestik/>
5. <http://beritatrans.com/2020/09/06/pks-minta-kemenhub-tunda-husein-sastranegara-menjadi-bandara-domestik/>
6. <https://www.mediagaruda.co.id/2020/09/06/syaikhu-minta-kemenhub-tunda-turunkan-status-bandara-husein-sastranegara-jadi-bandara-domestik/>
7. <https://www.wartakini.co/2020/09/pks-minta-kemenhub-tunda-husein-sastranegara-menjadi-bandara-domestik/>
8. <http://inionline.id/2020/09/pks-minta-kemenhub-tunda-husein-sastranegara-menjadi-bandara-domestik/>
9. <http://jurnalbabel.com/2020/09/dpr-minta-kemenhub-tunda-husein-sastranegara-jadi-bandara-domestik/>
10. <http://bisnistoday.co.id/tinjau-ulang-husein-sastranegara-jadi-bandara-domestik/>
11. <https://nasional.sindonews.com/read/156326/15/husein-sastranegara-bakal-diubah-jadi-bandara-domestik-syaikhu-tunda-dulu-1599440999>
12. <https://bumnwatch.blogspot.com/2020/09/pks-minta-kemenhub-tunda-husein.html>
13. <https://poskota.co.id/2020/9/7/kemenhub-diminta-tunda-husein-sastranegara-jadi-bandara-domestik>
14. <https://spiritnews.co.id/2020/09/07/pks-minta-kemenhub-tunda-husein-sastranegara-menjadi-bandara-domestik/>
15. <https://www.tagar.id/kementerian-perhubungan-soal-status-bandara-bandung>

Kebahagiaan Anggota DPR Saat Aspirasinya Didengar...

Apa kebahagiaan seorang Anggota DPR? Bagi saya, ketika aspirasi yang disuarakannya didengar oleh Pembuat Kebijakan.

KAMIS, 3 September lalu, secara khusus saya membuat rilis ke berbagai media. Isinya memprotes rencana pemerintah menaikkan Tarif Tol Cipularang-Padaleunyi.

Secara tegas saya sampaikan bahwa rencana kenaikan tersebut sangat tidak tepat waktu. Mengapa? Sebab kondisi saat ini terasa begitu berat bagi masyarakat dari sisi ekonomi.

Pandemi Corona yang semula hanya krisis kesehatan, tapi berubah menjadi masalah ekonomi. Banyak orang di-PHK. Banyak juga perusahaan bangkrut. Daya beli menurun. Ekonomi kita bahkan minus 5,32 persen. Resesi di ambang pintu.

Rakyat dalam kondisi susah. Bahkan teramat susah. Lalu tiba-tiba Kementerian PUPR berencana menaikkan tarif Tol Cipularang-Padaleunyi. Sungguh tidak berempati sama sekali.

Ironisnya, rencana kenaikan tersebut justru berpotensi memukul sektor UMKM. Begini penjelasannya.

Rencananya pemerintah akan menaikkan kedua ruas jalan tol di atas mulai 5 September 2020 pukul 00.00 WIB. Hal ini diketahui melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 1128/KPTS/M/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol Cikampek - Purwakarta - Padalarang dan Keputusan Menteri

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 1116/KPTS/M/2020 tanggal 26 juni 2020 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol Padalarang - Cileunyi.

Sama seperti kenaikan tol Balmera pada bulan Agustus lalu, tarif tol pada ruas ini juga mengalami penyederhanaan menjadi 3 golongan saja. Karena penyederhanaan ini, maka konsekuensinya sangat berat bagi sektor UMKM yang kebanyakan menggunakan truk-truk kecil.

Pada ruas tol Cipularang, kenaikan tarif tol untuk kendaraan Golongan I sebesar 20,16% dari Rp 59.500,- menjadi Rp 71.500,- dan Golongan IV naik sebesar 4,02% dari Rp 99.500,- menjadi Rp 103.500,-.

Sedangkan untuk kendaraan Golongan V yang merupakan truk-truk besar milik korporasi, justru mengalami penurunan sebesar 13,02% dari Rp 119.000,- menjadi Rp 103.500,-.

Melihat aturan pemerintah, jelas ada ketidakadilan juga. Kenaikan tarif tol memukul rakyat kecil yang ada di sektor UMKM.

Karena itu, ketika kabar adanya penundaan kenaikan tarif tol dimaksud, saya merasa bahagia. Secara khusus saya memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR yang telah menunda ini.

Insya Allah, dengan dukungan dan doa masyarakat, saya akan terus 'berteriak' sekeras mungkin menyuarakan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Sebab itulah tugas utama saya sebagai Wakil Rakyat. 🙏

1. <http://ahmadsyaikhu.com/2020/09/08/kebahagiaan-anggota-dpr-saat-aspirasinya-didengar/>
2. <https://bumnwatch.blogspot.com/2020/09/kebahagiaan-anggota-dpr-saat.html>

3. <https://www.wartakini.co/2020/09/kebahagiaan-anggota-dpr-saat-aspirasinya-didengar/>
4. <http://bisnistoday.co.id/kebahagiaan-anggota-dpr-saat-aspirasinya-didengar/>
5. <http://inionline.id/2020/09/kebahagiaan-anggota-dpr-saat-aspirasinya-didengar/>
6. <https://www.aksaraneews.co.id/2020/09/kebahagiaan-anggota-dpr-saat.html>
7. <https://radarbekasi.id/2020/09/08/kebahagiaan-anggota-dpr-saat-aspirasinya-didengar/>
8. <http://www.transparannews.id/nasional/kebahagiaan-anggota-dpr-saat-aspirasinya-didengar/>
9. <https://jabarnews.com/read/91136/kebahagiaan-anggota-dpr-saat-aspirasinya-didengar>
10. <http://aksi.id/artikel/59045/Ahmad-Syaikhu-Girang-Aspirasi-Soal-Penundaan-Tarif-Tol-Didengar/#.X1c8Ye4H6dw.whatsapp>
11. <https://medialingkar.com/kebahagiaan-anggota-dpr-saat-aspirasinya-didengar/>

”

**Insy Allah,
dengan dukungan dan doa
masyarakat, saya akan terus
'berteriak' sekeras mungkin
menyuarakan aspirasi yang
berkembang di masyarakat.
Sebab itulah tugas utama
saya sebagai Wakil Rakyat.**

“



Kementerian PUPR akan Normalisasi Kali Bekasi dan Pembangunan Bendung Cibeet, Syaikhul: Terimakasih, Ini Sesuai Aspirasi

Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhul memberikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dia menyampaikan itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa, (8/9).

ANGGOTA F-PKS DPR itu mengucapkan terimakasih karena Kementerian PUPR melalui Dirjen Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) berencana melakukan normalisasi Kali Bekasi dan pembangunan bendung Cibeet, Karawang, Jawa Barat.

“Saya mengapresiasi pada Dirjen PSDA yang sudah menganggarkan untuk penanganan Kali Bekasi dan bendung Cibeet untuk penanggulangan banjir di Bekasi dan Karawang. Terimakasih,” ujar Syaikhu.

Menurut Syaikhu, ini sesuai dengan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepadanya pada saat reses. Kemudian Syaikhu suarakan kepada pihak-pihak terkait.

“Sebelum pandemi saya reses ke Karangligar, Karawang. Masyarakat kebanjiran. Dan surutnya bisa berbulan-bulan,” ungkap Syaikhu.

Pada kesempatan itu, masyarakat menyampaikan aspirasinya. Yakni membuat bendungan dan normalisasi Kali Cibeet yang ada di perbatasan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bogor.

Diberitakan, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane atau BBWSCC Kementerian PUPR akan menormalisasi Kali Bekasi sepanjang 11 kilometer mulai akhir tahun ini.

“Rencana pengerjaannya 36 bulan atau 3 tahun,” kata Kepala BBWSCC, Bambang Heri Mulyono.

Ia menuturkan, desain normalisasi telah siap, yaitu penguatan tanggul dengan borpile di bagian bawah lalu dinding parapet sebagai tanggul atas. Tahap pertama alokasi dana dari Kementerian PUPR sebesar Rp 600 miliar. “Akhir tahun ini akan dimulai pengerjaannya,” kata Bambang.

Syaikhu berharap, program ini akan menjadi solusi bagi masyarakat kota dan kabupaten Bekasi.

“Semoga ini jadi solusi tepat sehingga banjir bisa diatasi,” harap Syaikhu.

Dalam RDP itu, Syaikhu juga menyampaikan aspirasi lain yang ada di dapilnya, yakni Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta.

“Mohon perhatian untuk perbaikan irigasi dan ketersediaan air di Kecamatan Majalaya Karawang, yang pada musim hujan saja seringkali tidak mendapatkan air,” kata Syaikh.

“Mohon dimasukkan juga kegiatan penanggulangan banjir dan rob Pantura, dan kegiatan pengaman pantai di pantai utara Cemarajaya Karawang,” ujar Syaikh lagi.

Kepada Pak Dirjen Perumahan, Syaikh menyepakati agar anggaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dinaikkan dari Rp 17,5 juta menjadi Rp 20 juta.

“Mohon dinaikkan anggarannya. Agar lebih layak dan menyesuaikan dengan inflasi tanpa harus mengurangi kuantitasnya,” kata Syaikh.

Dia juga meminta dialokasikan BSPS untuk korban banjir dan rob Cemarajaya, Karawang. Jumlahnya sebanyak 200 unit atau pembangunan Rusunawa.

Terakhir, Syaikh minta Dirjen Cipta Karya membantu ketersediaan cakupan air.

“Mohon dapat membantu ketersediaan cakupan air di Bekasi, Karawang dan Purwakarta,” pungkasnya. 🗨️

”

“Mohon dinaikkan anggarannya. Agar lebih layak dan menyesuaikan dengan inflasi tanpa harus mengurangi kuantitasnya,” kata Syaikh.

“

1. <http://ahmadsyaikhu.com/2020/09/09/kementerian-pupr-akan-normalisasi-kali-bekasi-dan-bangun-bendungan-cibeet-syaikhu-terimakasih-ini-sesuai-aspirasi/>
2. <https://fraksi.pks.id/2020/09/09/kemenpupr-akan-normalisasi-kali-bekasi-dan-bangun-bendungan-cibeet-syaikhu-terimakasih-sesuai-aspirasi/>
3. <https://www.wartakini.co/2020/09/kementerian-pupr-segera-normalisasi-kali-bekasi-dan-pembangunan-bendung-cibeet-syaikhu-terimakasih-ini-sesuai-aspirasi/>
4. <http://inionline.id/2020/09/kementerian-pupr-akan-normalisasi-kali-bekasi-dan-pembangunan-bendung-cibeet-syaikhu-terimakasih-ini-sesuai-aspirasi/>
5. <https://bumnwatch.blogspot.com/2020/09/pks-apresiasi-kementerian-pupr-karena.html>
6. <https://jabarnews.com/read/91190/syaikhu-terima-kasih-kementerian-pupr-sudah-wujudkan-aspirasi-masyarakat>
7. <https://www.mediagaruda.co.id/2020/09/09/kementerian-pupr-akan-normalisasi-kali-bekasi-dan-pembangunan-bendung-cibeet-syaikhu-terimakasih-ini-sesuai-aspirasi/>
8. <https://radarbekasi.id/2020/09/09/syaikhu-terima-kasih-ini-sesuai-aspirasi/>
9. <https://www.aksaranews.co.id/2020/09/kementrian-pupr-akan-normalisasi-kali.html>
10. <https://tvberita.co.id/news/syaikhu-apresiasi-langkah-kementerian-pupr/>
11. <https://tvberita.co.id/news/syaikhu-apresiasi-langkah-kementerian-pupr/>
12. <http://aksi.id/artikel/59075/Kementerian-PUPR-akan-Normalisasi-Kali-Bekasi-dan-Pembangunan-Bendung-Cibeet-Ahmad-Syaikhu-Terimakasih-Ini-Sesuai-Aspirasi/#.X1hvAkTEFvk.whatsapp>
13. <https://www.transparannews.id/nasional/kementerian-pupr-akan-normalisasi-kali-bekasi-dan-pembangunan-bendung-cibeet-syaikhu-terimakasih-ini-sesuai-aspirasi/>
14. <https://m.suarakarya.id/detail/118476/Syaikhu-Apresiasi-Kemen-PUPR-Normalisasi-Kali-Bekasi-Dan-Bendung-Cibeet>



Syaikhu Pertanyakan Tingginya Angka Kecelakaan kepada Dirjen Perkeretaapian

Tingginya angka kecelakaan kereta api pada lintasan sebidang mendapat sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu.

DIA mempertanyakan hal itu kepada Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Zulkifli saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), di Gedung Parlemen, Senayan, Kamis, (10/9).

Menurut Syaikhu, kecelakaan pada lintasan sebidang kerap terjadi khususnya di daerah-daerah padat seperti Karawang-Bekasi. Tahun 2019 lalu, Kereta api Argo Parahyangan menabrak kendaraan bus Argo Mas, di perlintasan

KM 67 Klari, Kabupaten Karawang, pada Senin (26/8/2019).

“Saya belum melihat dalam paparan bapak belum ada soal mengatasi hal ini,” kata Syaikh.

Politisi PKS itu meminta agar Kemenhub segera melakukan tindakan untuk mengurangi angka kecelakaan. Sebab, berdasarkan data, selama tahun 2019 telah terjadi 260 kali kecelakaan yang mengakibatkan 76 nyawa melayang pada perlintasan kereta api (KA) sebidang. Lalu tahun sebelumnya, terjadi 395 kecelakaan yang menyebabkan 245 orang luka berat sampai meninggal dunia. Total, selama dua tahun telah terjadi 655 kecelakaan.

“Mohon dipertimbangkan untuk mengurangi angka kecelakaan. Khususnya daerah padat yang akan dibuat *double-double track*, dimana waktu antara satu kereta dengan kereta lainnya semakin pendek, dengan membuat fly over, underpass atau palang pintu pada perlintasan sebidang” ujar Syaikh.

Mantan Wakil Walikota Bekasi itu perlu mempertanyakan hal ini, sebab setiap tahun jumlah pengguna jasa transportasi kereta api terus mengalami peningkatan. Tercatat, pada tahun 2018 jumlah penumpang kereta api tercatat sebanyak 425 juta penumpang. Sedangkan di tahun 2019 jumlahnya mencapai angka 432 juta penumpang.

“Jumlah pengguna jasa yang terus meningkat ini harus diimbangi dengan tingkat kenyamanan, keamanan dan keselamatan yang juga membaik,” tegas Syaikh. 🌟

1. <http://ahmadsyaikhu.com/2020/09/11/syaikhu-pertanyakan-tingginya-angka-kecelakaan-kepada-dirjen-perkeretaapian/>
2. <https://fraksi.pks.id/2020/09/11/syaikhu-pertanyakan-tingginya-angka-kecelakaan-kereta-api-pada-lintasan-sebidang/>
3. <https://www.wartakini.co/2020/09/syaikhu-pertanyakan-tingginya-angka-kecelakaan-kepada-dirjen-perkeretaapian/>
4. <https://www.berdaulat.id/politisi-pks-ini-pertanyakan-tingginya-angka-kecelakaan-kepada-dirjen-perkeretaapian/>
5. <https://medialingkar.com/syaikhu-pertanyakan-tingginya-angka-kecelakaan-kepada-dirjen-perkeretaapian/>
6. <http://inionline.id/2020/09/syaikhu-pertanyakan-tingginya-angka-kecelakaan-kepada-dirjen-perkeretaapian/>
7. <https://radarbekasi.id/2020/09/11/syaikhu-pertanyakan-tingginya-angka-kecelakaan-kepada-dirjen-perkeretaapian/>
8. <http://aksi.id/artikel/59153/Anggota-DPR-Ahmad-Syaikhu-Pertanyakan-Tingginya-Angka-Kecelakaan-kepada-Dirjen-Perkeretaapian/#.X1r2du8XbY.whatsapp>
9. <http://jurnalbabel.com/2020/09/syaikhu-pertanyakan-tingginya-angka-kecelakaan-kepada-dirjen-perkeretaapian/>
10. <https://www.transparannews.id/nasional/syaikhu-pertanyakan-tingginya-angka-kecelakaan-kepada-dirjen-perkeretaapian/>
11. <https://www.aksaraneews.co.id/2020/09/syaikhu-pertanyakan-tingginya-angka.html>
12. <https://jabarnews.com/read/91343/syaikhu-soroti-tingginya-angka-kecelakaan-kereta-api>



RDP dengan Dirjen Bina Konstruksi, Syaikhul Sampaikan Evaluasi dan Dukungan Sekolah Vokasi

Anggota DPR RI Ahmad Syaikhul menyampaikan evaluasi terhadap seringnya terjadi kecelakaan konstruksi pembangunan jalan tol. Dia juga memberikan dukungan terhadap rencana pendirian Sekolah Vokasi Konstruksi.

HAL itu disampaikan Syaikhul saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (9/9).

Syaikhul memaparkan data tentang kecelakaan proyek jalan tol. Hampir setiap tahun ada masalah dengan konstruksi.

“Dari tahun 2017 hingga 2019 ada saja kecelakaan konstruksi. Ini kan harus kita evaluasi secara menyeluruh dan mendalam,” ujar Syaikh.

Politisi PKS itu menambahkan, daftar kecelakaan proyek jalan tol antara lain

Pemalang-Batang, Pasuruan-Probolinggo, Becakayu, Desari yang mengalami dua kali ambruk dan BORR. Terakhir, Seksi IV Cibitung - Cilincing.

“Saya berharap, Dirjen Bina Konstruksi lebih *powerful* lagi dalam proses penilaian pengadaan barang dan jasa serta pengawasan yang lebih ketat lagi dalam pelaksanaan konstruksi,” tegas Syaikh.

Diharapkan, dengan cara itu akan meminimalisir kecelakaan konstruksi dengan menguatkan Standar K3 (Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan).

“Kita ingin kecelakaan sejenis berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali, *zero accident*” harap Syaikh.

Mantan Wakil Walikota Bekasi itu memahami, mengatasi masalah ini memang tidak mudah. Salah satu kuncinya adalah kompetensi SDM. Oleh karena itu, mencetak SDM yang berkompeten menjadi suatu tuntutan yang mutlak.

“Ini kuncinya. Mencetak SDM kompeten. Dari pengadaan barang dan jasa, sistem manajemen keselamatan konstruksi, hingga pencegahan korupsi dan fraud. Di sinilah peran vital Dirjen Bina Konstruksi,” ungkap Syaikh.

Oleh karena itu, Syaikh mendukung Program Sekolah Vokasi Konstruksi. Tujuannya agar ada penguatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan.

“Saya dukung penuh sekolah ini. Agar SDM konstruksi lebih kompeten sehingga bisa mengatasi masalah kecelakaan pembangunan tol dan lainnya,” tegas Syaikh. 🗨️

1. <http://ahmadsyaikhu.com/2020/09/10/rdp-dengan-dirjen-bina-konstruksi-syaikhu-sampaikan-evaluasi-dan-dukung-sekolah-vokasi/>
2. <https://fraksi.pks.id/2020/09/10/rdp-dengan-dirjen-bina-konstruksi-syaikhu-sampaikan-evaluasi/>
3. <https://www.wartakini.co/2020/09/rdp-bersana-dirjen-bina-konstruksi-syaikhu-sampaikan-evaluasi-dan-dukungan-sekolah-vokasi/>
4. <https://www.mediagaruda.co.id/2020/09/10/rdp-dengan-dirjen-bina-konstruksi-syaikhu-sampaikan-evaluasi-dan-dukungan-sekolah-vokasi/>
5. <http://bisnistoday.co.id/dewan-dukung-pendirian-sekolah-vokasi-konstruksi/>
6. <https://www.aksaraneews.co.id/2020/09/rdp-dengan-bina-konstruksi-syaikhu.html>
7. <https://www.inijabar.com/2020/09/syaikhu-penting-mencetak-sdm-kompeten.html>
8. <https://bumnwatch.blogspot.com/2020/09/syaikhu-evaluasi-sekaligus-dukung.html>
9. <http://inionline.id/2020/09/rdp-dengan-dirjen-bina-konstruksi-syaikhu-sampaikan-evaluasi-dan-dukungan-sekolah-vokasi/>
10. <https://radarbekasi.id/2020/09/10/evaluasi-dan-dukung-sekolah-vokasi/>
11. <https://www.berdaulat.id/dalam-rapat-politisi-pks-sampaikan-evaluasi-dan-dukungan-sekolah-vokasi/>
12. <http://jurnalbabel.com/2020/09/rdp-dengan-dirjen-bina-konstruksi-syaikhu-sampaikan-evaluasi-dan-dukungan-sekolah-vokasi/>
13. <https://www.transparannews.id/nasional/51175/>
14. <https://m.jabarnews.com/read/91251/minimalisir-kecelakaan-konstruksi-syaikhu-dukungan-pendirian-sekolah-vokasi>
15. <https://medialingkar.com/rdp-dengan-dirjen-bina-konstruksi-syaikhu-sampaikan-evaluasi-dan-dukungan-sekolah-vokasi/>
16. <https://www.matapersindonesia.com/dir/blog/2020/09/10/rdp-dengan-dirjen-bina-konstruksi-syaikhu-sampaikan-evaluasi-dan-dukungan-sekolah-vokasi/>
17. <http://aksi.id/artikel/59115/RDP-dengan-Dirjen-Bina-Konstruksi-Anggota-DPR-Ahmad-Syaikhu-Sampaikan-Evaluasi-dan-Dukungan-Sekolah-Vokasi/#.X1rzgGQdn80.whatsapp>



Bandara Kertajati akan Terhubung Jalan Tol, Syaikh: Ini Sesuai Harapan Kami...

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan konektivitas Jalan Tol Cipali dan Jalan Tol Cisumdawu selesai pada akhir 2021. Program kerja ini digenjot untuk mendukung akses jalan tol bagi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

MENANGGAPI rencana ini, Anggota Komisi V DPR RI mengatakan bahwa hal tersebut sesuai dengan aspirasi dan harapan selama ini.

“Ya Alhamdulillah, ini betul-betul berita gembira karena sesuai harapan kami,” ungkap Syaikh.

Sebelumnya, Syaikh memang mendesak pemerintah untuk secepat mungkin memberikan akses jalan tol ke BIJB. Ini terkait dengan rencana Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang mengusulkan 8 bandara internasional diubah menjadi bandara domestik, salah satunya Husein Sastranegara, Bandung.

Politisi PKS itu minta Kemenhub menunda kebijakan tersebut karena beberapa alasan. *Pertama*, penurunan status menjadi bandara domestik dipastikan akan memberi dampak kurang baik bagi pariwisata di Jabar, khususnya Bandung Raya.

“Pasti akan ada penurunan. Sebab selama ini banyak maskapai penerbangan yang mengangkut wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke Kota Bandung sebagai destinasi wisata favorit di Jabar,” ungkap Syaikh.

Kedua, belum siapnya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Selama aksesibilitas Kertajati ke Bandung Raya belum ada, wisata ke Bandung Raya akan menurun tajam. Kecuali jika nanti Tol Cisumdawu sudah bisa beroperasi, akan memangkas waktu tempuh Kertajati ke Bandung Raya.

“Bandara Internasional Kertajati belum siap jadi pengganti. Sebab akses ke sana masih belum memadai,” kata Syaikh.

Data menunjukkan, sebelum BIJB beroperasi, volume penumpang melalui Husein Sastranegara mencapai 300.000 per bulan (Juni). Setelah BIJB beroperasi, volume penumpang menurun tinggal 114.000-an. Meski demikian, pergerakan wisman yang melalui bandara Husein ternyata rata-rata masih 4.000 per hari. Bahkan, jumlahnya lebih banyak dibanding BIJB Kertajati yang hanya 2.000 orang per hari.

“Jika Bandara Husein hanya menjadi bandara domestik, maka dampaknya tidak hanya ke pariwisata, tapi ekonomi juga,” tegas Syaikh.

Karena itu, rencana pemerintah memberikan akses jalan tol ke BIJB ini seperti angin segar. Secara demikian, BIJB akan mudah diakses dan siap jadi bandara pengganti Husein Sastranegara.

“Ini tentu saja jadi angin segar. Itulah pentingnya koordinasi antar kementerian agar program yang dilaksanakan bisa bermanfaat optimal dan sinergis,” ujar Syaikhu.

Seperti diketahui, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya akan membangun akses jalan tol untuk BIJB Kertajati dari Tol Cipali selama satu tahun ke depan, bersamaan target rampung Jalan Tol Cisumdawu pada akhir 2021. Dengan konektivitas dua jalan tol tersebut, Basuki optimis pengembangan kawasan Kertajati bisa meningkat lebih cepat.

“Dengan rampungnya Jalan Tol Cisumdawu nanti dan tersambung dengan ruas Tol Akses Bandara Kertajati, maka akan mengurangi waktu tempuh dari Bandung dari tiga jam menjadi satu jam,” ujar Menteri Basuki, Senin 7 September 2020.

Kementerian PUPR pada akhir tahun 2020 hingga awal 2021 sudah menyiapkan pembangunan delapan ruas tol baru yang menghubungkan kawasan-kawasan strategis dan pusat-pusat pertumbuhan di Pulau Jawa dan Bali.

Kedelapan ruas tol tersebut dengan total panjang 374 km dan nilai investasi sebesar Rp 100 triliun adalah:

- 1) Tol Solo-Yogyakarta-NYA Kulon Progo 96,57 km;
- 2) Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan 60,1 km;
- 3) Tol Kertajati-Cipali 3,6 km;
- 4) Tol North-South Link Bandung 14,2 km;
- 5) Harbour Road Tanjung Priok-Pluit 8,9 km;
- 6) Tol Jogja-Bawen 75,83 km;
- 7) Tol Gilimanuk-Mengwi 95,22 km;
- dan 8) Tol Kediri-Kertosono 20,3 km. ☑

1. <http://ahmadsyaikhu.com/2020/09/15/bandara-kertajati-akan-terhubung-jalan-tol-syaikhu-ini-sesuai-harapan-kami/>
2. <https://fraksi.pks.id/2020/09/16/bandara-kertajati-akan-terhubung-jalan-tol-syaikhu-sesuai-harapan-kami/>
3. <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30081>
4. https://www.antarane.ws.com/berita/1729242/dpr-apresiasi-target-selesai-akses-tol-bandara-kertajati-pada-2021?utm_medium=mobile
5. <https://www.tribunnews.com/dpr-ri/2020/09/16/ahmad-syaikhu-apresiasi-pupr-dukung-akses-jalan-tol-bandara-kertajati>
6. <https://www.wartakini.co/2020/09/bandara-kertajati-akan-terhubung-jalan-tol-syaikhu-ini-sesuai-harapan-kami/>
7. <http://bisnistoday.co.id/berharap-bandara-kertajati-segera-terhubung-jalan-tol/>
8. <https://www.aksaranews.co.id/2020/09/bandara-kertajati-akan-terhubung-jalan.html>
9. <http://jurnalbabel.com/2020/09/bandara-kertajati-akan-terhubung-jalan-tol-dpr-ini-sesuai-harapan-kami/>
10. <https://radarbekasi.id/2020/09/16/bandara-kertajati-akan-terhubung-tol-syaikhu-sesuai-harapan-kami/>
11. <http://inionline.id/2020/09/bandara-kertajati-akan-terhubung-jalan-tol-syaikhu-ini-sesuai-harapan-kami/>
12. <https://bumnwatch.blogspot.com/2020/09/sesuai-harapan-bandara-kertajati.html>
13. <http://beritatrans.com/2020/09/16/syaikhu-konektivitas-tol-cisumdawu-dengan-cipali-jadi-angin-segar-untuk-bandara-kertajati/>
14. <https://www.transparannews.id/nasional/bandara-kertajati-akan-terhubung-jalan-tol-syaikhu-ini-sesuai-harapan-kami/>
15. <https://www.inijabar.com/2020/09/syaikhu-senang-bakal-terhubungnya-tol.html>
16. <https://pontas.id/2020/09/16/bandara-kertajati-akan-terhubung-jalan-tol-ini-kata-dpr/>
17. <https://kesatu.co/bandara-kertajati-akan-terhubung-jalan-tol-syaikhu-ini-sesuai-harapan/>
18. <https://medialingkar.com/bandara-kertajati-akan-terhubung-jalan-tol-syaikhu-ini-sesuai-harapan-kami/>
19. <https://jakartabanget.id/2020/09/16/dpr-apresiasi-pemerintah-segera-koneksikan-tol-cipali-dan-cisumdawu/>
20. <https://spiritnews.co.id/2020/09/16/bandara-kertajati-akan-terhubung-jalan-tol-syaikhu-ini-sesuai-harapan-kami/>

Alokasi Dana Desa Naik, Syaikhu Minta Kemendes PDTT Lakukan Data Desa Presisi

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menaikkan alokasi dana desa 2021. Kenaikan ini menurut Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu harus diikuti dengan melakukan data desa secara presisi.

PERMINTAAN itu disampaikan Syaikhu setelah mengetahui masih tingginya angka ketidakakuratan terkait data desa. Padahal, kondisi ini membuat rencana pembangunan jadi tidak tepat saat diimplementasikan.

“Saya melihat data desa kita masih jauh dari harapan. Masih tidak presisi atau akurasinya rendah,” ujar Syaikhu.

Politisi PKS itu tidak asal bicara. Dia pernah bertemu Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IPB, Dr. Sofyan Sjaf. Terungkap, ada 57,7 persen data desa yang masih tidak akurat. Ini membuat banyak kesalahan dalam perencanaan program pembangunan di desa. Kesalahan data semacam ini berpengaruh pada pembangunan nasional.

“Data desa yang tidak presisi berdampak pada pembangunan nasional secara keseluruhan,” kata Syaikhu.

Syaikhu juga menjelaskan kunjungan kerjanya ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kamis (17/9). Rencana pembuatan Aerocity, hendaknya disertai dengan membuat dan memberdayakan desa unggulan di sekitar bandara. Desa unggul dalam wisata, kuliner, UMKM,

dan sebagainya. Keunggulan itu perlu dieksplorasi lebih dulu dengan mengetahui potensi desa masing-masing melalui peta desa presisi. Ini bisa jadi proyek percontohan.

“Ada rencana membuat Aerocity di BIJB Kertajati. Agar desa unggulan ini betul-betul optimal keberadaannya, maka harus diketahui potensi desanya dengan peta desa presisi. Kita jadikan proyek percontohan,” papar Syaikhu.

Seperti diberitakan, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan alokasi dana desa pada 2021 senilai Rp72 triliun, naik 1,1 persen dibandingkan tahun ini yang senilai Rp 71,2 triliun.

“Contoh, desa yang kita harapkan atau yang kita tuju adalah desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu 16 September 2020.

Untuk mengentaskan kemiskinan, penggunaan dana desa akan diubah. Para kepala desa hanya perlu mengacu pada 17 Sustainable Development Goals atau (SDGs) atau yang disebut Pembangunan Berkelanjutan.

Syaikhu mengapresiasi kenaikan ini, meski tidak signifikan, hanya 1,1 persen. Dia berharap dana yang tersedia betul-betul difokuskan untuk mewujudkan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.

“Kenaikan ini harus fokus untuk kesejahteraan masyarakat. Sebab itu data desa presisi jadi sangat penting,” tegas mantan Wakil Walikota Bekasi itu. 🍷

1. <http://ahmadsyaikhu.com/2020/09/18/alokasi-dana-desa-naik-syaikhu-minta-kemendes-pdtt-buat-data-desa-presisi/>
2. <https://www.inijabar.com/2020/09/syaikhu-minta-kemendes-pdtt-lakukan.html>
3. <https://www.wartakini.co/2020/09/alokasi-dana-desa-naik-syaikhu-minta-kemendes-pdtt-lakukan-data-desa-presisi/>
4. <https://www.aksaraneews.co.id/2020/09/alokasi-dana-desa-naik-syaikhu-minta.html>
5. <https://www.transparannews.id/nasional/alokasi-dana-desa-naik-syaikhu-minta-kemendes-pdtt-lakukan-data-desa-presisi/>
6. <http://aksi.id/artikel/59419/Alokasi-Dana-Desa-Naik-Anggota-DPR-Ahmad-Syaikhu-Minta-Kemendes-PDPT-Lakukan-Data-Desa-Presisi/#.X2QauUMsj4w.whatsapp>
7. <https://www.berdaulat.id/anggota-dpr-ri-ini-minta-kemendes-pdtt-lakukan-data-desa-presisi/>
8. <https://radarbekasi.id/2020/09/18/syaikhu-akurasi-data-rendah-alokasi-dana-desa-naik/>
9. <https://medialingkar.com/alokasi-dana-desa-naik-syaikhu-minta-kemendes-pdtt-lakukan-data-desa-presisi/>
10. <https://bumnwatch.blogspot.com/2020/09/alokasi-dana-desa-naik-meski-57-tidak.html>
11. <http://inionline.id/2020/09/alokasi-dana-desa-naik-syaikhu-minta-kemendes-pdtt-lakukan-data-desa-presisi/>

”

“Kenaikan ini harus fokus untuk kesejahteraan masyarakat. Sebab itu data desa presisi jadi sangat penting.”

”



Hadapi Tantangan Masa Depan, Syaikhul Ajak Masyarakat Purwakarta Jaga 4 Pilar MPR

Anggota Badan Pengkajian (BP) MPR RI Ahmad Syaikhul mengajak masyarakat Purwakarta untuk menjaga 4 Pilar MPR RI. Ini penting dilakukan guna menghadapi tantangan bangsa dan negara ke depan yang semakin kompleks.

SYAIKHU menyampaikan itu saat Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Desa Bungursari, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (26/9).

Menurut Politisi PKS itu, di masa depan tantangan yang dihadapi tak boleh dianggap remeh. Dari soal globalisasi,

kapitalisme, hedonisme dan sebagainya. Ini semua mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

“Persatuan dan kesatuan kita menghadapi tantangan tak mudah karena dirongrong oleh arus globalisasi, kapitalisme dan hedonisme,” jelas Syaikh.

Saat ini, lanjut Syaikh, begitu mudah kita konflik akibat masalah ekonomi, misinformasi dan SARA. Padahal, kita punya 4 Pilar MPR RI yang jadi pedoman dan pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kita mudah sekali gesekan antar sesama anak bangsa. Keberadaan 4 Pilar MPR seperti terlupakan,” ujar Syaikh.

Karena itu, Syaikh mengajak agar 4 Pilar MPR yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dijaga keberadaannya. Dengan menjaganya, bangsa dan negara akan tetap kokoh dari segala ancaman dan tantangan.

“Kita harus jaga 4 Pilar MPR. Karena itu cara agar kita kokoh sebagai bangsa dan negara,” kata Syaikh.

Hadir dalam acara tersebut tokoh dan masyarakat Purwakarta serta berbagai ormas seperti Laskar Merah Putih dan Gibas. Kegiatan tersebut juga menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19, dari mulai cek suhu, pakai masker, dan jaga jarak. Bahkan, semua peserta mendapatkan perlengkapan seperti sabun, masker dan handsanitizer, untuk tetap taat pada protokol Covid-19 saat acara selesai. 🍀

1. <https://ahmadsyaikh.com/2020/09/26/hadapi-tantangan-masa-depan-syaikh-ajak-masyarakat-purwakarta-jaga-4-pilar-mpr/>
2. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=337888532225522&id=658706284243453
3. <https://www.instagram.com/p/CFn-UzQn3Hs/?igshid=1kk4k3a1mvgfw>
4. https://twitter.com/syaikh_ahmad/status/1310056301355921409?s=19

RS Galang Rusak Dihantam Puting Beliung, Syaikh: Segera Perbaiki dan Investigasi!

Kabar mengejutkan datang dari Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Covid-19 diberitakan rusak akibat hantaman angin puting beliung, Rabu (16/9).

ANGGOTA Komisi V DPR RI Ahmad Syaikh mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera memperbaiki.

“Ini mengejutkan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR harus bertindak cepat dengan memperbaiki fasilitas yang rusak,” ujar Syaikh.

Syaikh mengaku terkejut. Sebab RSKI ini baru dibangun pada Maret lalu. Biaya pembangunannya pun tak sedikit, yakni Rp 400 miliar. Kementerian PUPR menunjuk PT Waskita Karya dan PT Wijaya Karya sebagai pelaksana proyek. Karena itu, Syaikh juga minta dilakukan inverstigasi.

“Baru 5 bulan tapi sudah rusak. Ini harus diinvestigasi. Cari penyebabnya,” tegas Syaikh.

Dengan anggaran sebesar itu, sangat disayangkan jika fasilitas yang ada ternyata mudah rusak. Beberapa kemungkinan yang menjadi penyebabnya. Bisa karena bahan dan pengerjaan yang tidak sesuai standard, atau desain dan perencanaan yang tidak matang, sehingga tidak sesuai dengan kondisi lingkungan.

“Penyebabnya bisa bermacam-macam. Sebab itu sangat

perlu dilakukan investigasi,” kata Syaikhul lagi.

Investigasi mendesak dilakukan, lanjut Syaikhul, agar diketahui tingkat kerusakannya dan apakah berhubungan dengan perencanaan atau pengerjaannya yang kurang baik.

Seperti diberitakan, fasilitas perawatan bagi pasien Covid-19 di RSKI rusak akibat dihantam angin puting beliung. Ada empat ruang perawatan yang mengalami kerusakan cukup parah akibat kebocoran yang terjadi pada ruangan karantina 240. Sehingga ruangan tersebut untuk sementara waktu tidak dapat digunakan dan pasien-pasien yang dirawat dipindahkan ke ruangan lain.

Menurut informasi yang didapatkan, kerusakan pada fasilitas tersebut disebabkan posisi bangunan yang berhadapan dengan alam terbuka, sehingga angin dapat langsung menerjang bangunan tersebut tanpa ada penghalang.

RSKI Covid-19 Pulau Galang mulai dibangun pada 8 Maret 2020 dan resmi dioperasikan pada 6 April 2020. Fasilitas ini diharapkan bisa menjadi persiapan apabila kasus semakin meningkat seperti rumah sakit darurat di Wuhan, China.

Syaikhul berharap, perbaikan bisa cepat dilakukan bersamaan dengan investigasi, karena pandemi saat ini kian mengkhawatirkan. Jumlah kasus positif Covid19 dan tingkat keterpakaian ICU yang terus meningkat hari demi hari. Sehingga bisa jadi, suatu saat fasilitas RSKI Pulau Galang tersebut akan benar-benar dibutuhkan pada saat kapasitas rumah sakit rujukan lainnya penuh.

“Kondisinya mengkhawatirkan. Jadi RSKI harus segera diperbaiki untukantisipasi jika rumah sakit rujukan lainnya sudah penuh,” pungkas Syaikhul. 🍀

1. <http://ahmadsyaikhu.com/2020/09/19/rski-galang-rusak-dihantam-puting-beliung-syaikhu-segera-perbaiki-dan-investigasi/>
2. <https://www.wartakini.co/2020/09/rs-galang-rusak-dihantam-puting-beliung-syaikhu-segera-perbaiki-dan-investigasi/>
3. <http://inonline.id/2020/09/rski-galang-rusak-dihantam-puting-beliung-syaikhu-segera-perbaiki-dan-investigasi/>
4. <https://www.aksaraneews.co.id/2020/09/rs-galang-rusak-dihantam-puting-beliung.html>
5. <https://www.transparannews.id/nasional/rs-galang-rusak-dihantam-puting-beliung-syaikhu-segera-perbaiki-dan-investigasi/>
6. <https://radarbekasi.id/2020/09/19/syaikhu-desak-pupr-perbaiki-dan-investigasi/>
7. <http://aksi.id/artikel/59472/RS-Galang-Rusak-Diterjang-Puting-Beliung-Ahmad-Syaikhu-Segera-Perbaiki-dan-Investigasi/#.X2XUIwzmEIM.whatsapp>
8. <http://jurnalbabel.com/2020/09/dpr-heran-rski-covid-19-batam-baru-dibangun-sudah-rusak-dihantam-puting-beliung/>
9. <https://medialingkar.com/rs-galang-rusak-dihantam-puting-beliung-syaikhu-segera-perbaiki-dan-investigasi/>

”

“Penyebabnya bisa bermacam-macam. Sebab itu sangat perlu dilakukan investigasi,” kata Syaikhu.

”

Syaikhu Dorong Kemenhub Terus Lakukan Revitalisasi Jalur Kereta Api

Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu mengapresiasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang merevitalisasi jalur kereta api (KA) Ciranjang-Cipatat, Jawa Barat. Dia mendorong agar hal tersebut terus dilakukan ke depannya.

MENURUT Syaikhu, langkah Kemenhub ini layak diapresiasi di tengah pandemi Corona saat ini.

“Patut diapresiasi, meski saat ini kondisi sedang sulit tapi Kemenhub masih memperhatikan revitalisasi,” ujar Syaikhu.

Politisi PKS itu melanjutkan, program ini harus terus dilakukan, karena KA merupakan moda transportasi massal yang efektif mengurangi kemacetan. Data dari PT Kereta Api Indonesia, tercatat KA sudah mengangkut 429 juta penumpang dan 47 juta ton barang logistik di seluruh penjurua Sumatera dan Jawa.

“Ini jumlah yang sangat besar. Sebab itu sektor ini tidak boleh diabaikan. Pengaruhnya untuk mengurangi kemacetan cukup signifikan,” kata Syaikhu.

Mantan Wakil Walikota Bekasi itu memaparkan, ada lima keunggulan kereta api: hemat penggunaan ruang, tingkat keselamatan tinggi, tidak macet, hemat energi, dan ramah lingkungan.

“Lima keunggulan kereta api ini tidak dimiliki moda transportasi lainnya. Untuk itu, saya sekali lagi mendorong

agar revitalisasi jalur KA yang tidak aktif terus dilakukan,” jelas Syaikh.

Apalagi jika dalam revitalisasi, pemerintah melibatkan masyarakat setempat melalui program padat karya. Ini akan jadi salah satu solusi mengatasi dampak ekonomi pandemi.

“Pihak Kemenhub bisa buat program padat karya dalam melakukan revitalisasi. Ini bisa jadi solusi atasi dampak ekonomi wabah corona,” tambah Syaikh.

Diberitakan, Kemenhub merevitalisasi jalur KA Ciranjang-Cipatat. Ini merupakan proyek tahap kedua dari tiga tahap reaktivasi jalur KA Cianjur-Padalarang yang berhenti beroperasi sejak 2012 silam.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri menyebut pada tahap kedua ini, anggaran yang dikucurkan dari APBN 2019 sebesar Rp118 miliar untuk peningkatan jalur dengan penggantian rel KA R.33 menjadi R.54. Di samping itu, anggaran juga akan digunakan untuk normalisasi badan jalan guna meningkatkan keselamatan, kenyamanan, aksesibilitas, serta mobilitas masyarakat. 🗣️

”

Pihak Kemenhub bisa buat program padat karya dalam melakukan revitalisasi. Ini bisa jadi solusi atasi dampak ekonomi wabah corona.

“

1. <http://ahmadsyaikhu.com/2020/09/21/syaikhu-dorong-kemenhub-terus-lakukan-revitalisasi-jalur-kereta-api/>
2. <https://republika.co.id/berita/qh1e6g484/komisi-v-dpr-apresiasi-reaktivasi-jalur-ciranjangcipatat>
3. <https://poskota.co.id/2020/09/22/dpr-apresiasi-kemenhub-revitalisasi-jalur-ka-ciranjang-cipatat>
4. <https://www.wartakini.co/2020/09/syaikhu-dorong-kemenhub-terus-lakukan-revitalisasi-jalur-kereta-api/>
5. <https://www.inijabar.com/2020/09/ahmad-syaikhu-minta-kemenhub-terus.html>
6. <http://inionline.id/2020/09/syaikhu-dorong-kemenhub-terus-lakukan-revitalisasi-jalur-kereta-api/>
7. <https://www.transparannews.id/nasional/syaikhu-dorong-kemenhub-terus-lakukan-revitalisasi-jalur-kereta-api/>
8. <https://bumnwatch.blogspot.com/2020/09/pks-dorong-kemenhub-untuk-revitalisasi.html>
9. <https://beritagsmb21.blogspot.com/2020/09/syaikhu-dorong-kemenhub-terus-lakukan.html>
10. <http://jurnalbabel.com/2020/09/dpr-dorong-kemenhub-terus-lakukan-revitalisasi-jalur-kereta-api/>
11. <https://jabarnews.com/read/91933/syaikhu-apresiasi-langkah-kemenhub-lakukan-revitalisasi-jalur-ka>
12. <https://www.aksaranews.co.id/2020/09/syaikhu-dorong-kemenhub-terus-lakukan.html>
13. <https://poskota.co.id/2020/09/22/dpr-apresiasi-kemenhub-revitalisasi-jalur-ka-ciranjang-cipatat>
14. <https://www.gibasnews.com/2020/09/anggota-komisi-v-dpr-ri-ahmad-syaikhu.html>
15. <https://ijn.co.id/legislator-apresiasi-revitalisasi-jalur-ka-ciranjang-cipatat/#.X2m1wzKkNcA.whatsapp>
16. <http://bisnistoday.co.id/kemenhub-diminta-terus-lakukan-revitalisasi-jalur-kereta-api/>
17. <https://infobekasi.co.id/2020/09/22/syaikhu-dorong-kemenhub-terus-lakukan-revitalisasi-jalur-kereta-api/>
18. <https://liputan.co.id/2020/09/syaikhu-usul-revitalisasi-jalur-kereta-api-ciranjang-cipatat-ada-padat-karya/>
19. <https://medialingkar.com/syaikhu-dorong-kemenhub-terus-lakukan-revitalisasi-jalur-kereta-api/>
20. <https://m.suarakarya.id/detail/119340/Syaikhu-Dorong-Kemenhub-Terus-Lakukan-Revitalisasi-Jalur-Kereta-Api>
21. <http://spiritnews.co.id/2020/09/24/syaikhu-dorong-kemenhub-terus-lakukan-revitalisasi-jalur-kereta-api/>



Bareng DPR RI, Jembatan Gantung “Bali” di Resmikan Bupati Karawang

Sudah rampung beberapa Minggu terakhir dan menjadi ajang selfie yang viral di masyarakat, Jembatan gantung Babakan Renteng - Linggarsari (Bali) yang menghubungkan Kecamatan Telagasari - Lemahabang, diresmikan Bupati Karawang dr Cellica Nurrachadiana, Rabu (25/8).

JEMBATAN dengan panjang sekitar 100 meter itu, merupakan hasil dari bantuan fisik Anggota DPR RI Komisi V PKS, Ahmad Syaikhu. Hadir dalam kesempatan tersebut, Anggota DPRD Karawang dr Atta Subagjadinata, H Budi-



wanto, Camat Telagasari dan Camat Lemahabang bersama puluhan Kades dan BPD dua Kecamatan.

“Kami haturkan terimakasih, dengan bantuan jembatan ini tentu saja akses masyarakat dua kecamatan, baik perdagangan maupun pertanian jadi lebih fleksibel, bahkan konstruksinya yang indah, menjadikan jembatan gantung ini tempat ber-selfie ria masyarakat desa kami dan luar desa, “ Kata Kades Linggarsari Rasam Efendi, Rabu (25/8).

Bupati Karawang, dr Cellica Nurrachadiana mengatakan, figur DPR RI sekaliber Ahmad Syaikhu ini patut diapresiasi masyarakat Karawang, sebab perannya bagi pembangunan di Karawang begitu dirasakan. Selain memberikan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) di Banyusari, Pak Syaikhu juga membangun rulahu di Sarijaya Kecamatan Majalaya, penanganan bantuan fisik di Cemarajaya dan termasuk jembatan gantung Babakan Renteng - Linggarsari di Kecamatan Telagasari ini.

la tengok konstruksinya, jambatan yang di bangun begitu artistik, sehingga bukan saja jadi akses penghubung antar masyarakat, tetapi juga cocok menjadi tempat selfie dan sekedar jalan-jalan melintas di pertengahan pesawahan. “Kami bangga, atas nama Pemkab, kami haturkan terimakasih kepada Pak KH Ahmad Syaikhlu atas semua bantuan kepada masyarakat Karawang, “ Katanya.

Ditempat yang sama, Anggota DPR RI Ahmad Syaikhlu mengatakan, jambatan ini rampung dan harus di syukuri bersama. Siapa tahu, setelah jadi dan di resmikan, bukan saja jadi akses masyarakat, tetapi bisa jadi tempat wisata seperti halnya di Sukabumi. Tidak banyak yang ia berikan, tapi ini merupakan tanggungjawabnya sebagai anggota DPR RI Dapil Karawang, Purwakarta dan Bekasi untuk selalu memberikan terbaik bagi masyarakat. “Semoga bermanfaat dan bisa dirawat dengan baik, “ pesannya. 🍃

”

**Kami bangga, atas nama
Pemkab, kami haturkan
terimakasih kepada Pak KH
Ahmad Syaikhlu atas semua
bantuan kepada masyarakat
Karawang.**

“



AHMAD SYAIKHU dilahirkan di Desa Ciledugkulon Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon pada 23 Januari 1965, putra kelima dari pasangan KH. Ma'soem bin Aboelkhair, dan Nafi'ah binti Thohir.

Pendidikan dasar sampai dengan kelas V dilaluinya di SDN Ciledug III. Seiring dengan kepindahan ayahnya sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sindanglaut Cirebon ia melanjutkan ke SDN Lemah Abang II hingga lulus.

Pendidikan menengah pertama dilaluinya di SMPN Sindanglaut Cirebon dilanjutkan ke SMAN Sindanglaut Cirebon setelah itu dilanjutkan ke Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Pendidikan agama diperolehnya dari orang tua, kakak, guru privat dan kiai-kiai di Pondok Pesantren Buntet Cirebon.

Setelah menyelesaikan pendidikan di STAN, ia menikah dengan teman sekampusnya, Lilik Wakhidah. Dari pernikahan itu Syaikhu dikaruniai tiga anak laki-laki (Muhammad Kamil, Muhammad Yasir Naufal dan Izzuddin Hamas) dan tiga anak perempuan (Sarah Karimah, Muthiah dan Aisyah Wafa Syahidah).

Saat ini Ahmad Syaikhu menduduki posisi sebagai Anggota DPR RI Komisi V dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VII meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta. Sebelumnya, ia sempat menjabat Wakil Walikota Bekasi untuk periode 2013-2018, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (2009-2019) dan DPRD Kota Bekasi (2004-2009) melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Masuk ke dunia politik berkonsekuensi ia harus mengundurkan diri dari pegawai negeri sipil pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Yang terbaru, pada 5 Oktober 2020, Syaikhu didapuk menjadi Presiden PKS periode 2020-2025.

Kesibukan kerja tidak menghalanginya secara rutin ikut dalam kegiatan olahraga bulutangkis dan bersepeda.

Ia menilai bahwa era reformasi merupakan momentum untuk memperbaiki berbagai tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menerapkan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik). Kunci keberhasilan untuk mewujudkan itu semua menurutnya adalah pengabdian, ketekunan dan kebersamaan. •

Catatan Harian **5**

AHMAD SYAIKHU

[AGUSTUS - OKTOBER 2020]



PADA CATATAN HARIAN KE-5 INI, banyak isu penting yang saya tuliskan. Di antaranya soal Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) atau Omnibus Law yang kini sudah jadi Undang-Undang (UU). Ada juga tentang mendesaknya UU Perlindungan Tokoh Agama seiring penusukan Syaikh Ali Jaber.

Soal Omnibus Law ini, saya juga menyoroti tentang untuk siapa sebenarnya UU tersebut. Sebab isinya berpotensi merugikan rakyat. Karena itu, saat pengesahan menjadi UU, Fraksi PKS menolaknya. Bahkan setelah itu, saya dalam kapasitas sebagai Presiden PKS, meminta pemerintah untuk mencabut UU Ciptaker dan menerbitkan Perppu.

Buku ini mempertegas posisi kami. Bahwa sejak awal, PKS sudah menolak keberadaan RUU Ciptaker. Sehingga jika ada pendapat yang mempersoalkan penolakan PKS hanya di akhir saja, maka terjawab dengan buku ini.

